



Katalog: 4401002

Statistik Kriminal 2022



https://www.bps.go.id



BADAN PUSAT STATISTIK

Statistik Kriminal 2022



STATISTIK KRIMINAL 2022

ISSN: 2089-5291

Nomor Publikasi: 04300.2214

Katalog: 4401002

Ukuran Buku: 17,6 x 25 cm

Jumlah Halaman: xxii + 215 halaman

Naskah:

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

Penyunting:

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

Desain Kover:

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Penerbit:

© Badan Pusat Statistik

Pencetak:

Badan Pusat Statistik

Sumber Ilustrasi:

freepik.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

Tim Penyusun

Pengarah:

Dr. Nurma Midayanti, S.Si., M.Env.Sc.

Penanggung Jawab:

Trophy Endah Rahayu, S.ST., M.Si.

Editor:

Trophy Endah Rahayu, S.ST., M.Si.

Devy Setiyowati, S.Si., M.Si.

Penulis Naskah:

Devy Setiyowati, S.Si., M.Si.

Riyana Dewi, S.ST.

Novita Sari, S.Tr.Stat.

Rivanda Fadhila Indra Putra, S.Tr.Stat.

https://www.bps.go.id

Kata Pengantar

Statistik kriminal merupakan salah satu aspek kunci yang turut memengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya keamanan akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas pariwisata dan ekonomi. Statistik kriminal yang *valid*, *reliable*, dan *sustainable* akan bermanfaat bagi berbagai pihak.

Publikasi Statistik Kriminal 2022 merupakan publikasi yang diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan data kriminalitas di Indonesia antarwaktu. Penerbitan publikasi ini akan sangat bermanfaat untuk memonitor pelaksanaan, perkembangan, dan pencapaian program-program pembangunan, khususnya dalam bidang keamanan.

Data yang disajikan pada publikasi ini berasal dari tiga sumber, yaitu data registrasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) serta data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan Pendataan Potensi Desa (Podes) yang dihasilkan oleh BPS. Ketiga jenis data tersebut tidak dapat secara langsung dibandingkan karena cara pendekatan pengumpulan data yang berbeda, tetapi bisa saling melengkapi (komplementer).

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan sehingga publikasi ini dapat diterbitkan. Semoga data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini dapat bermanfaat khususnya bagi para pengambil keputusan sebagai acuan atau rujukan dalam rangka penyusunan arah dan kebijakan pembangunan nasional, terutama pembangunan dan perbaikan publikasi di masa mendatang.

Jakarta, November 2022
Kepala Badan Pusat Statistik



Margo Yuwono

https://www.bps.go.id

Ringkasan Eksekutif

Publikasi Statistik Kriminal 2022 menyampaikan gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir. Ketersediaan data ini bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan hukum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Informasi yang disajikan mencakup tiga pendekatan utama statistik kriminal, yakni pendekatan pelaku (Data Registrasi Kepolisian), korban (Data Survei Sosial Ekonomi Nasional/Susenas), dan kewilayahan (Pendataan Potensi Desa/Podes). Data registrasi Polri mencatat bahwa selama periode tahun 2019–2021 jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia cenderung menurun. Jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) pada 2019 sebanyak 269.324 kejadian. Angka ini menurun menjadi sebanyak 247.218 kejadian pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 menjadi 239.481 kejadian.

Indikator tingkat kejahatan (*crime rate*) selama periode tahun 2019–2020 juga mengalami penurunan, pada tahun 2019 adalah sebesar 103, menjadi 94 pada tahun 2020, dan menurun menjadi 90 pada tahun 2021. Selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*) adalah sebesar 00.01'57" (1 menit 57 detik) pada tahun 2019 dan menjadi sebesar 00.02'07" (2 menit 07 detik) pada tahun 2020 dan 00.02'11" (2 menit 11 detik) pada tahun 2021. Interval *crime clock* yang semakin panjang menunjukkan intensitas kejadian tindak kejahatan yang semakin menurun.

Data survei menggambarkan persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan selama periode tahun 2019–2021 juga memperlihatkan pola yang sama dengan data registrasi, yaitu cenderung menurun. Persentase penduduk korban kejahatan mengalami penurunan dari 1,01 persen pada tahun 2019 menjadi 0,78 persen pada tahun 2020, kemudian turun lagi menjadi 0,47 pada tahun 2021. Sementara itu, tingkat pelaporan ke polisi (*police report rate*) setiap tahun masih relatif rendah. Pada periode 2019–2021, persentase penduduk Indonesia yang mengalami kejadian kejahatan kemudian melaporkannya ke polisi tidak lebih dari 25 persen. Pada tahun 2021 persentasenya sebesar 23,31 persen, sedikit mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020 (23,46 persen) dan 2019 (22,19 persen).

Selain data kejadian kejahatan yang bersumber data dengan pendekatan individu, kejadian kejahatan dapat dilihat berdasarkan ruang lingkup kewilayahan dengan berbasis desa. Berdasarkan pendataan Potensi Desa, selama periode 2014–2021, jenis kejadian pencurian merupakan kejahatan yang paling banyak terjadi pada desa/kelurahan di Indonesia, jumlahnya mencapai lebih dari 36–45 persen dari seluruh desa/kelurahan.

Executive Summary

The Publication of Crime Statistics 2022 provides a macro-overview of the current security situation and condition, also its developments over the past few years. The availability of this data is beneficial as a basis for sectoral development planning in security and law fields to improve public welfare.

The information presented includes three main approaches, namely the perpetrator's approach (Police Registration Data), the victims' approach (National Socio-Economic Survey/Susenas), and the regional approach (Village Potential Data/Podes). Police Registration Data records that during 2019-2021, the number of crimes or criminal acts in Indonesia tended to decrease. The number of crime incidents (crime total) in 2019 was 269,324 incidents. This number decreased to 247,218 incidents in 2020 and 239,481 incidents in 2021.

The crime rate indicator during 2019–2021 also slightly declined. It was 103 in 2019, 94 in 2020, and kept decreasing to 90 in 2021. The time interval between the occurrence of a crime (crime clock) was 00.01'57" (1 minute 57 seconds) in 2019, 00.02'07" (2 minute 07 seconds) in 2020, and became longer to 00.02'11" (2 minutes 11 seconds) in 2021. The longer time interval shows the lower intensity of the crime.

The survey data describing the percentage of the population who became victims of crime during the 2019–2021 period also showed the same declining pattern as the registration data. The percentage of crime victims had dropped from 1.01 percent in 2019 to 0.78 percent in 2020, and continued to fall until 0.47 percent in 2021. Meanwhile, the annual police report rate was still relatively low. In 2019-2021, the percentage of crime victims who reported the incident to the police was less than 25 percent. It was 23.31 percent in 2021, showing a slight increase compared to 2020 (23.46 percent) and 2019 (22.19 percent).

In addition to data on crime incidents from an individual approach, crime incidents can also be seen based on the regional scope (village-based). Based on the Village Potential data, during the 2014-2021 period, theft was the most common crime in villages/kelurahan in Indonesia, reaching more than 36-45 percent of all villages/kelurahan.

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Ringkasan Eksekutif	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Gambar	xi
Daftar Tabel	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Ruang Lingkup	4
1.4 Sistematika Penyajian	5
BAB II KEJADIAN KEJAHATAN	7
2.1 Angka Kejahatan Nasional	9
2.2 Angka Kejahatan Menurut Polda/Provinsi	10
2.3 Angka Kejahatan Berdasarkan Klasifikasi	12
2.4 Kejahatan Terhadap Nyawa	14
2.5 Kejahatan Terhadap Fisik/Badan	16
2.6 Kejahatan Terhadap Kesusilaan	18
2.7 Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang	20
2.8 Kejahatan Terhadap Hak/milik dengan Penggunaan Kekerasan ..	22
2.9 Kejahatan Terhadap Hak/milik tanpa Penggunaan Kekerasan	24
2.10 Kejahatan Terkait Narkotika	26
2.11 Kejahatan Terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi	28
2.12 Gambaran Kejadian Kejahatan Secara Kewilayah	29
2.13 Perkelahian Massal	36
2.14 Upaya Menjaga Keamanan	41
BAB III KORBAN KEJAHATAN	45
3.1 Penduduk Korban Kejahatan	47
3.2 Tingkat Pelaporan	53
BAB IV INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs) TERKAIT KEAMANAN	59

Daftar Pustaka	71
Catatan Teknis	75
Jenis dan Sumber Data	77
Konsep dan Definisi	79
Penjelasan Teknis	82
Penjelasan Tanda/Simbol	82
Lampiran	83
<i>Relative Standard Error</i>	201

https://www.bps.go.id

Daftar Gambar

II. Kejadian Kejahatan

2.1 Jumlah Kejahatan dan Tingkat Risiko Kejahatan, 2019–2021	9
2.2 Jumlah Kejahatan yang dilaporkan Menurut Polda/Provinsi, 2021 ...	11
2.3 Tingkat Risiko Terkena Kejahatan Menurut Polda/Provinsi, 2021	12
2.4 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Nyawa, 2017–2021	14
2.5 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Nyawa Menurut Polda/Provinsi, 2021	15
2.6 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Fisik/Badan, 2017-2021	16
2.7 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Fisik/Badan Menurut Polda/Provinsi, 2021	17
2.8 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Kesusaiaan, 2017-2021	18
2.9 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Kesusaiaan Menurut Polda, 2021	19
2.10 Jumlah Kejadian dan Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang, 2017-2021	20
2.11 Jumlah Kejadian Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang Menurut Polda/Provinsi, 2021	21
2.12 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik dengan Penggunaan Kekerasan, 2017 – 2021	22
2.13 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik dengan Penggunaan Kekerasan Menurut Polda/Provinsi, 2021	23
2.14 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik Tanpa Penggunaan Kekerasan, 2017–2021	24
2.15 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik Tanpa Penggunaan Kekerasan Menurut Polda/Provinsi, 2021	25
2.16 Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Narkotika, 2017 – 2021	26
2.17 Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Narkotika Menurut Polda/Provinsi, 2021	27

2.18 Jumlah Kejadian Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi, 2017–2021	28
2.19 Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi Menurut Polda/Provinsi, 2021	29
2.20 Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Kejahatan, 2014, 2018, dan 2021 ...	30
2.21 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021	31
2.22 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021	32
2.23 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021	33
2.24 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian (Tanpa Kekerasan) Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021	33
2.25 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penganiayaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021	34
2.26 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021	35
2.27 Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal, 2014, 2018, dan 2021	37
2.28 Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal Menurut Tipenya, 2014, 2018, dan 2021	38
2.29 Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal Menurut Penyelesaiannya, 2014, 2018, dan 2021	39
2.30 Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Konflik Massal Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021	40
2.31 Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Konflik Massal Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021	40

2.32	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya yang Dilakukan Warganya untuk Menjaga Keamanan, 2014, 2018, dan 2021	42
2.33	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi, 2021 ..	42
2.34	Persentase Desa/Kelurahan yang Tidak Memiliki Pos Polisi Menurut Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat, 2021	43
III.	Korban Kejahatan	
3.1	Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan, 2019– 2021	48
3.2	Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kejahatan yang Dialami, 2019-2021	49
3.3	Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kelamin, 2019–2021	50
3.4	Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan Kelompok Umur, 2019–2021	50
3.5	Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Berdasarkan Provinsi, 2019–2021	51
3.6	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Provinsi, 2021	52
3.7	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan Kelompok Umur dan Provinsi, 2021	53
3.8	Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi, 2019-2021	54
3.9	Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi Berdasarkan Provinsi, 2019-2021	55
3.10	Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi dan Mendapatkan/Ditemani Bantuan Hukum, 2019-2021	56
3.11	Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi dan Mendapatkan/Ditemani Bantuan Hukum Berdasarkan Provinsi, 2019-2021	57
IV.	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Terkait Keamanan	
4.1	Proporsi Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir, 2017–2021	64

4.2	Persentase Rumah Tangga yang Merasa Aman Berjalan Sendiri di Area Tempat Tinggalnya Menurut Provinsi, 2020	65
4.3	Proporsi Korban Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir yang Melaporkan kepada Polisi, 2017–2021	66
4.4	Perkembangan IPAK, 2012–2022	67
4.5	Persentase Masyarakat yang Pernah Berurusan dengan Layanan Publik dan Mengeluarkan Uang/Barang/Fasilitas Melebihi Ketentuan, 2020–2022	68
4.6	Persentase Masyarakat Pelaku Usaha yang Pernah Berurusan dengan Layanan Publik dan Mengeluarkan Uang/Barang/Fasilitas Melebihi Ketentuan, 2020–2022	69

Daftar Tabel

II. KEJADIAN KEJAHATAN

Sumber Data: Kepolisian RI

2.1.1	Indikator Kriminalitas Nasional, 2019-2021	86
2.1.2	Peringkat Polda Menurut Jumlah Kejahatan dan Risiko Penduduk Terkena Kejahatan, 2021	87
2.1.3	Jumlah Kejahatan Menurut Kepolisian Daerah, 2019-2021	88
2.1.4	Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan Menurut Kepolisian Daerah, 2019-2021	89
2.1.5	Persentase Penyelesaian Kejahatan Menurut Kepolisian Daerah, 2019-2021	90
2.1.6	Selang Waktu Terjadinya Kejahatan Menurut Kepolisian Daerah, 2019-2021	91

Sumber Data: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

2.1.7	Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk Menurut Kepolisian Daerah, 2019-2021	92
2.1.8	Jumlah Kejahatan Menurut Kelompok Jenis Kejahatan, 2019-2021	93
2.1.9	Jumlah Kejahatan Menurut Kelompok/Jenis Kejahatan dan Bulan, 2021	94
2.1.10	Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2019	98
2.1.11	Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2020	104
2.1.12	Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2021	110

Sumber Data: Potensi Desa

2.2.1	Jumlah Desa/Kelurahan, 2014, 2018, dan 2021	118
2.2.2	Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan Yang Ada Kejadian Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Kejahatan, 2014, 2018, dan 2021	119

2.2.3 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021	120
2.2.4 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penganiayaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021	121
2.2.5 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perkosaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021	122
2.2.6 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021	123
2.2.7 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021	124
2.2.8 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penipuan/Penggelapan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021	125
2.2.9 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembakaran dengan Sengaja Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021	126
2.2.10 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perdagangan Orang Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021	127
2.2.11 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Penyalahgunaan/Pengedaran Narkoba Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021	128
2.2.12 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Perjudian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021	129
2.2.13 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021	130

2.2.14 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penganiayaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021	131
2.2.15 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perkosaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021	132
2.2.16 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021	133
2.2.17 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021	134
2.2.18 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penipuan/Penggelapan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021	135
2.2.19 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembakaran dengan Sengaja Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021	136
2.2.20 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perdagangan Orang Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021	137
2.2.21 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Penyalahgunaan/Pengedaran Narkoba Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021	138
2.2.22 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Perjudian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021	139

Sumber Data: Potensi Data

2.3.1 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia Menurut Beberapa Karakteristik Perkelahian Massal yang Terjadi, 2014, 2018, dan 2021	142
2.3.2 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Konflik Massal Selama Setahun yang Lalu Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021	143

2.3.3	Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2014	144
2.3.4	Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2018	146
2.3.5	Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2021	148
2.3.6	Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2014	150
2.3.7	Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2018	152
2.3.8	Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2021	154
2.3.9	Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal dan Mampu Menyelesaiannya Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021	156

Sumber Data: Potensi Data

2.4.1	Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya yang Dilakukan Warganya untuk Menjaga Keamanan, 2014, 2018, dan 2021	158
2.4.2	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Menurut Provinsi, 2014	159
2.4.3	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Menurut Provinsi, 2018	160
2.4.4	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Menurut Provinsi, 2021	162
2.4.5	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Menurut Provinsi, 2014	164
2.4.6	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Menurut Provinsi, 2018	165

2.4.7	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Menurut Provinsi, 2021	167
2.4.8	Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Membangun Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021	169
2.4.9	Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Membentuk Regu Keamanan Lingkungan Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021	170
2.4.10	Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Menambah Anggota Hansip/Linmas Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021	171
2.4.11	Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Memeriksa Setiap Warga Luar Desa yang Masuk (Pelaporan Tamu yang Menginap Lebih dari 24 Jam ke Aparat Lingkungan Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021	172
2.4.12	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2014	173
2.4.13	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2018	174
2.4.14	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2021	175
2.4.15	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2014	176
2.4.16	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2018	177
2.4.17	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2021	178

III. KORBAN KEJAHATAN

Sumber Data: Survei Sosial Ekonomi Nasional

3.1.1	Persentase Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kejahatan yang Dialami, 2019-2021	180
-------	---	-----

3.1.2	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2019-2021	181
3.1.3	Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Menurut Jenis Kelamin, Kelamin, 2019-2021	182
3.1.4	Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Menurut Kelompok Umur, 2019-2021	183
3.1.5	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Pencurian Menurut Provinsi, 2019-2021	184
3.1.6	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Penganiayaan Menurut Provinsi, 2019-2021	185
3.1.7	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Menurut Provinsi, 2019-2021	186
3.1.8	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Pelecehan Seksual dengan Kekerasan Menurut Provinsi, 2019-2021	187
3.1.9	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Lainnya Menurut Provinsi, 2019-2021	188
3.1.10	Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi Menurut Provinsi, 2019-2021	189
3.1.11	Persentase Penduduk yang Pernah Melapor dan Mendapatkan/ Ditemani Bantuan Hukum Menurut Provinsi, 2019-2021	190
3.1.12	Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melapor ke Polisi Menurut Jenis Kejahatan dan Provinsi, 2019-2021	191

IV. INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs) TERKAIT KEAMANAN

Sumber Data: Survei Sosial Ekonomi Nasional

4.1.1	Persentase Tingkat Kekhawatiran Rumah Tangga Berjalan Sendirian di Siang Hari Menurut Provinsi, 2020	194
4.1.2	Persentase Tingkat Kekhawatiran Rumah Tangga Berjalan Sendirian di Malam Hari Menurut Provinsi, 2020	195
4.1.3	Persentase Tingkat Kekhawatiran Rumah Tangga Berkendara (Sepeda, Sepeda Motor, Mobil) Sendirian di Malam Hari Menurut Provinsi, 2020	196

5.1.1	Proporsi Penduduk yang Menjadi Korban Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir, 2019-2021	198
5.1.2	Persentase Rumah Tangga yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya Menurut Provinsi, 2020	199
5.1.3	Proporsi Korban Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir yang Melaporkan kepada Polisi, 2019-2021	200

SAMPLING ERROR

6.1.1	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2021	204
6.1.2	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Laki-Laki yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2021	206
6.1.3	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Perempuan yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2021	208
6.1.4	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Pencurian Menurut Provinsi, 2021	210
6.1.5	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi Menurut Provinsi, 2021	212
6.1.6	<i>Sampling Error</i> Persentase Rumah Tangga yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya Menurut Provinsi, 2020	214

https://www.bps.go.id

01

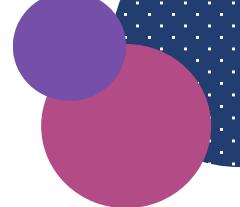
PENDAHULUAN

Statistik kriminal bermanfaat sebagai dasar **penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat** serta perencanaan pembangunan nasional



Statistik kriminal digunakan juga untuk memenuhi kebutuhan data internasional, yaitu **UN-CTS** dan **indikator SDGs, khususnya Tujuan ke-16**





https://www.bps.go.id

BAB I

Pendahuluan

1. 1 Latar Belakang

Data kriminal merupakan salah satu aspek kunci yang turut memengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya keamanan akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas pariwisata dan ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Data kriminal yang *valid*, *reliable*, dan *sustainable* akan bermanfaat bagi berbagai pihak. Selain stabilitas politik, aspek keamanan merupakan salah satu faktor penting bagi investor untuk berinvestasi pada suatu wilayah. Kondisi keamanan yang baik, akan menciptakan iklim investasi yang baik, dan sebaliknya. Kemudian, faktor keamanan juga membuat masyarakat umum menjadi lebih tertarik untuk melakukan kunjungan wisata ke wilayah tertentu, dan sebaliknya. Oleh karena itu, ketersediaan data kriminal sangat diperlukan. Ketersediaan data ini juga sangat bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Data kriminal akan menjadi tolok ukur dan acuan publik dalam menilai tingkat keamanan suatu wilayah. Kebutuhan fundamental setiap manusia terdiri dari kebutuhan biologis seperti makan, minum serta tidur, dan kebutuhan sosial, seperti status sosial, peranan sosial, aktualisasi diri dan rasa aman. Saat ini dapat dikatakan bahwa rasa aman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Menurut Abraham Maslow dalam teori hierarki kebutuhan manusia (Maslow, 1943), rasa aman berada pada tingkatan yang kedua di bawah kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan. Hal ini menunjukkan bahwa rasa aman merupakan kebutuhan manusia yang penting.

1. 2 Maksud dan Tujuan

Publikasi Statistik Kriminal 2022 ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan data statistik kriminal secara berkala dan berkesinambungan. Ketersediaan data ini bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Data kriminal juga dibutuhkan dalam level internasional yakni pemenuhan data *United Nations Surveys on Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems* (UN-CTS) untuk *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), serta pemenuhan indikator SDGs, khususnya Goal 16 terkait dengan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

Tujuan penyusunan publikasi ini adalah dalam rangka memperoleh gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan masyarakat terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir. Secara khusus, penyusunan publikasi ini juga ditujukan untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai karakteristik kejadian kejahatan, pelaku kejahatan, dan korban kejahatan yang terjadi di Indonesia.

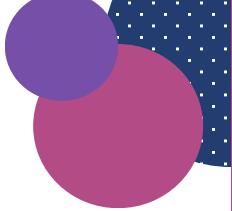
1. 3 Ruang Lingkup

Publikasi ini menyajikan gambaran kejadian kejahatan, pelaku kejahatan, dan korban kejahatan yang terjadi di Indonesia, baik pada level provinsi maupun level nasional. Khusus untuk data yang bersumber dari Mabes Polri disajikan menurut wilayah/daerah Kepolisian (Polda) dan nasional. Sesuai dengan ketersediaan data, untuk keseluruhan statistik dan indikator mengenai kejadian tindak kejahatan, pelaku kejahatan, dan korban kejahatan disajikan selama tiga tahun terakhir berturut-turut, yaitu tahun 2019, 2020, dan 2021. Untuk keseluruhan statistik dan indikator bersumber dari Potensi Desa disajikan selama tiga periode terakhir, yaitu tahun 2014, 2018, dan 2021.

1. 4 Sistematika Penyajian

Publikasi ini secara keseluruhan disajikan dalam beberapa bagian (Bab) yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

- Bab I menjelaskan latar belakang dan tujuan penyusunan publikasi.
- Bab II menyajikan gambaran umum dan perkembangan kejadian kejahatan termasuk kejadian kejahatan berdasarkan data polisi dan gambaran kejadian kejahatan dan konflik secara kewilayahannya bersumber dari Podes.
- Bab III menyajikan data korban kejahatan berdasarkan karakteristik demografi dan sosial ekonomi.
- Bab IV menyajikan data yang merupakan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terkait keamanan.
- Catatan teknis menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini, meliputi jenis dan sumber data, konsep/definisi, penjelasan teknis mengenai statistik/indikator yang disajikan, dan penjelasan terkait tanda/simbol yang digunakan dalam publikasi ini.
- Bagian terakhir merupakan daftar pustaka dan tabel lampiran.



https://www.bps.go.id

02 KEJADIAN KEJAHATAN



Jumlah kejadian kejahatan
(crime total) tahun 2021

⬇️ **239.481**

Tingkat risiko kejahatan
(crime rate) tahun 2021

⬇️ **90/100.000 penduduk**



Selang waktu kejahatan
(crime clock) tahun 2021

⬆️ **00.02'11"**



https://www.bps.go.id

BAB II

Kejadian Kejahatan

2. 1 Angka Kejahatan Nasional

Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Menurut Mohammad Hatta (2008), angka statistik kejahatan merupakan gambaran jumlah kerugian yang diakibatkan terjadinya kejahatan. Angka tersebut belum tentu sesuai kenyataan yang ada karena diduga masih banyak kejahatan yang tidak dilaporkan ke polisi atau biasa disebut *dark number*. Dalam statistik kriminal terdapat beberapa indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kejahatan dari sisi makro dan tingkat keseriusan. Dari sisi makro terdapat indikator angka jumlah kejahatan (*crime total*), angka kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*), dan selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*). Menurut Savitz (Savitz, 1978), dalam konteks makro perlu kehati-hatian dalam memaknai angka kejahatan karena merupakan agregat semua jenis kejahatan yang terjadi dalam satu waktu tanpa mempertimbangkan tingkat keseriusannya.

◆ Gambar 2.1 Jumlah Kejahatan dan Tingkat Risiko Kejahatan, 2019 - 2021



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Berdasarkan Gambar 2.1, jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) pada tahun 2019 sebanyak 269.324 kejadian, angka ini terus mengalami penurunan baik pada tahun 2020 dan 2021, masing-masing sebanyak 247.218 kejadian dan 239.481 kejadian. *Crime rate* merupakan angka yang dapat menunjukkan tingkat kerawanan suatu kejahatan pada suatu wilayah tertentu dalam waktu tertentu. Semakin tinggi angka *crime rate* maka tingkat kerawanan akan kejahatan suatu daerah semakin tinggi pula, dan sebaliknya. Selama periode tahun 2019–2021, tingkat resiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk juga terus mengalami penurunan, pada tahun 2021 sebesar 90. Angka ini menurun dari 94 pada tahun 2020 dan 103 pada tahun 2019.

Untuk indikator kriminalitas lainnya, yaitu selang waktu terjadinya kejahatan (*crime clock*) selama periode 2019-2021 juga menunjukkan pola perkembangan yang serupa. Selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan adalah 00.01'57" (1 menit 57 detik) pada tahun 2019 dan menjadi sebesar 00.02'07" (2 menit 07 detik) pada tahun 2020. Kemudian intervalnya menjadi semakin panjang pada tahun 2021 menjadi sebesar 00.02'11" (2 menit 11 detik). Interval waktu yang semakin panjang menunjukkan intensitas kejadian tindak kejahatan yang semakin menurun dan sebaliknya.

Pada tahun 2021, terjadi perbaikan pada beberapa indikator kriminalitas seperti penurunan *crime total* dan *crime rate* serta peningkatan *crime clock*.

2. 2 Angka Kejahatan Menurut Polda/Provinsi

Jumlah kejahatan untuk level Polda/Provinsi selama tahun 2021 disajikan pada Gambar 2.2. Polda Sumatera Utara mencatat jumlah kejahatan terbanyak (36.534 kejadian), disusul oleh Polda Metro Jaya (DKI Jakarta dan sekitarnya) sebanyak 29.103 kejadian, dan Polda Jawa Timur (19.257 kejadian). Sementara itu, Provinsi Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Sulawesi Barat merupakan tiga wilayah dengan jumlah kejahatan paling sedikit dengan jumlah kejadian kejahatan berturut-turut sebanyak 971 kejadian, 1.008 kejadian, dan 1.500 kejadian.

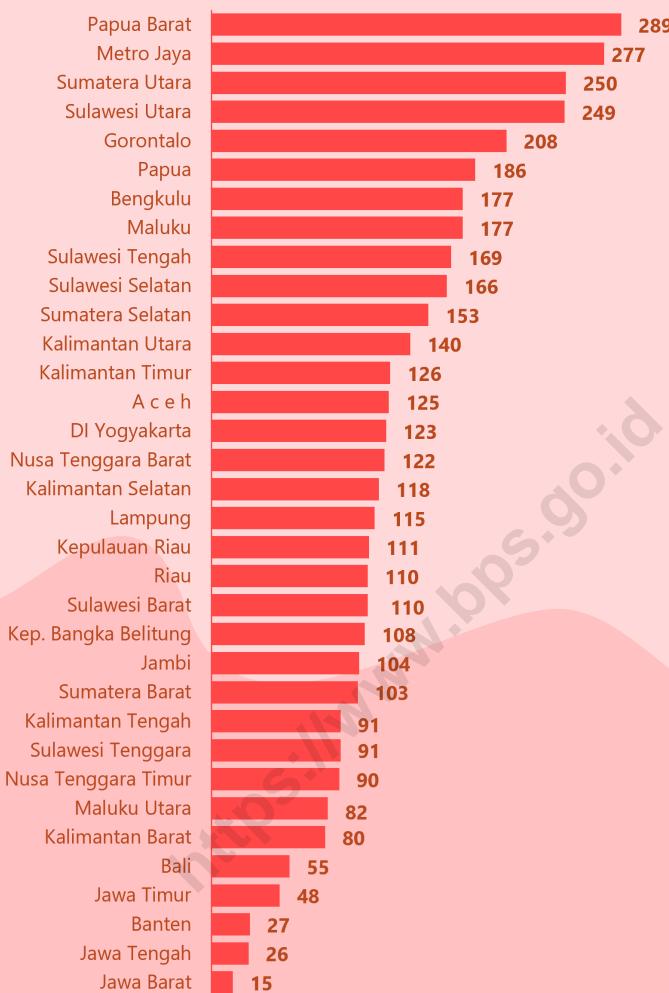
◆ Gambar 2.2 Jumlah Kejadian yang Dilaporkan Menurut Polda/Provinsi, 2021



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.3 menggambarkan *crime rate*, Polda Papua Barat mencatat tingkat kejadian tertinggi yakni 289 (setiap 100.000 penduduk), disusul oleh Polda Metro Jaya (DKI Jakarta dan sekitarnya) sebesar 277, dan Polda Sulawesi Utara sebesar 250. Provinsi Jawa Timur termasuk kategori lima terbesar dari sisi jumlah kejadian (*crime total*), tetapi dari sisi tingkat kejadian (*crime rate*) termasuk kelompok lima terendah yakni sebesar 48. Hal ini tentu karena pengaruh jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur yang besar. Nilai *crime rate* sebesar 48 di Provinsi Jawa Timur ini mengandung arti bahwa dari 100.000 penduduk di Provinsi Jawa Timur, 48 di antaranya merupakan korban kejadian.

◆ Gambar 2.3 Tingkat Risiko Terkena Kejahatan Menurut Polda/Provinsi, 2021



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

2. 3 Angka Kejahatan Berdasarkan Klasifikasi

Jumlah kejahatan (*crime total*) dan tingkat risiko terkena kejahatan (*crime rate*) hanya menggambarkan peristiwa kejahatan secara makro dan umum. Angka kejahatan ini dapat lebih bermanfaat khususnya dalam menggambarkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan tingkat kerawanan suatu wilayah apabila dilihat secara lebih detail. Oleh karena itu, pada publikasi ini jenis kejahatan dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria, yakni:

- Target dari kejadian kejahatan (orang, harta benda, ketertiban umum, negara, dan sebagainya).
- Tingkat keseriusan kejahatan (kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap fisik, kejahatan terhadap hak milik/barang, dan sebagainya).
- Bagaimana kejahatan tersebut dilakukan (kejahatan terhadap hak/milik dengan penggunaan kekerasan, kejahatan terhadap hak milik/barang tanpa kekerasan, dan sebagainya).

Pengelompokan jenis kejahatan ini sejalan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia dan *The International Classification of Crime for Statistical Purposes (ICCS)* yang digagas Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni UNODC (*United Nation Office on Drugs and Crime*) (UNODC, 2015). Berikut klasifikasi kejahatan yang terdapat di dalam publikasi ini:

No	Klasifikasi Kejahatan	Jenis Kejahatan
(1)	(2)	(3)
1	Kejahatan terhadap Nyawa	Pembunuhan
2	Kejahatan terhadap Fisik/Badan	Penganiayaan Berat
		Penganiayaan Ringan
		Kekerasan dalam Rumah Tangga
3	Kejahatan terhadap Kesusilaan	Perkosaan
		Pencabulan
4	Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang	Penculikan
		Mempekerjakan Anak di Bawah Umur
5	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan	Pencurian dengan Kekerasan
		Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi)
		Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam (Sajam)
6	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang	Pencurian
		Pencurian dengan pemberatan
		Pencurian Kendaraan Bermotor
		Pengrusakan/Penghancuran Barang
		Pembakaran dengan Sengaja
		Penadahan

No	Klasifikasi Kejahatan	Jenis Kejahatan
(1)	(2)	(3)
7.	Kejahatan Terkait Narkotika	Narkotika dan Psikotropika
8.	Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi	Penipuan/Perbuatan Curang
		Penggelapan
		Korupsi
9.	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	Terhadap Ketertiban Umum

Sumber: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia dan *The International Classification of Crime for Statistical Purposes (ICCS)*

2.4 Kejahatan terhadap Nyawa

Salah satu kejahatan yang paling tinggi hierarkinya dalam klasifikasi kejahatan internasional adalah kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan/homicide). Selain paling tinggi hierarkinya, jenis kejahatan ini juga yang paling berat hukumannya dalam KUHP Indonesia.

◆ Gambar 2.4 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Nyawa, 2017 – 2021



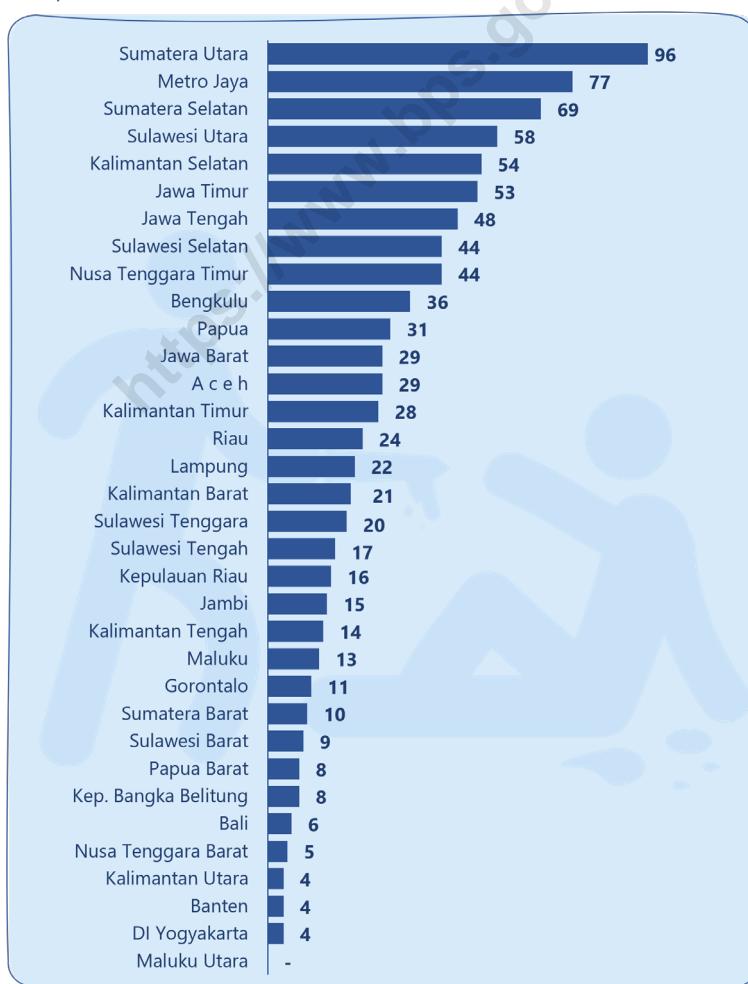
Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.4 memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa dalam periode lima tahun terakhir. Selama periode lima tahun terakhir tersebut, jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) di Indonesia fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2017 tercatat ada 1.150 kejadian (tertinggi pada kurun waktu lima tahun terakhir). Angka ini menurun pada tahun

2018 menjadi 1.024 kejadian, tahun 2019 turun menjadi 964 kejadian, tahun 2020 turun menjadi 898 kejadian, namun pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 927 kejadian (jumlah kejadian tidak mencerminkan jumlah korban karena pada satu kejadian bisa jadi lebih dari satu orang).

Tiga wilayah yang memiliki jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa terbesar pada tahun 2021 adalah Sumatera Utara (96 kejadian), Polda Metro Jaya (DKI Jakarta dan sekitarnya) sebanyak 77 kejadian, dan Sumatera Selatan (69 kejadian). Sedangkan wilayah dengan jumlah kejadian paling sedikit terdapat di Maluku Utara dengan nol kejadian, diikuti oleh DI Yogyakarta, Banten, dan Kalimantan Utara dengan jumlah kejadian yang sama, masing-masing sebanyak empat kejadian (Gambar 2.5).

◆ Gambar 2.5 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Nyawa Menurut Polda/Provinsi, 2021



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

2. 5 Kejahatan Terhadap Fisik/Badan

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah kejahatan terhadap fisik/badan (*violence*) cenderung mengalami penurunan. Kejahatan terhadap fisik/badan termasuk di dalamnya adalah penganiayaan ringan, penganiayaan berat, dan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan Gambar 2.6, pada tahun 2017 jumlah kejahatan terhadap fisik/badan sebanyak 42.683 kejadian, turun menjadi 39.567 kejadian pada tahun 2018, turun pada tahun 2019 menjadi 38.983 kejadian, pada tahun 2020 turun menjadi 36.672, dan turun lagi pada tahun 2021 menjadi 28.091 kejadian.

**Terjadi penurunan jumlah
kejadian kejahatan terhadap
fisik/badan yang cukup
signifikan hingga mencapai nilai
terendah pada tahun 2021.**

◆ Gambar 2.6 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Fisik/Badan, 2017-2021



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Jumlah kejadian kejahatan terhadap fisik/badan paling banyak terjadi di wilayah Polda Sumatera Utara dengan 4.287 kejadian. Wilayah dengan jumlah kejadian terbanyak kedua adalah Sulawesi Selatan, yaitu sebanyak 3.096 kejadian. Sementara itu, Jawa timur menduduki posisi tertinggi ketiga dengan jumlah kejadian sebanyak 1.716 kejadian. Tiga wilayah yang terdapat kejadian kejahatan terhadap fisik paling sedikit adalah Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, masing-masing sebanyak 24 kejadian, 77 kejadian, dan 123 kejadian (Gambar 2.7).

◆ Gambar 2.7 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Fisik/Badan Menurut Polda/Provinsi, 2021



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

2.6 Kejahatan Terhadap Kesusilaan

Klasifikasi kejahatan terhadap kesusilaan terdiri dari jenis kejahatan perkosaan dan pencabulan. Jumlah kejadian kejahatan terhadap kesusilaan (perkosaan dan pencabulan) di Indonesia selama 2017-2021 berfluktuasi. Gambar 2.8 memperlihatkan bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah kejadian kejahatan terhadap kesusilaan paling tinggi terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar menjadi 6.872 kejadian. Sedangkan jumlah kejadian kejahatan terhadap kesusilaan dalam lima tahun terakhir terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 5.233 kejadian.

**Meski mengalami kenaikan
yang cukup tajam di tahun
2020, jumlah kejadian
kejahatan terhadap kesusilaan
mulai mengalami penurunan
yang signifikan di tahun 2021.**

◆ Gambar 2.8 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Kesusilaan, 2017-2021



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.9 menunjukkan bahwa pada tahun 2021, Provinsi Sumatera Utara merupakan wilayah dengan jumlah kejadian kejahatan terhadap kesusilaan terbanyak di Indonesia, yaitu sebanyak 904 kejadian. Di posisi kedua dan ketiga adalah Jawa Tengah dan Sumatera Barat, masing-masing sebanyak 420 kejadian dan 340 kejadian. Wilayah dengan jumlah kejadian paling sedikit adalah Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Provinsi Riau. Jumlah kejadian di ketiga wilayah tersebut masing-masing 20 kejadian, 21 kejadian, dan 41 kejadian.

◆ Gambar 2.9 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Kesusilaan Menurut Polda/Provinsi, 2021



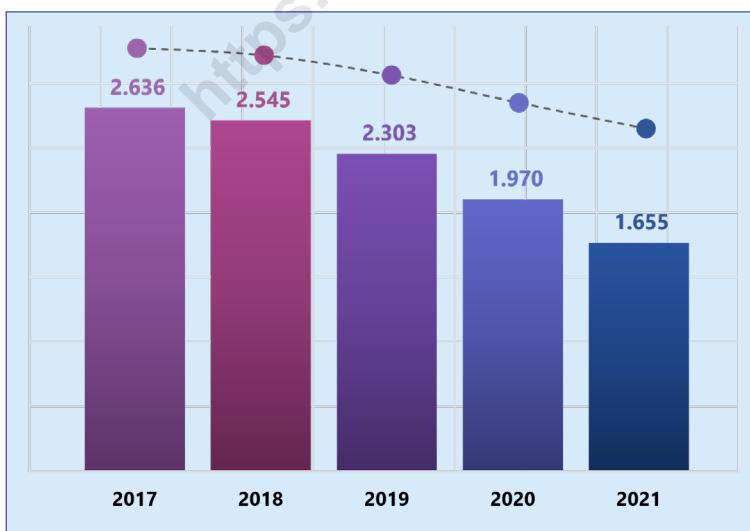
Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

2.7 Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang

Klasifikasi kejahatan terhadap kemerdekaan orang terdiri dari jenis kejahatan penculikan dan mempekerjakan anak di bawah umur. Untuk kejadian kejahatan ini selama periode lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2017 terjadi 2.636 kejadian, menurun menjadi 2.545 kejadian pada tahun 2018, menjadi 2.303 kejadian pada tahun 2019, dan menjadi 1.970 kejadian pada tahun 2020. Kemudian menurun lagi menjadi 1.655 kejadian pada tahun 2021 (Gambar 2.10).

**Selama periode 2017-2021,
jumlah kejahatan terhadap
kemerdekaan orang terus
menurun hingga mencapai nilai
terendah pada tahun 2021.**

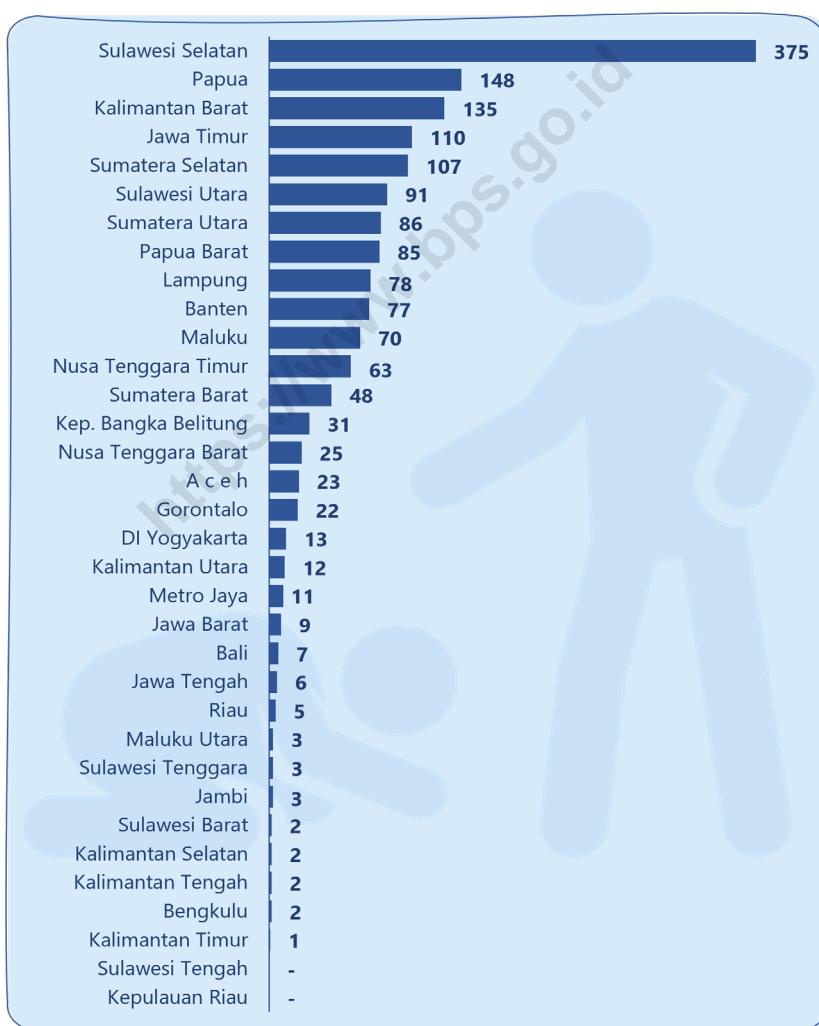
◆ Gambar 2.10 Jumlah Kejadian dan Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang, 2017-2021



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Kejadian kejahatan terhadap kemerdekaan orang di tahun 2021 berdasarkan Polda/Provinsi disajikan pada Gambar 2.11. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat kejadian kejahatan terhadap kemerdekaan orang terbanyak yaitu sebanyak 375. Di posisi kedua adalah Provinsi Papua dengan jumlah sebanyak 148 kejadian, kemudian diikuti Kalimantan Barat di posisi ketiga dengan kejadian sebanyak 135 kejadian. Sementara itu, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kepulauan Riau berada di posisi terakhir karena di wilayah tersebut tidak tercatat kejadian kejahatan ini di tahun 2021.

◆ Gambar 2.11 Jumlah Kejadian Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang Menurut Polda/Provinsi, 2021



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

2. 8 Kejahatan Terhadap Hak/milik dengan Penggunaan Kekerasan

Jenis kejahatan terhadap hak/milik dengan penggunaan kekerasan secara hierarki tergolong tinggi karena selain menyangkut kejahatan terhadap properti juga merupakan kejahatan terhadap fisik. Klasifikasi kejahatan terhadap hak/milik dengan penggunaan kekerasan terdiri dari pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api (senpi), dan pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata tajam (sajam).

Selama periode lima tahun terakhir, jumlah kejadian kejahatan terhadap hak/milik dengan penggunaan kekerasan di Indonesia menunjukkan tren yang menurun. Jumlah kejadian kejahatan terhadap hak/milik dengan penggunaan kekerasan pada tahun 2021 sebanyak 4.838 kejadian, menurun dibanding tahun 2020 sebanyak 6.538 kejadian (Gambar 2.12).

◆ Gambar 2.12 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik dengan Penggunaan Kekerasan, 2017-2021

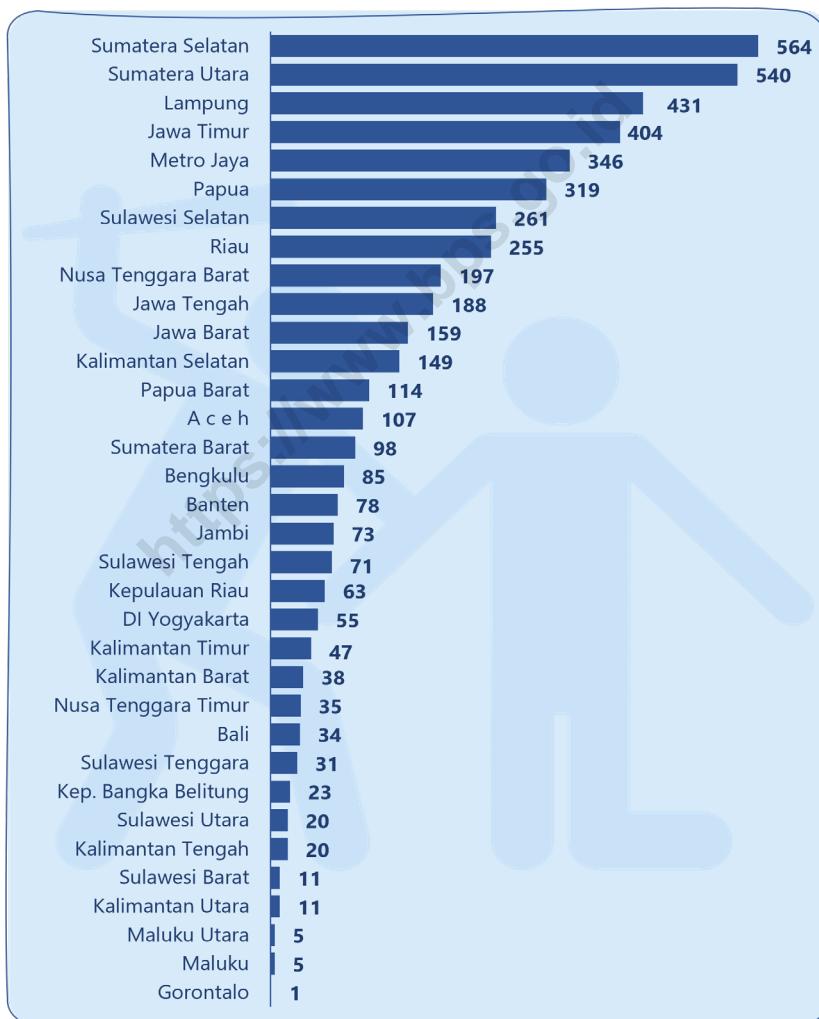


Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Selama periode 2017-2021, jumlah kejadian terhadap hak/milik dengan penggunaan kekerasan terus menurun hingga mencapai nilai terendah pada tahun 2021.

Berdasarkan Gambar 2.13, wilayah Polda dengan jumlah kejadian kejahatan terhadap hak milik/barang dengan kekerasan terbanyak pada tahun 2021 adalah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu sebanyak 564 kejadian. Di posisi kedua terbanyak adalah Provinsi Sumatera Utara dengan 540 kejadian. Diikuti oleh Provinsi Lampung dengan 431 kejadian. Wilayah Polda dengan jumlah kejadian kejahatan paling sedikit adalah Provinsi Gorontalo sebanyak satu kejadian, diikuti oleh Provinsi Maluku dan Maluku Utara dengan jumlah kejadian yang sama, yaitu lima kejadian.

◆ Gambar 2.13 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik dengan Penggunaan Kekerasan Menurut Polda/Provinsi, 2021



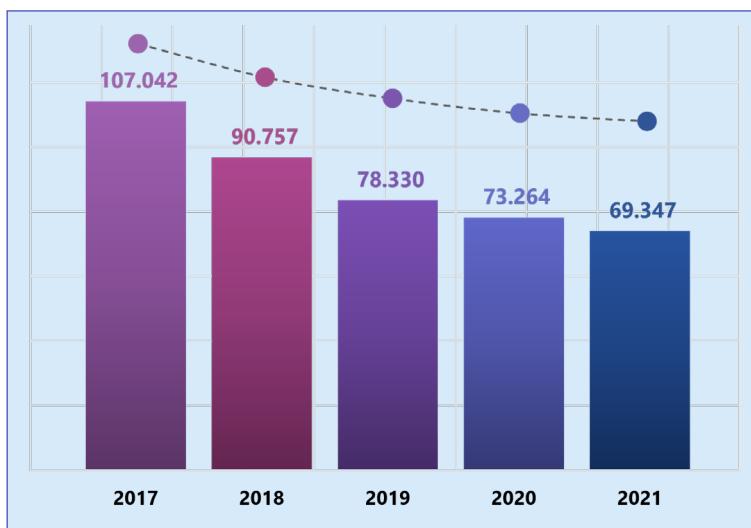
Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

2. 9 Kejahatan Terhadap Hak/milik tanpa Penggunaan Kekerasan

Kejahatan hak/milik tanpa penggunaan kekerasan mengelompokkan kejahatan berupa pencurian, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, pengrusakan/penghancuran barang, pembakaran dengan sengaja, dan penadahan. Jumlah kejadian kejahatan terhadap hak/milik tanpa penggunaan kekerasan selama periode lima tahun terakhir cenderung menurun. Berdasarkan Gambar 2.14 pada tahun 2019 terjadi 78.330 kejadian, menjadi 73.264 kejadian pada tahun 2020, dan menurun menjadi 69.347 kejadian pada tahun 2021. Kejadian kejahatan pencurian tanpa penggunaan kekerasan merupakan jenis kejahatan yang paling banyak dalam segi jumlah setiap tahunnya. Kejadian ini banyak didominasi oleh kejadian pencurian biasa dan pencurian dengan pemberatan.

**Selama periode 2017-2021,
jumlah kejadian kejahatan terhadap
hak/milik tanpa penggunaan
kekerasan terus menurun
hingga mencapai nilai terendah
pada tahun 2021.**

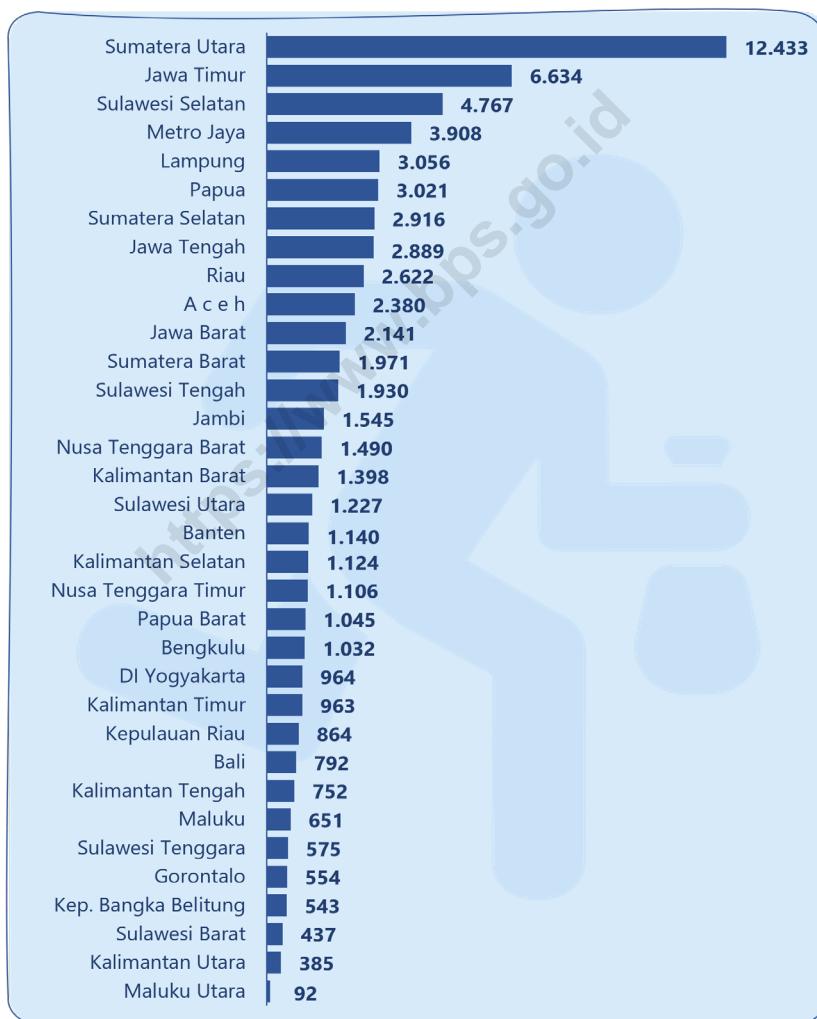
◆ Gambar 2.14 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik Tanpa Penggunaan Kekerasan, 2017 – 2021



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Jumlah kejadian kejahatan terhadap hak milik/barang tanpa kekerasan disajikan pada Gambar 2.15. Provinsi Sumatera Utara merupakan wilayah dengan kasus terbanyak, yaitu sebanyak 12.433 kejadian kejahatan. Di posisi kedua terdapat wilayah Jawa Timur dengan 6.634 kejadian, kemudian diikuti oleh Provinsi Sulawesi Selatan dengan 4.767 kejadian. Tiga wilayah dengan jumlah kejadian paling sedikit adalah Provinsi Maluku Utara, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Barat masing-masing sebanyak 92 kejadian, 385 kejadian, dan 437 kejadian.

◆ Gambar 2.15 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik Tanpa Penggunaan Kekerasan Menurut Polda/Provinsi, 2021



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

2. 10 Kejahatan Terkait Narkotika

Kejahatan terkait narkoba merupakan jenis kejahatan yang termasuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Kejahatan yang termasuk dalam kelompok kejahatan terkait narkotika adalah kejahatan narkotika dan psikotropika. Kejahatan ini memiliki pola yang mirip dengan kejahatan lain. Jumlah kejadian kejahatan terkait narkotika di Indonesia selama periode lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Jumlah kejadian kejahatan terkait narkotika tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 39.588 kejadian. Angka ini meningkat dari tahun 2017 dengan jumlah kejadian sebanyak 35.142 kejadian. Namun, pada tahun 2019 menurun menjadi 36.478 kejadian. Kemudian pada tahun 2020 sedikit meningkat menjadi 36.611 kejadian dan kembali meningkat menjadi 36.954 kejadian pada tahun 2021 (Gambar 2.16).

◆ Gambar 2.16 Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Narkotika, 2017–2021

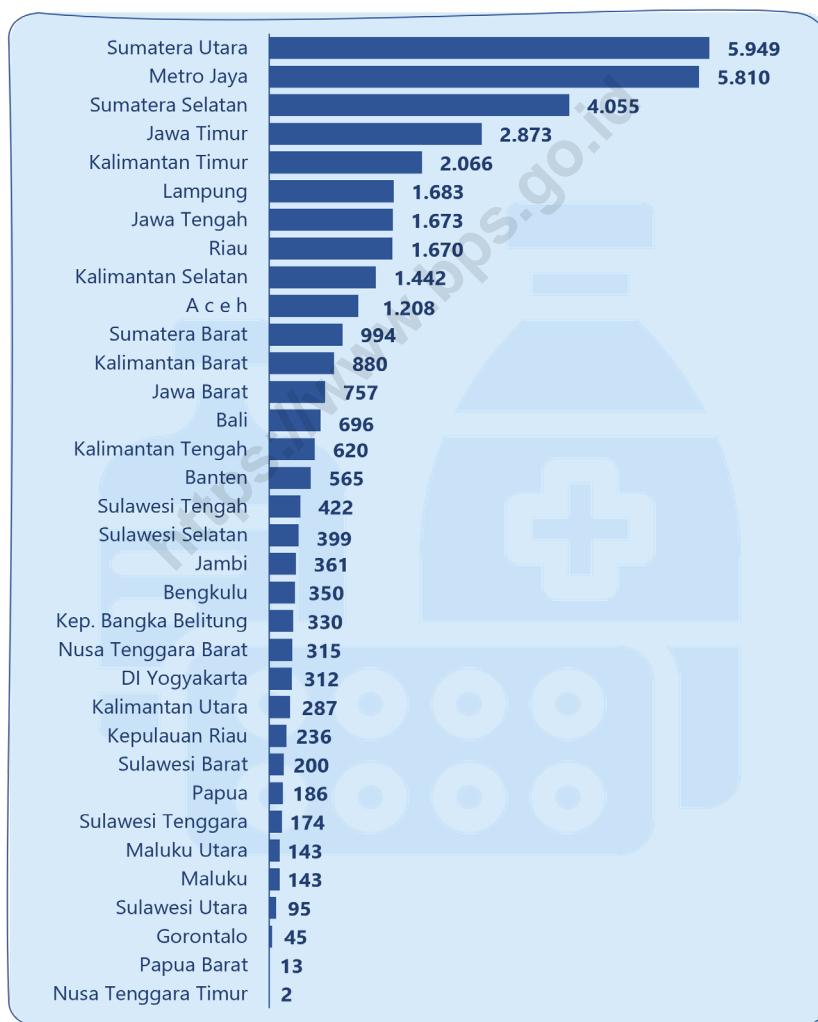


Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Pencegahan dan penanganan
kejahatan terkait narkotika
perlu menjadi perhatian
karena jumlah kasusnya terus
mengalami peningkatan selama
periode 2020-2021.

Gambar 2.17 menunjukkan jumlah kejadian terkait narkotika tahun 2021 paling banyak terdapat di wilayah Sumatera Utara dengan jumlah 5.949 kejadian, kedua adalah Polda Metro Jaya (DKI Jakarta dan sekitarnya) dengan jumlah 5.810 kejadian, dan ketiga terdapat Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah 4.055 kejadian. Gambar 2.17 juga menunjukkan wilayah dengan jumlah kejadian terendah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Gorontalo, masing-masing dengan 2 kejadian, 13 kejadian, dan 45 kejadian.

◆ Gambar 2.17 Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Narkotika Menurut Polda, 2021



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

2.11 Kejahatan Terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi

Klasifikasi kejahatan ini adalah penipuan, penggelapan, dan korupsi. Kejadian kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi yang tercatat di Polri selama periode lima tahun terakhir cenderung menurun. Pada tahun 2017 terjadi 47.594 kejadian dan terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2021 menjadi 35.093 kejadian (Gambar 2.18).

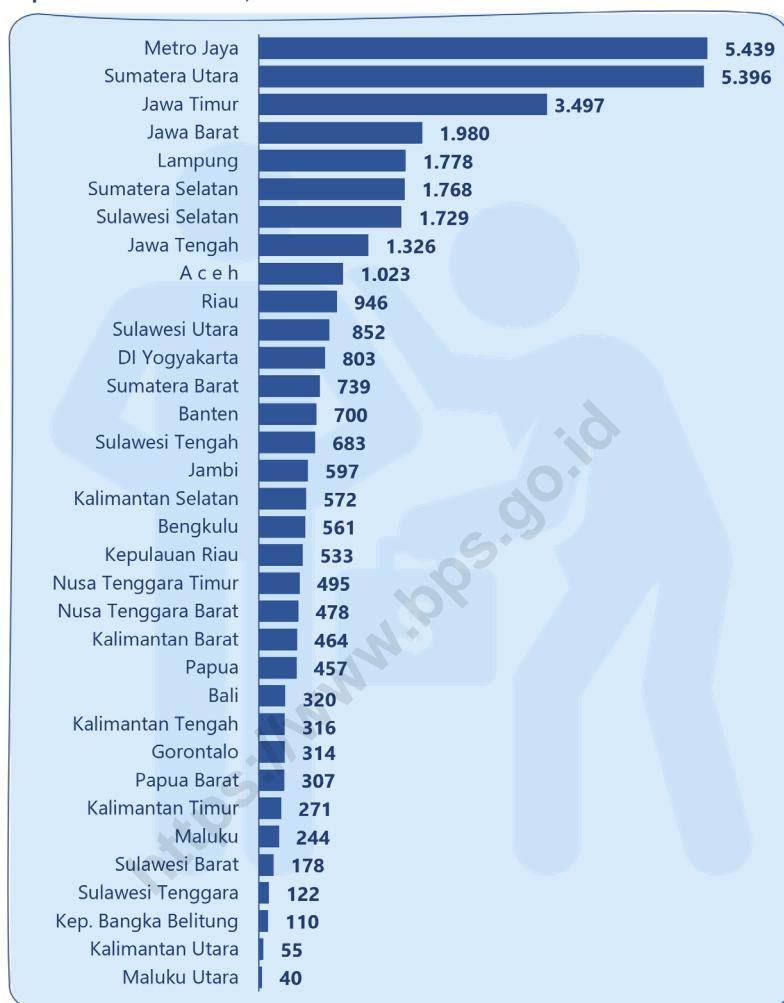
◆ Gambar 2.18 Jumlah Kejadian Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi, 2017-2021



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Wilayah Polda dengan jumlah kejadian kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi terbanyak adalah Polda Metro Jaya (DKI Jakarta dan sekitarnya) sebanyak 5.439 kejadian. Di posisi kedua terbanyak adalah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 5.396 kejadian, kemudian diikuti oleh Polda Jawa Timur pada posisi ketiga sebanyak 3.497 kejadian (Gambar 2.19). Gambar ini juga menunjukkan bahwa Provinsi Maluku Utara, Provinsi Kalimantan Utara, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah wilayah dengan jumlah kejadian kejahatan ini yang paling sedikit, yaitu masing-masing sebanyak 40 kejadian, 55 kejadian, dan 110 kejadian. Kejadian kejahatan yang paling banyak terjadi pada kelompok klasifikasi ini adalah kejahatan penipuan.

◆ Gambar 2.19 Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi Menurut Polda, 2021



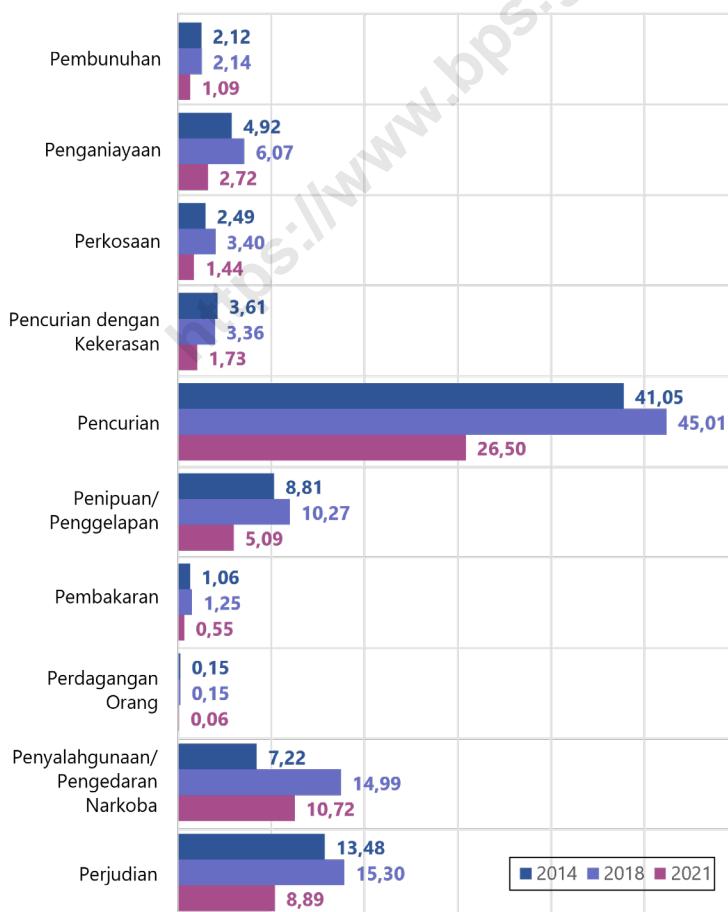
Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

2.12 Gambaran Kejadian Kejahatan Secara Kewilayahan

Bagian ini akan membahas kejadian kejahatan melalui pendekatan kewilayahan yang lebih menitikberatkan pada wilayah atau tempat terjadinya suatu kejadian kejahatan. Secara lebih lanjut, bagian ini akan menjelaskan gambaran situasi dan perkembangan kejadian kejahatan yang dialami oleh masyarakat berdasarkan cakupan wilayah yang diukur melalui jumlah dan persentase desa/kelurahan yang pernah mengalami kejadian kejahatan. Data yang digunakan ini bersumber dari Pendataan Potensi Desa (Podes) tahun 2014, 2018, dan 2021 yang biasanya dilakukan secara rutin oleh BPS setiap tiga tahun.

Berdasarkan hasil Pendataan Podes 2021, persentase desa/kelurahan yang mengalami kejadian pada semua jenis kejahatan secara umum menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jenis kejahatan yang paling banyak terjadi di desa/kelurahan di Indonesia adalah pencurian. Persentase desa/kelurahan yang mengalami kejadian pencurian di tahun 2021 mencapai 26,50 persen dari seluruh desa/kelurahan di Indonesia. Persentase ini jauh lebih besar dibandingkan dengan persentase kejahatan lainnya yang berada di bawah 11 persen. Jika dilihat selama periode 2014, 2018, dan 2021, persentase desa/kelurahan yang mengalami kejadian pencurian menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2014 dan 2018, persentase desa/kelurahan kejadian pencurian masih di atas 40 persen, namun angka ini mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi di bawah 30 persen (Gambar 2.20).

◆ Gambar 2.20 Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Kejahatan, 2014, 2018, dan 2021



Sumber: Podes 2014, 2018, dan 2021

Pada tahun 2021, persentase desa/kelurahan yang mengalami kejahatan secara umum menurun di hampir semua jenis kejahatan. Penurunan terbesar terjadi pada jenis kejahatan perdagangan orang. Kejahatan perdagangan orang turun, dari yang semula sebesar 0,15 persen di tahun 2018 menjadi 0,06 pada tahun 2021. Penurunan terkecil terjadi pada jenis kejahatan penyalahgunaan/pengedaran narkoba, di mana pada tahun 2018 sebesar 14,99 persen dari total desa/kelurahan kemudian turun 28,49 persen menjadi 10,72 persen di tahun 2021. Hal ini tentunya menjadi kabar baik, namun masih harus menjadi perhatian agar perkembangan kejadian ini dapat ditekan atau bahkan terus semakin menurun di kemudian hari.

◆ Gambar 2.21 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021

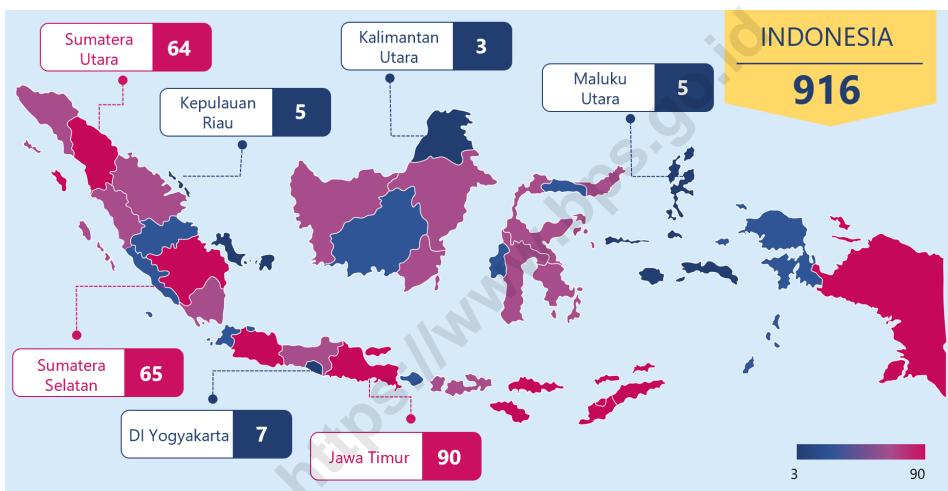


Sumber: Podes 2021

Gambar 2.21 menyajikan persentase desa/kelurahan yang mengalami kejadian kejahatan pembunuhan pada tahun 2021 menurut provinsi yang diukur melalui perbandingan jumlah desa/kelurahan yang mengalami kejadian pembunuhan dibagi total jumlah desa/kelurahan di suatu provinsi. Berdasarkan gambar tersebut, persentase desa/kelurahan yang mengalami kejadian kejahatan pembunuhan selama tahun 2021 memiliki rentang berkisar antara 0,32-4,12 persen dari total desa/kelurahan di masing-masing provinsi. Tiga provinsi dengan persentase desa/kelurahan yang pernah terjadi kejadian pembunuhan terbesar yaitu DKI Jakarta (4,12 persen), Kepulauan Bangka Belitung (2,29 persen), dan Nusa Tenggara Barat (2,00 persen). Sementara itu, tiga provinsi dengan persentase desa/kelurahan yang pernah terjadi kejadian pembunuhan terkecil adalah Aceh (0,32 persen), Maluku Utara (0,42 persen), dan Jawa Tengah (0,43 persen).

DKI Jakarta, Kepulauan Bangka Belitung, dan Nusa Tenggara Barat merupakan tiga provinsi dengan persentase desa/kelurahan yang pernah terjadi pembunuhan terbesar.

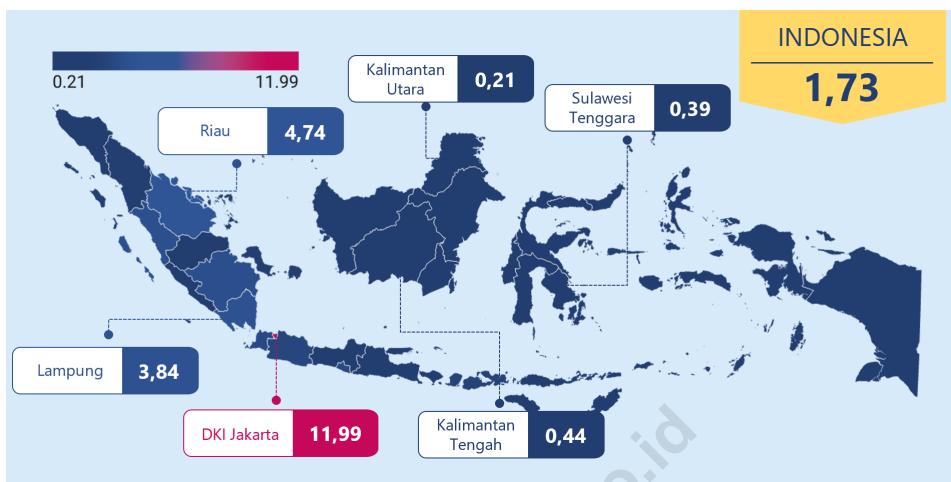
◆ Gambar 2.22 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021



Sumber: Podes 2021

Besarnya kejadian pembunuhan pada tahun 2021 menurut provinsi yang diukur melalui jumlah desa/kelurahan yang pernah mengalami kejadian pembunuhan di 34 provinsi disajikan pada Gambar 2.22. Berdasarkan gambar tersebut, tiga provinsi dengan jumlah desa/kelurahan yang pernah terjadi kejadian kejahanan pembunuhan terbesar secara berturut-turut adalah Jawa Timur (90 desa/kelurahan), Sumatera Selatan (65 desa/kelurahan), dan Sumatera Utara (64 desa/kelurahan). Sementara itu, tiga provinsi dengan jumlah desa/kelurahan yang pernah terjadi kejadian kejahanan pembunuhan paling kecil adalah Kalimantan Utara (3 desa/kelurahan), serta Kepulauan Riau dan Maluku Utara dengan jumlah desa/kelurahan yang sama yaitu 5 desa/kelurahan.

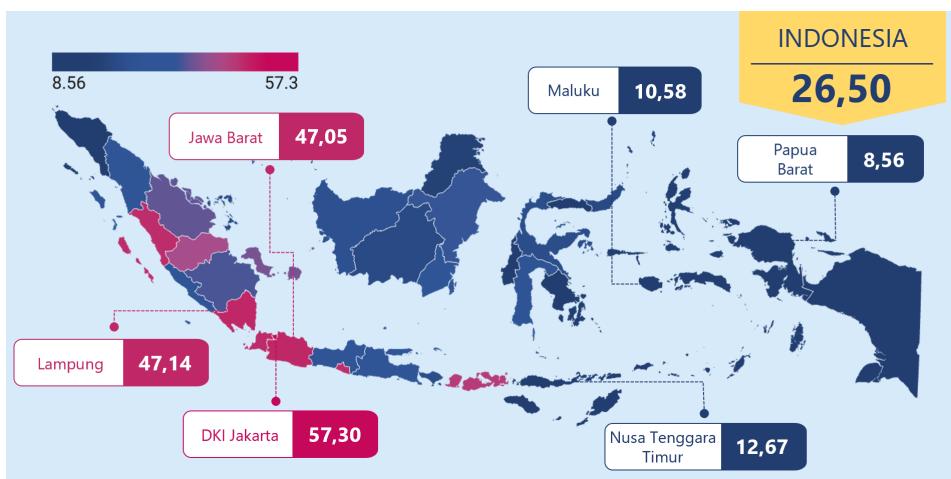
◆ Gambar 2.23 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021



Sumber: Podes 2021

Rentang persentase desa/kelurahan yang pernah ada kejadian kejahatan pencurian dengan kekerasan selama tahun 2021 di 34 provinsi berkisar antara 0,21-11,99 persen (Gambar 2.23). Tiga provinsi dengan persentase desa/kelurahan yang pernah terjadi kejadian pencurian dengan kekerasan terbesar secara berturut-turut adalah DKI Jakarta (11,99 persen), Riau (4,74 persen), dan Lampung (3,84 persen). Di lain sisi, tiga provinsi dengan persentase desa/kelurahan yang pernah terjadi kejadian pembunuhan terkecil secara berturut-turut adalah Kalimantan Utara (0,21 persen), Sulawesi Tenggara (0,39 persen), dan Kalimantan Tengah (0,44 persen).

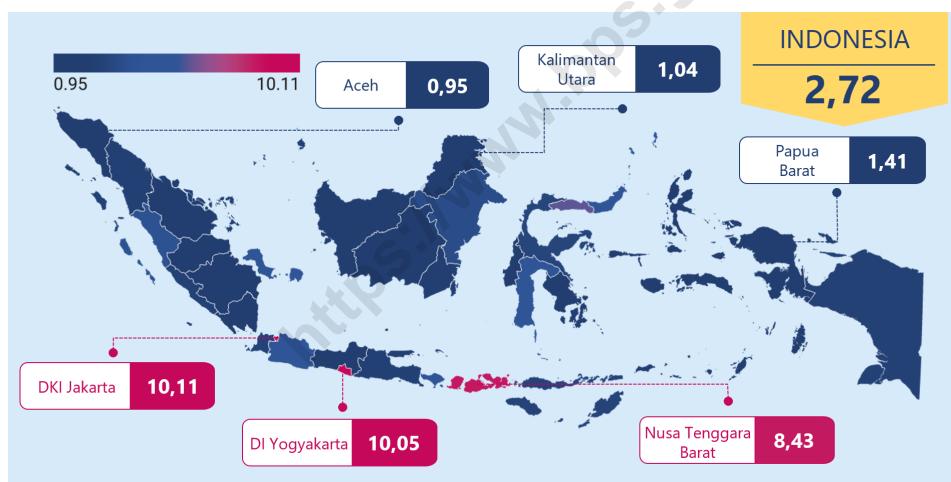
◆ Gambar 2.24 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian (Tanpa Kekerasan) Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021



Sumber: Podes 2021

Kejadian kejahatan pencurian (tanpa kekerasan) merupakan jenis kejahatan yang banyak terjadi di desa/kelurahan di Indonesia. Apabila dikaji menurut provinsi seperti pada Gambar 2.24, persentase desa/kelurahan yang pernah mengalami kejadian kejahatan pencurian (tanpa kekerasan) selama tahun 2021 memiliki rentang yang cukup besar, yaitu berkisar antara 8,56-57,30 persen dari total desa/kelurahan di masing-masing provinsi. Tiga provinsi dengan persentase desa/kelurahan yang pernah ada kejadian kejahatan pencurian terbesar selama tahun 2021 adalah DKI Jakarta (57,30 persen), Lampung (47,14 persen), dan Jawa Barat (47,05 persen). Adapun tiga provinsi dengan persentase desa/kelurahan yang pernah ada kejadian kejahatan pencurian terkecil secara berturut-turut adalah Papua Barat (8,56 persen), Maluku (10,58 persen), dan Nusa Tenggara Timur (12,67 persen).

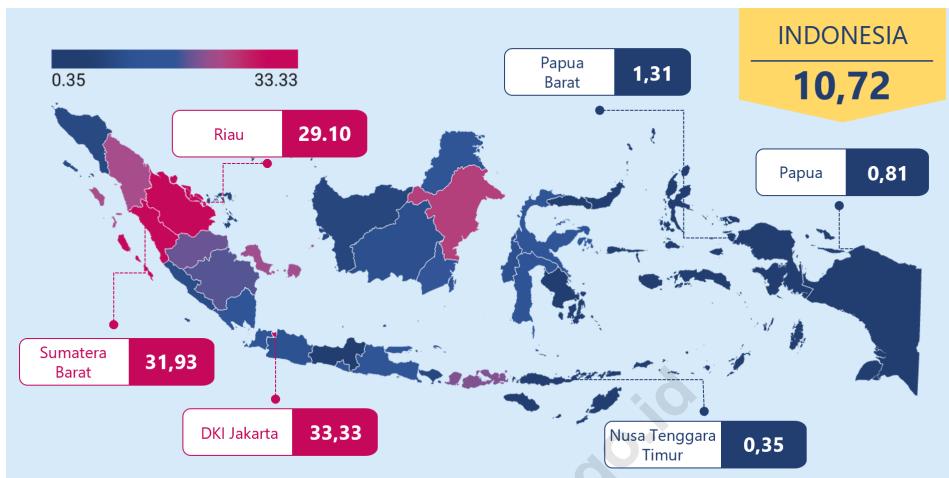
◆ Gambar 2.25 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penganiayaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021



Sumber: Podes 2021

Rentang persentase desa/kelurahan yang pernah ada kejadian penganiayaan selama tahun 2021 berada pada kisaran 0,95–10,11 persen dari total desa/kelurahan di masing-masing provinsi (Gambar 2.25). Tiga provinsi dengan persentase desa/kelurahan yang pernah terjadi kejadian penganiayaan terbesar secara berturut-turut adalah DKI Jakarta (10,11 persen), DI Yogyakarta (10,05 persen), dan Nusa Tenggara Barat (8,43 persen). Sementara itu, tiga provinsi dengan persentase desa/kelurahan yang pernah terjadi kejadian penganiayaan terkecil secara berturut-turut adalah Aceh (0,95 persen), Kalimantan Utara (1,04 persen), dan Papua Barat (1,41 persen).

◆ Gambar 2.26 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penyalahgunaan dan Pengedaran Narkoba Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021



Sumber: Podes 2021

Apabila dikaji lebih lanjut menurut provinsi, kejadian penyalahgunaan dan pengedaran narkoba telah merebak di sejumlah desa/kelurahan pada semua provinsi di Indonesia, seperti halnya kejadian kejahatan pencurian dan penganiayaan. Persentase desa/kelurahan yang mengalami kejadian kejahatan narkoba selama periode tahun 2021 memiliki rentang yang cukup besar, yaitu berada pada kisaran 0,35–33,33 persen dari total desa/kelurahan di masing-masing provinsi (Gambar 2.26). Rentang yang cukup besar ini menunjukkan bahwa besaran dan tingkat keseriusan dari kejadian narkoba yang dihadapi oleh masing-masing provinsi cukup bervariasi. Adapun tiga provinsi dengan persentase desa/kelurahan yang pernah terjadi kejadian penyalahgunaan dan pengedaran narkoba terbesar secara berturut-turut adalah DKI Jakarta (33,33 persen), Sumatera Barat (31,93 persen), dan Riau (29,10 persen). Sementara itu, tiga provinsi dengan persentase desa/kelurahan yang pernah terjadi kejadian penyalahgunaan dan pengedaran narkoba terkecil secara berturut-turut adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (0,35 persen), Papua (0,81 persen), dan Papua Barat (1,31 persen).

2. 13 Perkelahian Massal

Fenomena konflik berupa perkelahian massal yang terjadi di Indonesia serta perkembangannya selama satu dekade terakhir secara umum tersaji pada bagian ini. Beberapa aspek yang dilihat meliputi jenis dan cakupan kejadian perkelahian massal serta upaya penyelesaiannya. Tak hanya dikategorikan sebagai kejahatan, perkelahian massal juga dianggap sebagai suatu kondisi yang dapat mengganggu keamanan. Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana kejahatan perkelahian massal yaitu Pasal 170, Pasal 358, dan Pasal 336 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Dahlan dan Tahir, 2014)

Konflik adalah hubungan yang terjadi di antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan (Fisher (2000) dalam Gamayanti dan Nulhaqim (2019)). Kemudian Soekanto (2005) mendefinisikan pertentangan atau pertikaian (konflik) sebagai suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan. Konflik yang ekstrem akan berujung pada kekerasan dan menimbulkan perkelahian massal.

Terkait konflik massal, data yang menjadi sumber utama merupakan data kewilayahan (*spatial data*) yang diperoleh dari data Statistik Potensi Desa (Podes). Pengumpulan data Statistik Podes menggunakan seluruh desa/kelurahan di wilayah Indonesia sebagai unit observasi. Sejalan dengan itu, kajian mengenai perkelahian massal pada bagian ini secara umum akan dilihat dari cakupan jumlah atau persentase desa/kelurahan yang menjadi wilayah atau lokasi kejadian tersebut.

Berdasarkan hasil Podes 2014, 2018, dan 2021, jumlah dan persentase desa/kelurahan yang mengalami perkelahian massal cenderung fluktuatif (Gambar 2.27). Pada tahun 2014, persentase desa/kelurahan yang mengalami kejadian perkelahian massal selama setahun terakhir adalah sebesar 3,38 persen dari total desa/kelurahan di Indonesia. Angka ini mengalami peningkatan menjadi 3,75 persen desa/kelurahan di tahun 2018, namun menurun menjadi sebesar 1,85 persen desa/kelurahan pada tahun 2021.

◆ Gambar 2.27 Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal, 2014, 2018, dan 2021

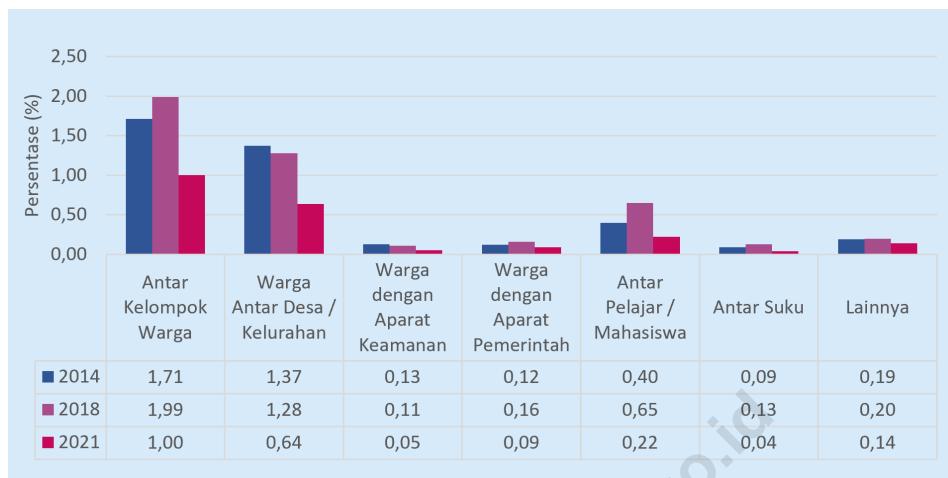


Sumber: Podes 2014, 2018, dan 2021

Jenis perkelahian massal yang dihitung dalam Podes adalah perkelahian antar kelompok warga, perkelahian warga antar desa/kelurahan, perkelahian warga dengan aparat keamanan, perkelahian warga dengan aparat pemerintah, perkelahian antar pelajar, dan perkelahian antar suku selama setahun terakhir yang disebabkan oleh saling ejek, salah paham, kenakalan remaja, dendam lama atau lainnya. Perkelahian yang dicatat di sini adalah perkelahian yang terjadi di desa/kelurahan ini, walaupun pelaku dan korban tidak berasal dari desa/kelurahan ini dalam satu tahun terakhir.

Hasil Pendataan Podes tahun 2021 menunjukkan bahwa perkelahian antar kelompok warga merupakan perkelahian massal yang paling sering terjadi, kemudian disusul oleh perkelahian warga antar desa/kelurahan. Apabila dikaji dari perkembangannya, persentase desa/kelurahan yang mengalami perkelahian antar kelompok warga cenderung fluktuatif. Pada tahun 2014, persentase desa/kelurahan yang mengalami perkelahian antar kelompok warga adalah sebesar 1,71 persen, naik menjadi 1,99 persen di tahun 2018, kemudian turun menjadi 1,00 persen di tahun 2021 (Gambar 2.28).

◆ Gambar 2.28 Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal Menurut Tipenya, 2014, 2018, dan 2021



Sumber: Podes 2014, 2018, dan 2021

Terjadinya suatu konflik dapat memberikan dua pengaruh dalam masyarakat, yaitu pengaruh negatif dan juga pengaruh positif. Pengaruh negatif terjadi apabila konflik tersebut mengakibatkan kerusakan harta benda yang dimiliki oleh masyarakat. Berpengaruh positif apabila konflik tersebut bersifat membangun salah satunya dengan perubahan mindset atau pola pikir masyarakatnya ke arah yang lebih baik (Gamayanti dan Nulhaqim, 2019). Meskipun begitu, terjadinya suatu konflik rawan menciptakan perpecahan. Oleh karena itu, pemerintah telah mengesahkan Undang-undang No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi isu konflik. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemerintah berperan aktif dalam setiap penyelesaian segala bentuk konflik atau benturan fisik dan kekerasan lainnya yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial yang mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Terdapat beberapa strategi yang dipandang lebih efektif dalam pengelolaan konflik, yaitu: (1) konsistensi damai, yaitu mengendalikan konflik dengan cara tidak saling mengganggu dan saling merugikan yang dilakukan dengan menetapkan peraturan yang mengacu pada perdamaian serta diterapkan secara ketat dan konsekuensi; dan (2) mediasi (perantara). Strategi dengan mediasi (perantara) merupakan strategi yang dilakukan apabila konflik menemui jalan buntu, yaitu dengan menunjuk pada pihak ketiga untuk menjadi perantara yang berperan secara jujur dan adil serta tidak memihak (Gurr dalam Soetopo (2001)).

◆ Gambar 2.29 Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal Menurut Penyelesaiannya, 2014, 2018, dan 2021

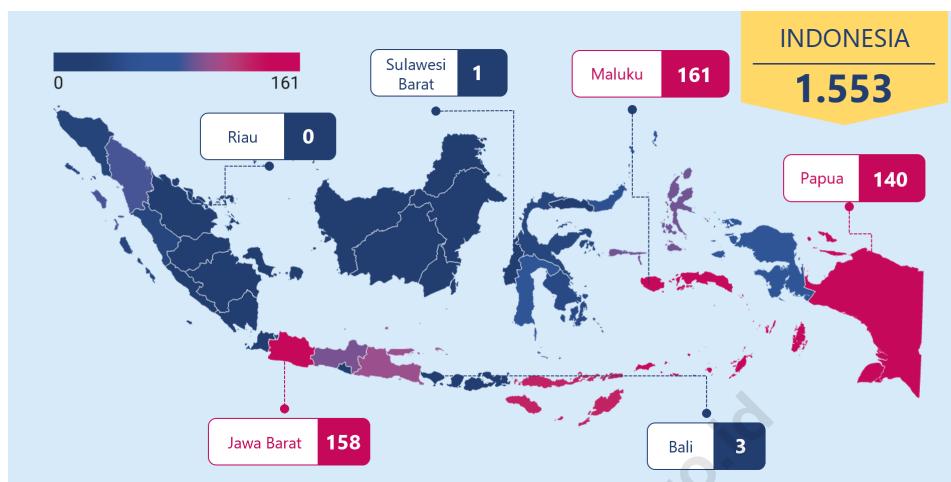


Sumber: Podes 2014, 2018, dan 2021

Berdasarkan Gambar 2.29, persentase penyelesaian kasus perkelahian massal menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2014 mencapai 92,26 persen, kemudian mencapai 94,09 di tahun 2018, dan terus meningkat hingga mencapai 95,49 persen di tahun 2021. Hal tersebut merupakan wujud keberhasilan penanganan permasalahan perkelahian massal di Indonesia. Meskipun demikian, masih terdapat sekitar 4,51 persen desa/kelurahan di Indonesia yang belum dapat menyelesaikan kasus perkelahian massal yang terjadi pada tahun 2021. Oleh karena itu, diperlukan adanya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk tetap meningkatkan upaya penyelesaian perkelahian massal di wilayah desa/kelurahan tempat tinggalnya, sehingga konflik yang belum dapat diselesaikan tersebut akan segera menemukan solusinya.

Jumlah kejadian konflik massal berbeda di masing-masing provinsi selama tahun 2021. Jika dilihat dari segi jumlah desa/kelurahan, provinsi dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak yang pernah mengalami perkelahian adalah Maluku (161), Jawa Barat (158), dan Papua (140). Sementara itu, provinsi dengan jumlah desa/kelurahan terkecil yang pernah mengalami perkelahian massal adalah Provinsi Kepulauan Riau dengan nol kejadian, diikuti oleh Sulawesi Barat dengan 1 kejadian, serta Bali dengan 3 kejadian (Gambar 2.30).

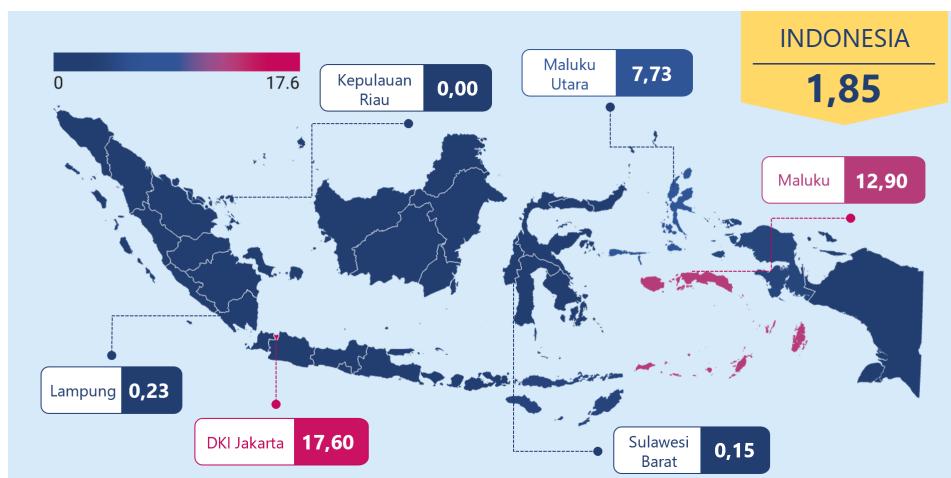
◆ Gambar 2.30 Jumlah Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Ada Kejadian Konflik Massal Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021



Sumber: Podes 2021

Provinsi DKI Jakarta (17,60 persen), Maluku (12,90 persen), dan Maluku Utara (7,73 persen) merupakan tiga provinsi dengan persentase terbesar untuk desa/kelurahan yang pernah mengalami perkelahian massal pada tahun 2021. Sementara itu, provinsi dengan persentase terkecil untuk desa/kelurahan yang pernah mengalami perkelahian massal setahun terakhir secara berurutan adalah Provinsi Kepulauan Riau dengan nol persen, diikuti oleh Sulawesi Barat dengan 0,15 persen, serta Lampung dengan 0,23 persen (Gambar 2.31).

◆ Gambar 2.31 Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Ada Kejadian Konflik Massal Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021



Sumber: Podes 2021

2. 14 Upaya Menjaga Keamanan

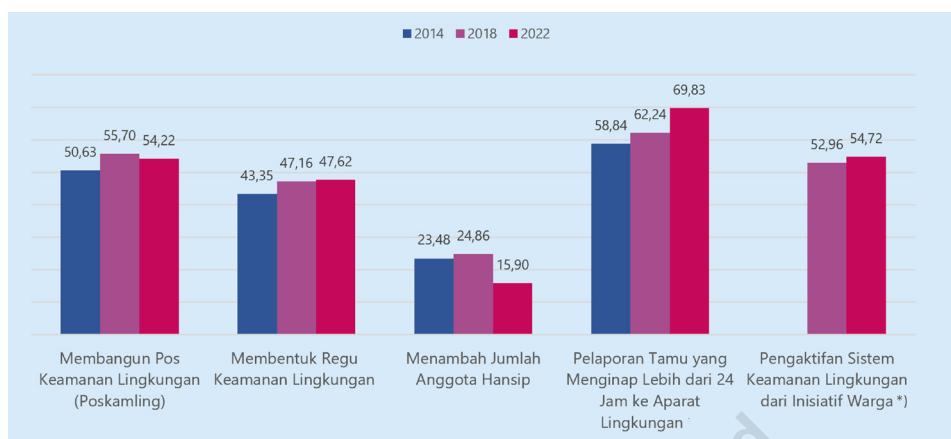
Lingkungan masyarakat kecil di tingkat desa/kelurahan seperti dusun, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT) sering kali melakukan upaya dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat di desa/kelurahan dari gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) seperti pencurian, pencurian kendaraan bermotor (curanmor), dan gangguan kamtibmas lainnya secara mandiri melalui Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling). Upaya dan partisipasi masyarakat tersebut merupakan salah satu yang dibahas dalam bagian ini. Bagian ini menyajikan gambaran umum mengenai upaya dan partisipasi masyarakat yang dilakukan untuk menjaga keamanan di lingkungan desa/kelurahan tempat tinggalnya dan perkembangannya selama satu dekade terakhir.

Data yang digunakan untuk melihat upaya menjaga keamanan ini merupakan data kewilayahan (*spatial data*) dengan unit observasi berupa seluruh desa/kelurahan yang ada di wilayah Indonesia yang digunakan pada Pendataan Podes. Sejalan dengan itu, tingkat dan perkembangan upaya dan partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan pada bagian ini akan dilihat dari cakupan dan perkembangan jumlah desa/kelurahan yang melakukan upaya tersebut.

Usaha dalam menjaga keamanan berdasarkan hasil Podes meliputi keberadaan pembangunan/pemeliharaan pos keamanan lingkungan (poskamling), pembentukan/pengaturan regu keamanan, penambahan jumlah anggota Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat (Hansip/Linmas), pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan, serta pengaktifan sistem keamanan lingkungan yang berasal dari inisiatif warga.

Berdasarkan Gambar 2.32, terlihat bahwa upaya yang paling banyak dilakukan oleh warga desa untuk menjaga keamanan selama tahun 2021 secara berturut-turut adalah melakukan pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan (69,83 persen), pengaktifan sistem keamanan lingkungan berasal dari inisiatif warga (54,72 persen), membangun pos keamanan lingkungan (poskamling) (54,22 persen), membentuk regu keamanan lingkungan (47,62 persen), dan menambah jumlah anggota hansip/linmas (15,90 persen). Pada tahun 2021, terdapat lebih dari setengah desa/kelurahan di Indonesia yang menggiatkan pelaporan tamu, membangun pos keamanan lingkungan (poskamling), dan pengaktifan sistem keamanan lingkungan yang berasal dari inisiatif warga sebagai langkah menjaga keamanan di wilayah tempat tinggalnya. Jika dibandingkan dengan hasil Podes 2018, upaya pembangunan poskamling dan penambahan jumlah anggota hansip/linmas mengalami penurunan.

◆ Gambar 2.32 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya yang Dilakukan Warganya untuk Menjaga Keamanan, 2014, 2018, dan 2021

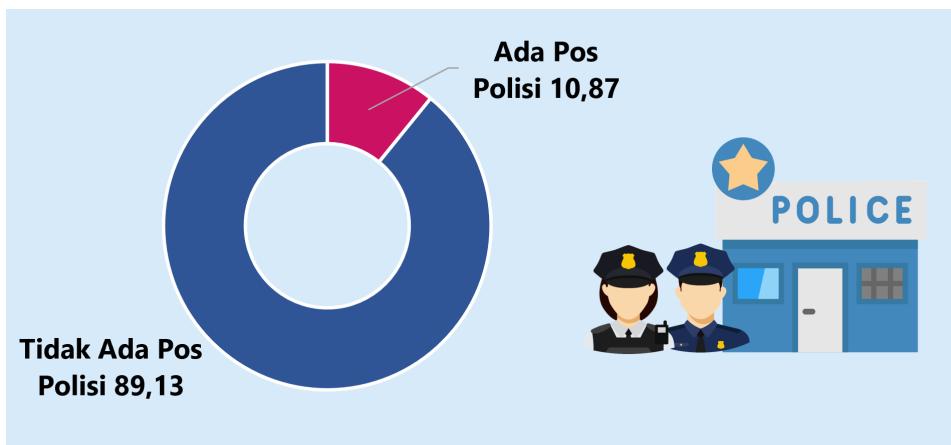


Sumber: Podes 2014, 2018, dan 2021

Catatan: *) Pengaktifan sistem keamanan lingkungan dari inisiatif warga baru tersedia pada Podes 2018 dan 2021

Upaya menjaga keamanan dan ketertiban juga merupakan fungsi dari aparat yang berwenang, dalam hal ini adalah polisi. Untuk mengukur hal tersebut, data Podes menyajikan persentase desa/kelurahan yang terdapat pos polisi. Pos Polisi merupakan kesatuan kepolisian terkecil kepanjangan dari Kepolisian Sektor (Polsek) yang mempunyai peranan sangat penting dan terdepan dalam melaksanakan peran Kepolisian RI, khususnya dalam rangka memelihara Kamtibmas di wilayah kerjanya. Fungsi utama Pos Polisi adalah menganalisa berbagai masalah keamanan dan ketertiban di wilayahnya, melakukan upaya-upaya pemberantasan sebelum masalah tersebut berkembang menjadi situasi yang harus ditangani secara represif/penegakan hukum (Sholichin, E.A., 2014)

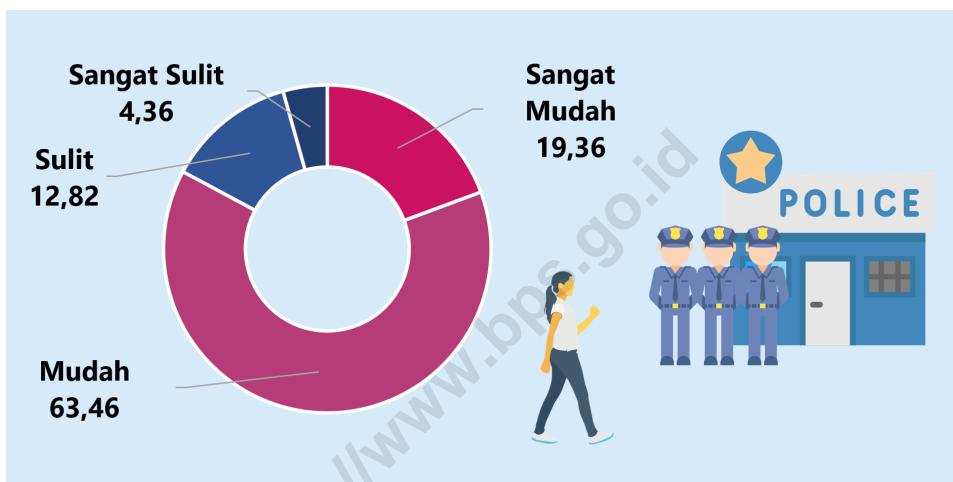
◆ Gambar 2.33 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi, 2021



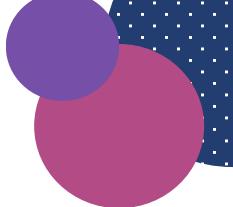
Sumber: Podes 2021

Gambar 2.33 menunjukkan bahwa pada tahun 2021, hanya sekitar 10,87 persen dari keseluruhan desa/kelurahan di Indonesia yang di wilayahnya terdapat pos polisi (termasuk Polsek, Polres, dan Polda). Meskipun demikian, dari sekitar 89,13 persen desa/kelurahan yang tidak ada pos polisi, terdapat sekitar 82,82 persen di antaranya yang menyatakan bahwa akses ke pos polisi terdekat mudah dan sangat mudah (Gambar 2.34).

◆ Gambar 2.34 Persentase Desa/Kelurahan yang Tidak Memiliki Pos Polisi Menurut Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat, 2021



Sumber: Podes 2021



https://www.bps.go.id

03 KORBAN KEJAHATAN

93,06%
penduduk
dewasa menjadi
korban
kejahatan

62,29%
penduduk
korban kejahatan
berjenis kelamin
laki-laki

Dari seluruh penduduk korban
kejahatan tahun 2021, hanya
23,31% yang melaporkannya
ke polisi





https://www.bps.go.id

BAB III

Korban Kejahatan

3. 1 Penduduk Korban Kejahatan

Berdasarkan “*Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power*” pada tanggal 6 September 1985 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Deklarasi Nomor A/Res/40/34 Tahun 1985 ditegaskan, bahwa: “*Victims means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental right, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse power*”. (Korban adalah orang-orang baik secara individual maupun kolektif yang menderita kerugian baik secara fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan substansial dari hak-hak asasi mereka, yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan).

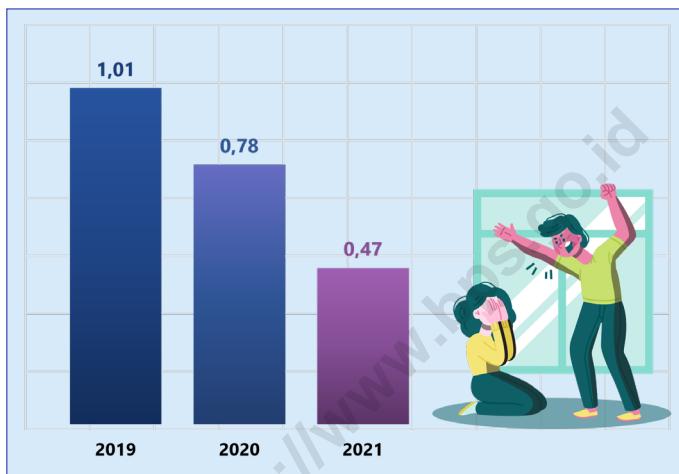
Sementara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban didefinisikan sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Seseorang dikatakan menjadi korban kejahatan bila dalam satu tahun terakhir dirinya atau harta bendanya mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan. Tindak kejahatan yang dimaksud adalah semua tindakan kejahatan dan pelanggaran yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan KUHP yang mengenai diri pribadi seseorang dan harta bendanya, misalnya penipuan, pencurian, pencurian dengan kekerasan (termasuk penodongan dan perampukan), penganiayaan, pelecehan seksual (termasuk perkosaan dan pencabulan), dan lainnya seperti penculikan, pemerasan, dan sebagainya.

Korban kejahatan yang dibahas dalam bagian ini baik jumlah maupun karakteristiknya diperoleh dari Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yakni pada Blok IX. Keterangan Korban Kejahatan Susenas menggambarkan pengalaman responden pada kurun waktu satu tahun sebelum survei. Dengan demikian, Susenas 2020 menggambarkan pengalaman responden pada kurun waktu 1 Januari sampai 31 Desember 2019, Susenas 2021 menggambarkan

pengalaman responden pada kurun waktu 1 Januari sampai 31 Desember 2020, dan Susenas 2022 menggambarkan pengalaman responden pada kurun waktu 1 Januari sampai 31 Desember 2021.

Berdasarkan hasil Susenas, pada tahun 2021, persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan sebesar 0,47 persen dari populasi penduduk Indonesia (Gambar 3.1). Persentase tersebut menurun dibandingkan pengalaman masyarakat pada tahun 2020 (0,78 persen) dan tahun 2019 (1,01 persen).

◆ Gambar 3.1 Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan, 2019-2021

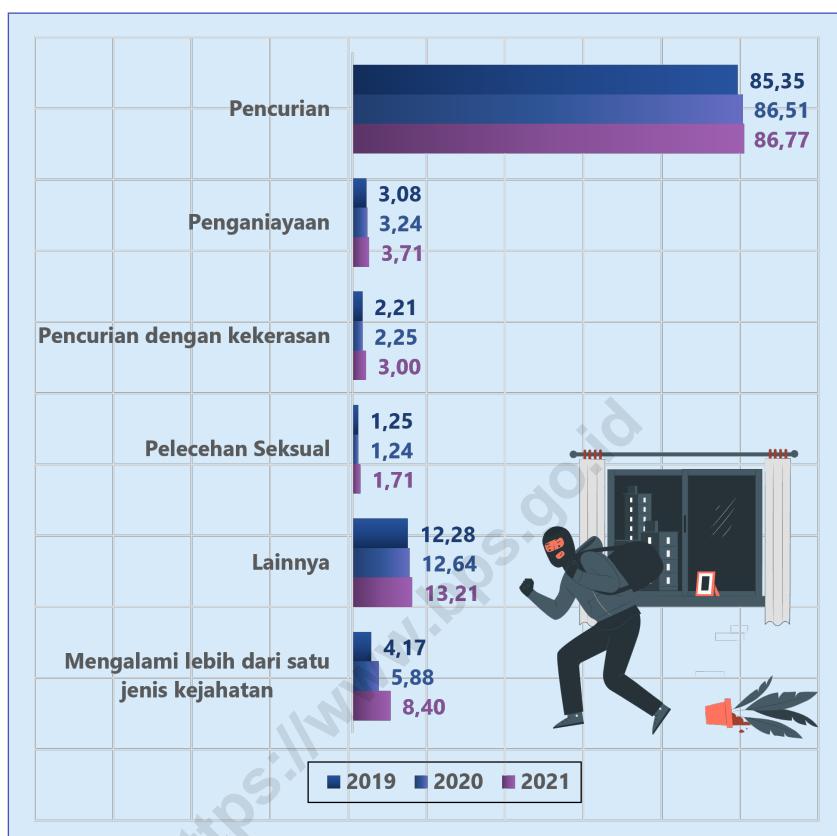


Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020-2022

Persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan terus menurun selama periode 2019-2021.

Berdasarkan jenis kejahatannya, sebagian besar penduduk korban kejahatan mengalami jenis kejahatan pencurian. Persentase korban kejahatan pencurian terus meningkat dari 85,35 persen di tahun 2019 menjadi 86,51 persen di tahun 2020 dan 86,77 persen di tahun 2021. Persentase korban kejahatan terendah terdapat pada jenis kejahatan pelecehan seksual. Meskipun sempat mengalami sedikit penurunan dari 1,25 persen pada tahun 2019 menjadi 1,24 persen pada tahun 2020, korban kejahatan pelecehan seksual kembali mengalami peningkatan menjadi 1,71 persen pada tahun 2021. Persentase korban kejahatan yang mengalami lebih dari satu jenis kejahatan juga terus meningkat dari 4,17 persen di tahun 2019 menjadi 5,88 persen di tahun 2020 dan 8,40 persen di tahun 2021 (Gambar 3.2).

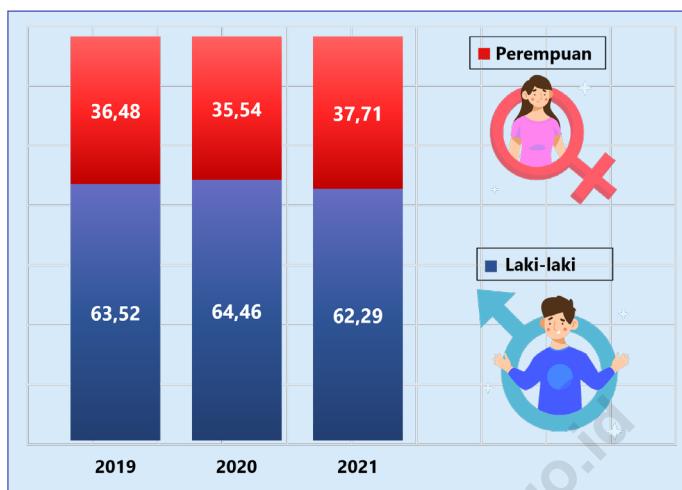
◆ Gambar 3.2 Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kejahatan yang Dialami, 2019-2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020-2022

Penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan dapat dilihat polanya berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. Komposisi penduduk korban kejahatan menurut jenis kelamin disajikan pada Gambar 3.3. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2019-2021, sebagian besar penduduk yang menjadi korban kejahatan berjenis kelamin laki-laki dengan persentase lebih dari 60 persen. Sementara itu, persentase perempuan yang menjadi korban kejahatan sempat mengalami penurunan dari 36,48 persen di tahun 2019 menjadi 35,54 persen di tahun 2020, namun kembali meningkat menjadi 37,71 persen di tahun 2021.

◆ Gambar 3.3 Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kelamin, 2019-2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020-2022

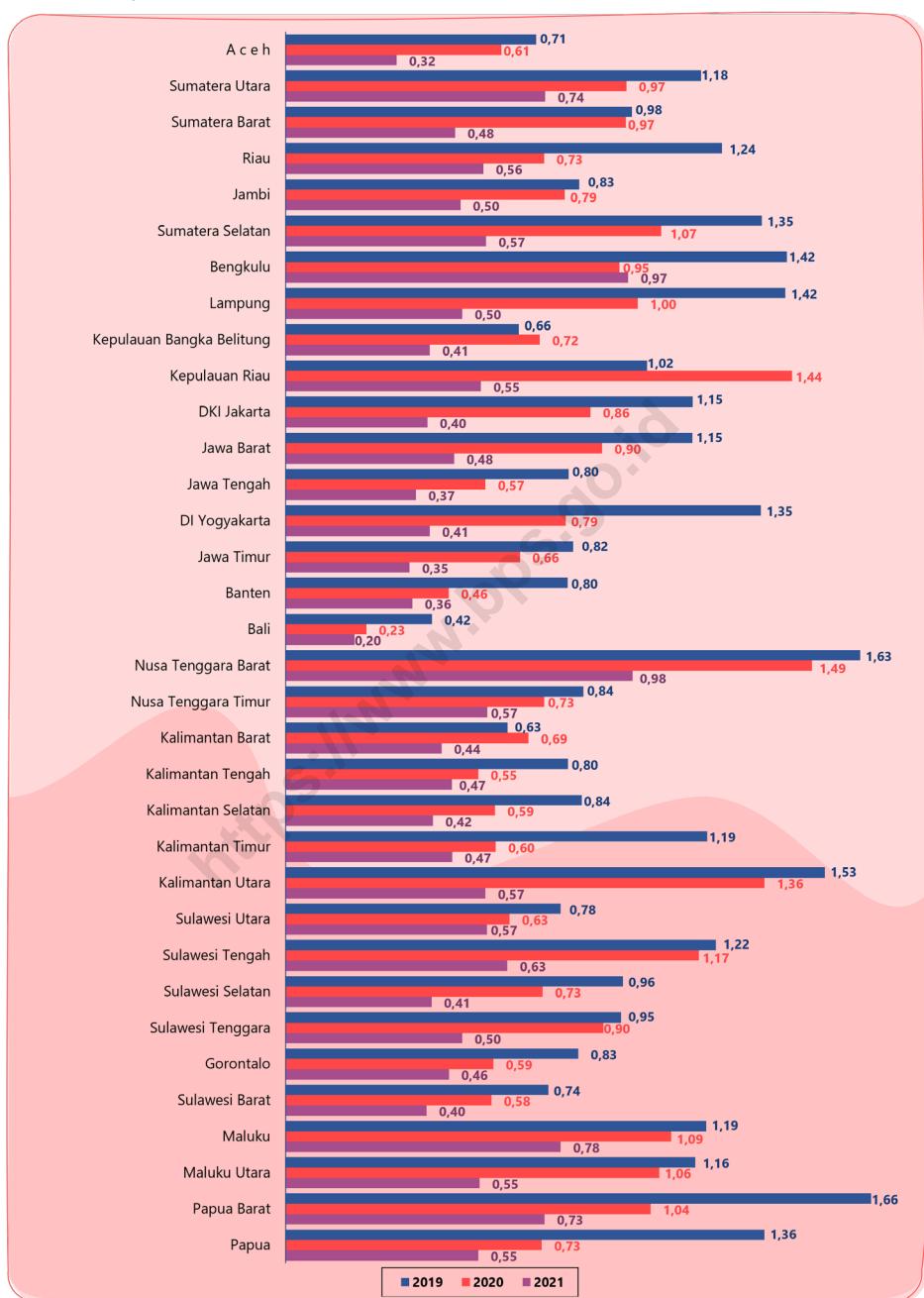
Selama periode 2019-2021, lebih dari 90 persen penduduk yang menjadi korban kejahatan berasal dari kelompok umur dewasa. Di sisi lain, meskipun sempat mengalami penurunan dari 6,86 persen pada tahun 2019 menjadi 5,68 persen pada tahun 2020, persentase anak-anak yang menjadi korban kejahatan kembali meningkat menjadi 6,94 persen pada tahun 2021 (Gambar 3.4).

◆ Gambar 3.4 Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan Kelompok Umur, 2019-2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020-2022

◆ Gambar 3.5 Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Berdasarkan Provinsi, 2019-2021

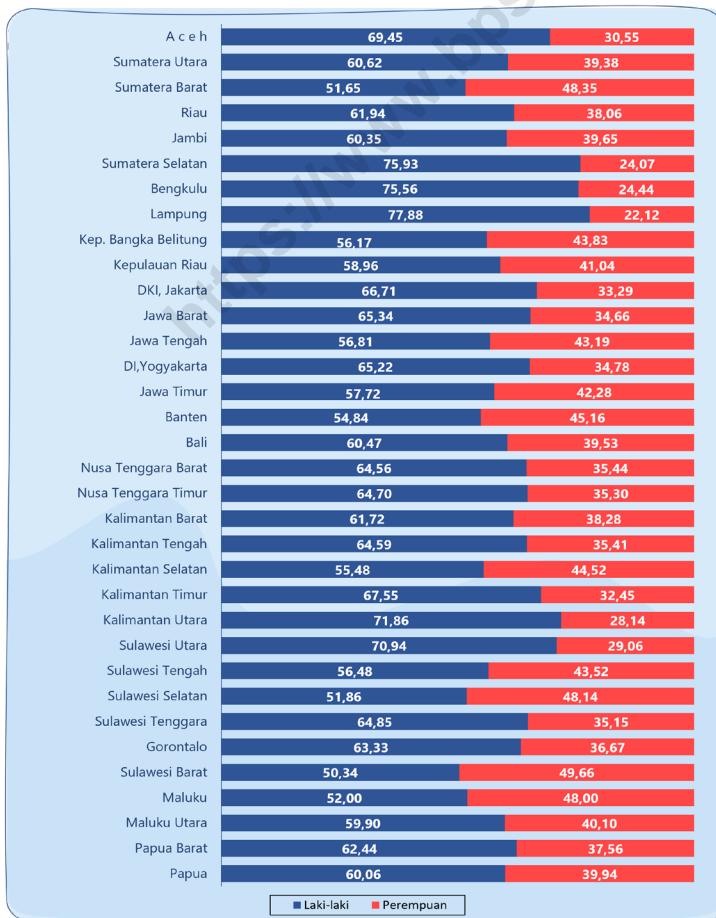


Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020-2022

Pada periode tahun 2020-2021, persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan menurun di seluruh provinsi (Gambar 3.5). Penurunan terbesar terjadi di Provinsi Kepulauan Riau dari 1,44 persen di tahun 2020 menjadi 0,55 persen di tahun 2021. Di sisi lain, Provinsi Bali secara konsisten memiliki persentase penduduk korban kejahatan terendah baik pada tahun 2019 (0,42 persen), tahun 2020 (0,23 persen), maupun tahun 2021 (0,20 persen).

Komposisi penduduk korban kejahatan selama periode tahun 2021 pada setiap provinsi secara umum serupa dengan komposisi secara nasional. Berdasarkan jenis kelamin, persentase laki-laki yang menjadi korban kejahatan lebih banyak dibandingkan perempuan di seluruh provinsi (Gambar 3.6). Pada tahun 2021, persentase penduduk korban kejahatan yang berjenis kelamin perempuan terbesar berturut-turut adalah Provinsi Sulawesi Barat (49,66 persen), Sumatera Barat (48,35 persen), dan Sulawesi Selatan (48,14 persen).

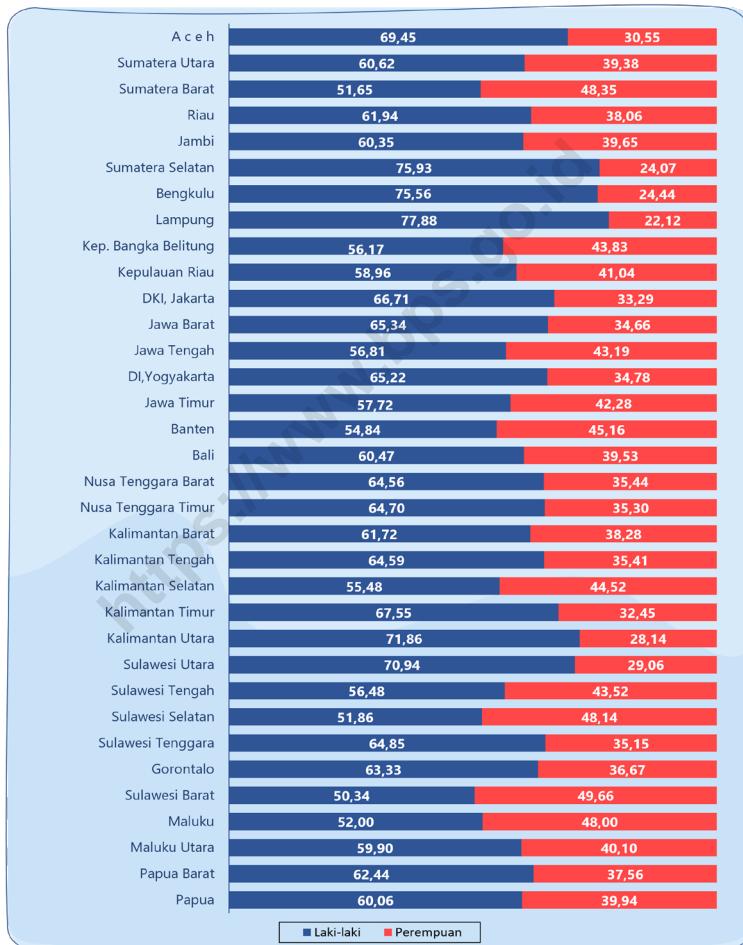
◆ Gambar 3.6 Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Provinsi, 2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2022

Komposisi penduduk korban kejahatan menurut kelompok umur secara keseluruhan untuk semua provinsi menunjukkan bahwa persentase anak-anak yang menjadi korban kejahatan lebih kecil dibandingkan penduduk dewasa (Gambar 3.7). Pada tahun 2021, provinsi dengan persentase penduduk korban kejahatan pada kelompok umur anak-anak terbesar berturut-turut adalah Provinsi Maluku Utara (17,41 persen), Jambi (12,00 persen), dan DKI Jakarta (11,70 persen).

◆ Gambar 3.7 Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Berdasarkan Kelompok Umur dan Provinsi, 2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2022

3.2 Tingkat Pelaporan kepada Polisi

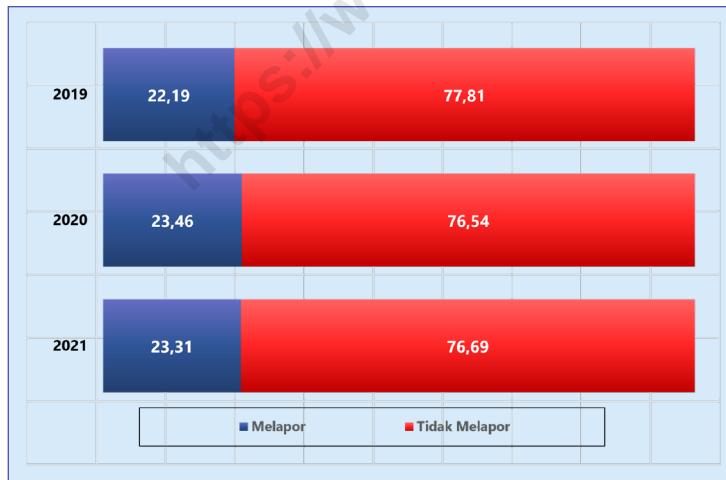
Pelaporan kepada polisi tidak harus dilakukan oleh orang yang menjadi korban. Berdasarkan KUHAP Pasal 108 ayat 1, setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak

pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan/ atau penyidik, baik lisan maupun tertulis.

Pelaporan atau pengaduan ini merupakan salah satu upaya agar hak atas rasa adil bisa diperoleh. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin, "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil."

Tingkat pelaporan kepada polisi digunakan untuk melihat akses kepada keadilan yang dicari dan dilakukan oleh korban kepada pihak yang berwenang. Jika pihak yang berwenang tidak menerima laporan atau diperintahkan mengenai terjadinya korban kejahatan, maka tindakan penyelidikan dan pengadilan tidak dapat dilakukan. Selain itu, indikator ini juga dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga penegak hukum dalam membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dialami.

◆ Gambar 3.8 Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi, 2019-2021

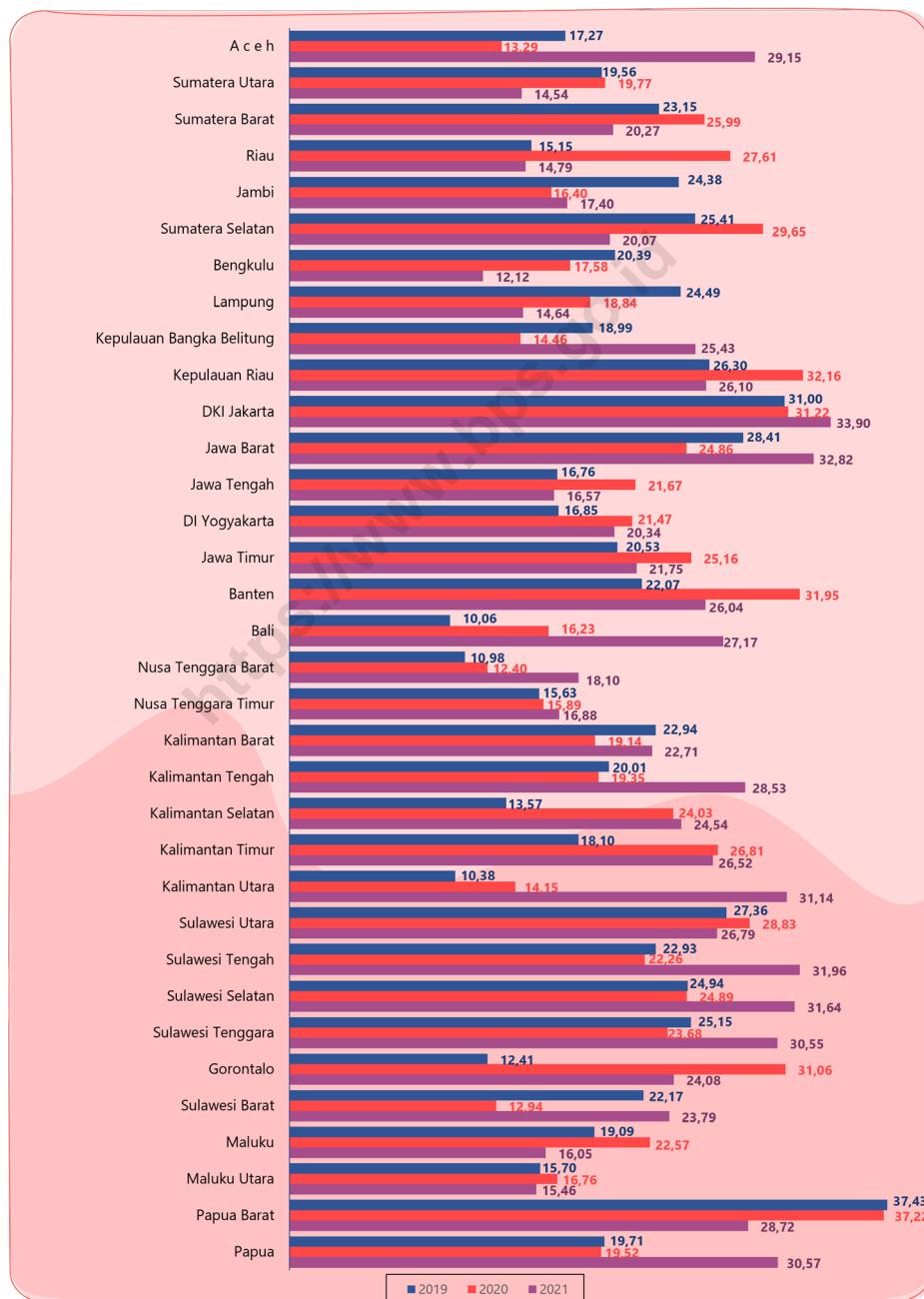


Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020-2022

Data Susenas menunjukkan tingkat pelaporan ke polisi (*police report rate*) setiap tahun masih relatif rendah. Pada periode 2019-2021, persentase penduduk Indonesia yang mengalami kejadian kejahatan kemudian melaporkannya ke polisi tidak lebih dari 25 persen (Gambar 3.8). Pada tahun 2019 persentasenya sebesar 22,19 persen, kemudian mengalami peningkatan menjadi 23,46 persen pada tahun 2020. Pada tahun 2021, persentase penduduk korban kejahatan yang melapor ke polisi sedikit mengalami penurunan menjadi 23,31 persen.

Pada periode 2020-2021, persentase penduduk korban kejahatan yang melaporkan ke polisi mengalami peningkatan di 17 provinsi (Gambar 3.9). Peningkatan terbesar berturut-turut terdapat pada Provinsi Kalimantan Utara (16,99 persen), Aceh (18,56 persen), dan Papua (11,05 persen).

◆ Gambar 3.9 Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi Berdasarkan Provinsi, 2019-2021



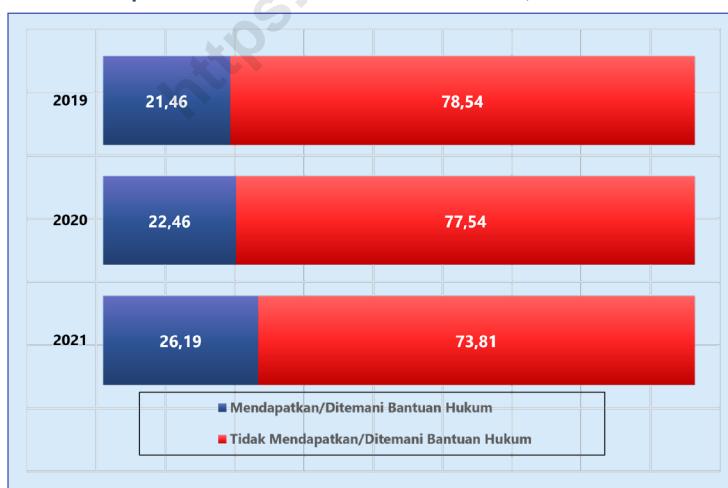
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020-2022

Dari tahun ke tahun, tingkat pelaporan masyarakat yang mengalami kejahatan masih tergolong rendah. Hal tersebut menyebabkan data registrasi polisi masih belum dapat menggambarkan keseluruhan kejadian yang dialami oleh masyarakat. Dengan kata lain, angka gelap kejahatan (*dark number of crimes*) masih relatif tinggi.

Hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal dan dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi.

Meskipun bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara, namun ketentuan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

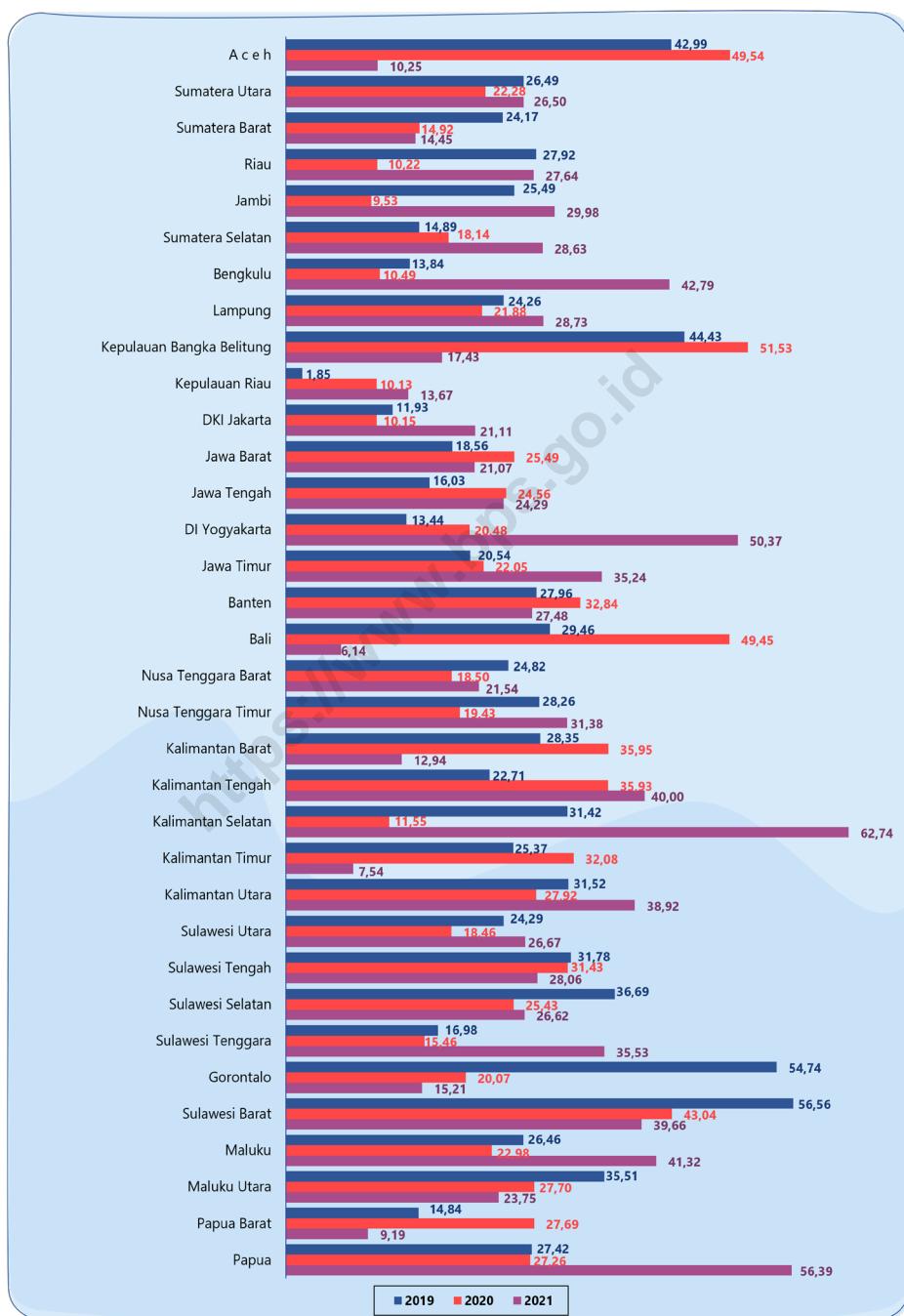
◆ Gambar 3.10 Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi dan Mendapatkan/Ditemani Bantuan Hukum, 2019-2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020-2022

Gambar 3.10 menunjukkan bahwa persentase penduduk korban kejahatan yang melaporkan ke polisi dan mendapatkan/ditemani bantuan hukum terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 persentasenya sebesar 22,46 persen, sedikit mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 21,46 persen. Persentase ini kembali meningkat menjadi 26,19 persen pada tahun 2021.

◆ Gambar 3.11 Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi dan Mendapatkan/Ditemani Bantuan Hukum Berdasarkan Provinsi, 2019-2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020-2022

Berdasarkan wilayah, persentase penduduk korban kejahatan yang melaporkan ke polisi dan mendapatkan/ditemani bantuan hukum mengalami peningkatan di 20 provinsi (Gambar 3.11). Peningkatan terbesar berturut-turut terdapat pada Provinsi Kalimantan Selatan (51,19 persen), Bengkulu (32,30), dan DI Yogyakarta (29,89 persen).

04 INDIKATOR SDGs TERKAIT KEAMANAN

16.1.3.(a)

0,03% penduduk menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir



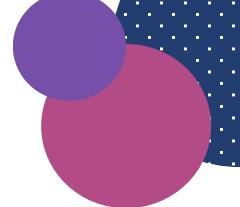
16.1.4*

62,80% rumah tangga merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya

16.5.2

18,32% pelaku usaha membayar melebihi ketentuan ketika mengakses layanan publik





https://www.bps.go.id

BAB IV

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Terkait Keamanan

Sebelum berakhirnya *Millenium Development Goals* (MDGs), dilakukan penyusunan agenda pembangunan pasca 2015 melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs), yang kemudian disepakati dalam Sidang Umum PBB pada September 2015. Dalam pertemuan tersebut, disepakati 17 Tujuan SDGs dan 169 Target yang merupakan rencana aksi global untuk tahun 2016 hingga 2030. SDGs ini berlaku universal untuk seluruh negara, sehingga seluruh negara memiliki kewajiban moral untuk mencapai tujuan dan target SDGs. Tujuan dan target SDGs menggambarkan visi dan ruang lingkup agenda pembangunan global yang inklusif dan multidimensi yang menjadi panduan bagi komunitas global selama 2016-2030 untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat global.

SDGs dibagi ke dalam empat pilar besar, salah satunya adalah pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Dalam pilar tersebut, terdapat Tujuan 16 SDGs (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh) yaitu mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua level. Tujuan 16 SDGs ini memuat beberapa indikator SDGs yang berkaitan dengan kondisi keamanan yang menjadi cakupan dalam publikasi ini. Adapun target pada tujuan 16 terkait dengan publikasi ini antara lain secara signifikan mengurangi segala macam bentuk kekerasan dan angka kematian terkait di mana pun, mendukung perangkat hukum di tingkat nasional dan internasional dan akses keadilan yang sama untuk semua, serta secara substansial mengurangi korupsi dan suap dalam segala bentuk.

Indikator (1)	Sumber Data (2)	Frekuensi Waktu Pengumpulan Data (3)
16.1.1.(a). Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Kepolisian Republik Indonesia	Tahunan
16.1.3.(a). Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	Tahunan

Indikator (1)	Sumber Data (2)	Frekuensi Waktu Pengumpulan Data (3)
16.1.4*. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Ketahanan Sosial	Tiga Tahunan
16.3.1.(a) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	Tahunan
16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK)	Tahunan
16.5.1. Proporsi Penduduk yang Memiliki Paling Tidak Satu Kontak Hubungan dengan Petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir	Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK)	Tahunan
16.5.2. Proporsi pelaku bisnis yang memiliki setidaknya satu kontak dengan pejabat publik dan yang membayar suap kepada pejabat publik, atau diminta untuk menerima suap oleh pejabat publik tersebut, selama 12 bulan terakhir	Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK)	Tahunan

4. 1 Target 16.1.1.(a). Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan pada Satu Tahun Terakhir

Merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku Kedua-Kejahatan, Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa yang mengakibatkan kematian, kasus kejahatan pembunuhan adalah kasus-kasus yang terjadi akibat kejahatan tindakan pembunuhan (Kementerian PPN/Bappenas, 2020). Jumlah kasus kejahatan pembunuhan yang diukur adalah kejahatan pembunuhan yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun terakhir atau 12 bulan terakhir. Indikator ini dipergunakan untuk mengukur kejahatan kekerasan yang paling ekstrem serta untuk mengindikasikan lemah dan kurangnya tingkat keamanan di masyarakat. Keamanan dari kekerasan adalah salah satu prasyarat bagi individu untuk merasakan hidup yang aman dan aktif. Selain itu, indikator ini juga menunjukkan risiko yang dihadapi masyarakat terhadap kematian akibat pembunuhan.

Dalam periode tahun 2017 hingga 2020, jumlah kasus kejahatan pembunuhan yang dicatat terus mengalami penurunan. Pada tahun 2017, terdapat 1.150 kejadian kejahatan pembunuhan; 1.024 kejadian di tahun 2018; 964 kejadian di tahun 2019; dan terus menurun menjadi 898 di tahun 2020. Akan tetapi, tren penurunan kasus kejahatan pembunuhan ini tidak terjadi di tahun 2021 karena terdapat kenaikan kasus kejahatan pembunuhan menjadi 927 kasus.

4.2 Target 16.1.3.(a). Proporsi Penduduk Yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir

Korban kejahatan kekerasan adalah seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan kekerasan. Adapun kejahatan kekerasan yang dimaksud adalah semua tindakan kejahatan kekerasan yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan KUHP yang mengenai diri pribadi seseorang, yakni pencurian dengan kekerasan (termasuk penodongan dan perampukan), penganiayaan, dan pelecehan seksual (termasuk perkosaan, pencabulan, dan sebagainya). Dalam konteks ini, cakupan kejahatan kekerasan yang dimaksud meliputi penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, dan pelecehan seksual.

Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan fisik orang lain baik menimbulkan penyakit (luka/cacat/sakit) atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari (luka berat) maupun tidak. Pemukulan, penamparan, penggeroyokan, termasuk kategori penganiayaan.

Pencurian dengan kekerasan adalah mengambil sesuatu barang atau ternak, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya dia dan kawannya yang turut melakukan kejahatan itu sempat melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya. Perampukan, penodongan, pemalakan, penjambretan, termasuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan.

Pelecehan seksual adalah perbuatan yang menyerang kehormatan keseksuaian (cubitan, colekan, tepukan, sentuhan di bagian tubuh tertentu atau gerakan) maupun perbuatan cabul yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh korban. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan kekerasan fisik, ancaman kekerasan, maupun tidak. Perkosaan (perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa korban untuk bersetubuh dengannya) termasuk kategori pelecehan seksual.

Indikator proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dihitung dari jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir dibagi dengan jumlah penduduk tahun tersebut kemudian dikali 100 persen. Pada periode 2017 hingga 2021, proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan terus mengalami penurunan, dari yang semula 0,09 persen di tahun 2017 kemudian terus menurun hingga mencapai 0,03 persen di tahun 2021. Tren penurunan ini dapat menjadi indikasi awal bahwa terdapat peningkatan keamanan masyarakat terhadap kejahatan kekerasan dari tahun ke tahun.

◆ Gambar 4.1 Proporsi Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir, 2017– 2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018-2022

4. 3 Target 16.1.4*. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya

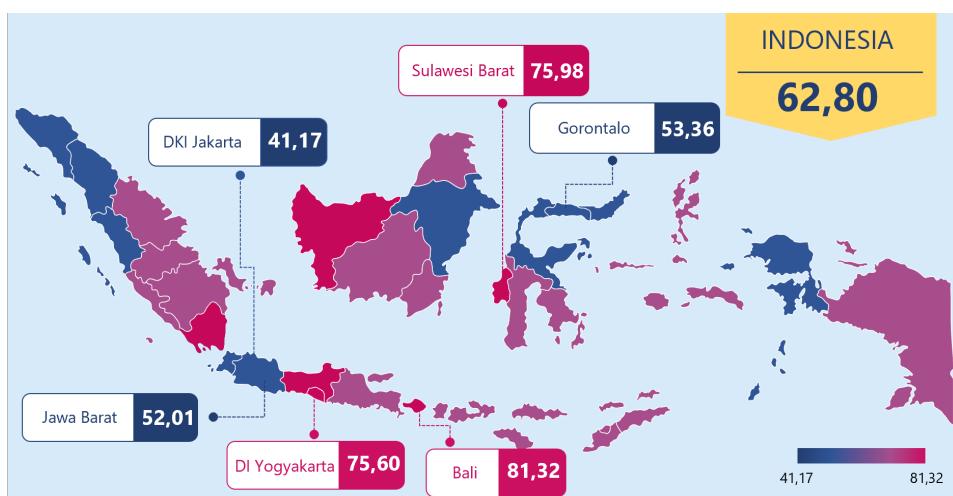
UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Rasa aman adalah kebutuhan dasar dan merupakan hak dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Kebutuhan akan rasa aman merupakan kebutuhan yang menempati posisi kedua dari hierarki Maslow. Kebutuhan rasa aman ini meliputi kebutuhan keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosi. Kebutuhan rasa aman dipenuhi untuk mendukung pemenuhan kebutuhan lain agar bisa terus berjalan dengan baik. Dalam *Universal Declaration of Human Rights* mencantumkan bahwa setiap orang mempunyai hak

untuk hidup dan hak akan kemerdekaan dan keamanan badan.

Proporsi rumah tangga yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya merupakan target 16.1.4* dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Indikator ini merupakan dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Rasa aman diukur dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Ketahanan Sosial yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tiga tahun.

Pada tahun 2020, persentase rumah tangga yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya sebesar 62,80 persen pada level nasional. Sehingga bisa dikatakan, lebih dari separuh masyarakat merasa tidak khawatir ketika berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Dilihat lebih rinci pada level provinsi, terdapat variasi dalam persentase rumah tangga yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya. Selama periode 2020, Provinsi Bali merupakan provinsi dengan persentase rumah tangga yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya terbesar (81,32 persen), diikuti oleh Provinsi Sulawesi Barat (75,98 persen), dan Provinsi DI Yogyakarta (75,60 persen). Provinsi dengan persentase rumah tangga yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya terkecil adalah Provinsi DKI Jakarta (41,17 persen), dikuti oleh Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Gorontalo dengan persentase masing-masing adalah 52,01 persen dan 53,36 persen.

◆ Gambar 4.2 Persentase Rumah Tangga yang Merasa Aman Berjalan Sendiri di Area Tempat Tinggalnya Menurut Provinsi, 2020



Sumber: Susenas Modul Ketahanan Sosial 2020

4.4 Target 16.3.1.(a). Proporsi Korban Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir yang Melaporkan kepada Polisi

Indikator ini bertujuan untuk melihat akses terhadap keadilan yang dicari dan dilakukan oleh korban kepada pihak berwenang. Jika pihak berwenang tidak menerima laporan atau diperingatkan terjadinya korban, maka pihak berwenang tidak dapat mengambil tindakan yang tepat untuk melakukan penyelidikan dan pengadilan. Selain itu, indikator ini juga digunakan untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga berwenang, baik polisi maupun lembaga penegak hukum lainnya untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukumnya. Peningkatan jumlah pelapor dan laporan menunjukkan bahwa kekerasan tidak dapat diterima dan harus dilaporkan. Peningkatan nilai indikator ini juga menunjukkan bahwa sistem pelaporan, kesadaran untuk melapor, serta kepercayaan kepada pihak berwenang telah meningkat.

Proporsi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi dihitung dari jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi dibagi dengan jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir dikalikan 100 persen. Selama periode 2017-2021, proporsi korban kejahatan kekerasan yang melaporkan kepada polisi cukup fluktuatif dan mencapai nilai tertinggi pada tahun 2020 (52,43 persen). Namun pada tahun 2021, nilai ini turun menjadi 46,71 persen. Penurunan ini bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti penurunan dari segi kesadaran dan kepercayaan masyarakat untuk melapor maupun penurunan sistem pelaporan di pihak berwenang.

◆ Gambar 4.3 Proporsi Korban Kekerasan dalam 12 bulan Terakhir yang Melaporkan kepada Polisi, 2017–2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018-2022

4. 5 Target 16.5.1.(a). Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan Survei Perilaku Anti Korupsi untuk mengukur Indeks Perilaku Anti Korupsi. Survei ini telah dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2022, kecuali tahun 2016. Pada tahun 2022, SPAK dilaksanakan di 34 provinsi dan 171 kabupaten/kota dengan level estimasi nasional.

Survei Perilaku Anti Korupsi bertujuan untuk mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku antikorupsi dengan menggunakan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Survei ini mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil (*petty corruption*) dan tidak mencakup korupsi skala besar (*grand corruption*). Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal perilaku penyuapan (*bribery*), gratifikasi (*graft/gratuities*), pemerasan (*extortion*), nepotisme (*nepotism*), dan sembilan nilai antikorupsi.

IPAK disusun dari dua dimensi, yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Dimensi Persepsi berupa penilaian/pendapat terhadap kebiasaan perilaku antikorupsi di masyarakat yang terdiri dari 3 subdimensi yaitu persepsi keluarga, persepsi komunitas, dan persepsi publik. Dimensi Pengalaman berupa pengalaman antikorupsi yang terjadi di masyarakat yang terdiri atas subdimensi pengalaman publik dan subdimensi pengalaman lainnya.

◆ Gambar 4.4 Perkembangan IPAK Tahun 2012 – 2022



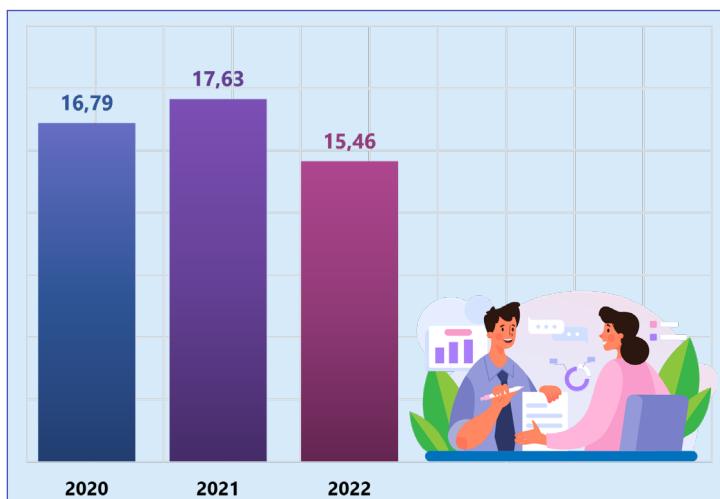
Sumber: Survei Perilaku Anti Korupsi

Nilai IPAK berada pada rentang 0 sampai 5. Nilai IPAK yang semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin antikorupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi. Pada periode 2012 sampai tahun 2022, IPAK cenderung mengalami fluktuasi (Gambar 4.4). IPAK 2022 sebesar 3,93 mengalami kenaikan sebesar 0,05 poin dibandingkan IPAK 2021 (3,88).

4. 6 Target 16.5.1. Proporsi Penduduk yang Memiliki Paling Tidak Satu Kontak Hubungan dengan Petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir

Selama periode 2020-2022, persentase masyarakat yang mengeluarkan uang/barang/fasilitas melebihi ketentuan ketika berurusan dengan layanan publik cukup fluktuatif. Persentase ini sempat mengalami kenaikan, dari yang semula berkisar 16,79 persen di tahun 2020 menjadi 17,63 persen di tahun 2021. Meskipun demikian, nilai ini mengalami penurunan sebesar 2,17 persen menjadi 15,46 persen. Penurunan ini menunjukkan bahwa masyarakat menunjukkan sikap yang semakin anti terhadap perilaku korupsi, terutama dalam hal penyuapan (*bribery*). Peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam penurunan persentase masyarakat yang membayar suap kepada petugas layanan publik.

◆ Gambar 4.5 Persentase Masyarakat yang pernah Berurusan dengan Layanan Publik dan Mengeluarkan Uang/Barang/Fasilitas Melebihi Ketentuan, 2020-2022

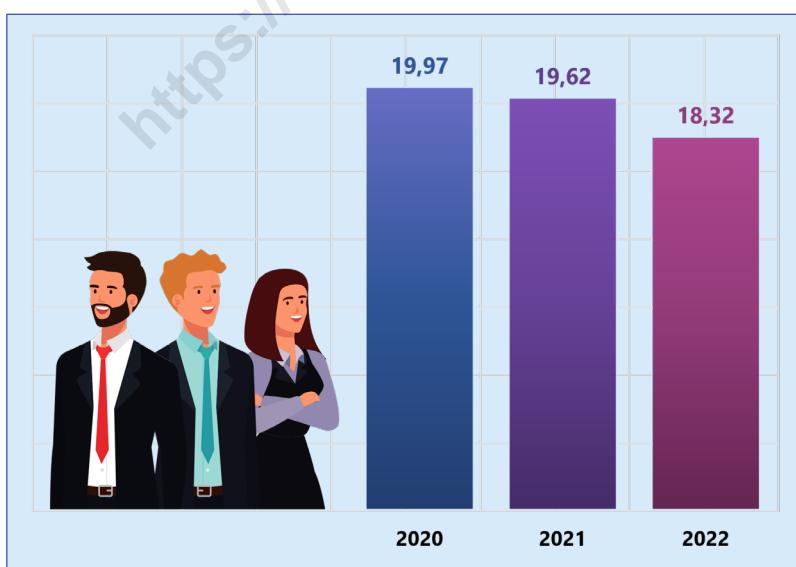


Sumber: Survei Perilaku Anti Korupsi 2020-2022

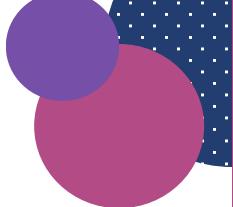
4.7 Target 16.5.2. Proporsi Pelaku Usaha yang Memiliki Setidaknya Satu Kontak Dengan Pejabat Publik dan yang Membayar Suap kepada Pejabat Publik, atau Diminta untuk Menerima Suap oleh Pejabat Publik Tersebut, Selama 12 Bulan Terakhir

Pelaku usaha juga merupakan salah satu aktor yang berpotensi terlibat dalam praktik penyuapan kepada petugas pelayanan publik atau diminta untuk melakukan suap oleh petugas. Persentase pelaku usaha yang membayar melebihi ketentuan ketika berurusan dengan layanan publik menunjukkan tren yang terus menurun dari 2020 hingga 2022 (Gambar 4.6). Pada tahun 2022, terdapat 18,32 persen pelaku usaha yang membayar melebihi ketentuan kepada petugas layanan publik, baik ketika mengakses layanan sendiri maupun melalui perantara. Nilai ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 (19,62 persen) dan 2020 (19,97 persen). Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha semakin anti terhadap perilaku korupsi, dalam hal ini adalah penyuapan (*bribery*). Fenomena ini diduga dipengaruhi oleh peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah.

◆ Gambar 4.6 Persentase Pelaku Usaha yang pernah Berurusan dengan Layanan Publik dan Mengeluarkan Uang/Barang/Fasilitas Melebihi Ketentuan, 2020-2022



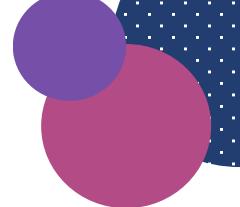
Sumber: Survei Perilaku Anti Korupsi 2020-2022



https://www.bps.go.id

DAFTAR PUSTAKA





https://www.bps.go.id

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2014). *Statistik Potensi Desa Indonesia 2014*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Statistik Potensi Desa Indonesia 2018*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Potensi Desa Indonesia 2021*. Jakarta: BPS.
- Gamayanti, Rosa dan Soni Akhmad Nulhaqim. (2019). Konflik antara PLTU Indramayu II dengan Warga Mekarsari Dilihat dari Teori Kebutuhan Manusia Simon Fisher. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1 (1).
- Hatta, Mohammad. (2008). *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekta*. Yogyakarta: Gallang Press.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola*. Jakarta: Bappenas.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2013). Bandung: Citra Umbara.
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes POLRI). (2018). *Analisa dan Evaluasi Situasi Kamtibmas Tahun 2017*. Jakarta: Mabes POLRI.
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes POLRI). (2019). *Analisa dan Evaluasi Situasi Kamtibmas Tahun 2018*. Jakarta: Mabes POLRI.
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes POLRI). (2020). *Analisa dan Evaluasi Situasi Kamtibmas Tahun 2019*. Jakarta: Mabes POLRI.
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes POLRI). (2021). *Analisa dan Evaluasi Situasi Kamtibmas Tahun 2020*. Jakarta: Mabes POLRI.
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes POLRI). (2022). *Analisa dan Evaluasi Situasi Kamtibmas Tahun 2021*. Jakarta: Mabes POLRI.
- Maslow, A.H. (1943). *A Theory of Human Motivation*. New York: Psychological Review.
- Mulia, Aryago. dkk. (2007). *Manual Pengolahan Data Entry Program CSPRO 3.3*. Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Savitz. (1978). *Official Police Statistics and Their Limitations*. In L.D. Savitz & N. Johnson (Eds.), *Crime and Society* (pp. 69-81). New York: John Wiley.

Soekanto. (2005), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press.

Soetopo, H. (2001). *Manajemen Konflik*. Malang: Universitas Negeri Malang.

The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Tahun 1966 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

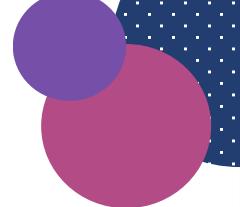
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC). (2015). *International Classification Of Crimes For Statistical Purposes*. Version 1.0.

CATATAN TEKNIS





https://www.bps.go.id

Catatan Teknis

Jenis dan Sumber Data

Publikasi ini menggunakan tiga sumber data yang berbeda, yaitu:

1. Data karakteristik kejadian dan pelaku kejahatan yang bersumber dari Laporan dan Evaluasi Situasi Kamtibmas yang diterbitkan oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) Tahun 2019, 2020, dan 2021;
2. Data korban kejahatan yang bersumber dari Susenas Tahun 2020, 2021, dan 2022; dan
3. Data jumlah desa menurut kejadian kejahatan, kejadian konflik massal dan karakteristiknya, serta upaya dalam menjaga keamanan, bersumber dari Pendataan Potensi Desa (Podes) 2014, 2018, dan 2021.

Laporan Evaluasi Data Kriminalitas Polri

Laporan Evaluasi Data Kriminalitas Polri merupakan laporan tahunan Mabes Polri yang menyajikan gambaran mengenai situasi keamanan dan ketertiban masyarakat pada level nasional dan provinsi. Laporan yang disajikan meliputi aspek kejahatan/kriminalitas dan bukan kejahatan. Data kriminalitas yang disajikan meliputi karakteristik kejadian kejahatan, pelaku, dan jumlah kerugian.

Data kriminalitas ini hanya mencakup seluruh peristiwa atau kejadian kriminalitas yang dilaporkan oleh masyarakat, atau aksi kriminalitas yang pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Mengingat masih tingginya keengganan masyarakat untuk melapor, diduga data yang dihasilkan cenderung "*underestimate*". Artinya, kejadian kriminalitas yang sesungguhnya diduga lebih besar dari yang dilaporkan. Dengan kata lain, angka gelap (*dark number*) kejahatan masih relatif besar.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2020-2022

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merupakan survei yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) secara berkala setiap tahun. Data Susenas mencakup dua kelompok data, yaitu Kor dan Modul. Data Kor mencakup data pokok dari beberapa aspek kesejahteraan rakyat, termasuk kriminalitas. Data

kriminalitas yang dikumpulkan adalah data jumlah dan karakteristik rumah tangga/individu yang menjadi korban kejahatan. Jumlah sampel Kor Susenas adalah sebanyak 300.000 rumah tangga, sehingga bisa dilakukan estimasi hingga level kabupaten/kota.

Data yang dikumpulkan dalam Modul Susenas hanya terfokus pada salah satu aspek kesejahteraan rakyat. Namun demikian, cakupannya lebih lengkap dan lebih rinci dibandingkan dengan data serupa yang dicakup dalam Kor. Modul Susenas umumnya diberi nama sesuai dengan aspek yang menjadi fokusnya, misalnya Modul Kesehatan, Modul Pendidikan, dan Modul Ketahanan Sosial. Data Modul Susenas dikumpulkan setiap tahun dan untuk modul yang sama akan berulang setiap tiga tahun sekali. Jumlah sampel Modul Susenas adalah sebanyak 75.000 rumah tangga, sehingga hanya dimungkinkan untuk menghasilkan estimasi hingga wilayah provinsi.

Sejak pertama kali kegiatan Susenas diselenggarakan tahun 1963, Susenas telah memiliki modul kriminalitas. Modul ini mencakup data-data kriminal secara lengkap dan rinci dengan pendekatan korban rumah tangga/individu. Data yang dikumpulkan antara lain, meliputi data jenis dan frekuensi kejahatan, pelaku kejahatan, akibat yang ditimbulkan secara fisik maupun psikis, serta kerugian yang diderita. Namun, karena beberapa hal, modul kriminalitas sejak tahun 1995 tidak dilakukan lagi.

Pada 2015, demi penyempurnaan alat ukur dan agar survei korban bisa semakin akurat dalam menangkap pengalaman individu, dilakukan perubahan dalam instrumen kor Susenas. Sebelumnya hanya terdapat empat jenis kejahatan yang terdapat di Susenas kor yakni pencurian, pencurian dengan kekerasan, penipuan, dan lainnya. Sementara pada 2015, BPS melakukan perluasan cakupan instrumen menjadi lima jenis kejahatan yakni pencurian, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, pelecehan seksual, dan lainnya.

Perubahan ini menjadikan data Susenas bisa menangkap lebih banyak pengalaman korban kejahatan. Namun, implikasinya pengguna data tidak bisa serta merta melakukan perbandingan antara data hasil Susenas 2015 dengan data tahun-tahun sebelumnya, khususnya pada jumlah kejahatan berdasarkan jenisnya. Data Susenas 2020 menggambarkan pengalaman responden pada kurun waktu 1 Januari sampai 31 Desember 2019, Susenas 2021 menggambarkan pengalaman responden pada kurun waktu 1 Januari sampai 31 Desember 2020, dan Susenas 2022 menggambarkan pengalaman responden pada kurun waktu 1 Januari sampai 31 Desember 2021.

Statistik Podes (Potensi Desa) 2014, 2018, dan 2021

Data Statistik Potensi Desa (Podes) merupakan satu-satunya data kewilayahan yang dikumpulkan BPS. Pendataan Podes dilakukan di seluruh desa/kelurahan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk desa persiapan, desa definitif, Satuan Pemukiman Transmigrasi (SPT), Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), dan Satuan Pemukiman Masyarakat Terasing (SPMT). Responden untuk pendataan Podes adalah Kepala Desa/Lurah atau aparat desa/kelurahan lainnya dan narasumber lainnya, seperti petugas kesehatan yang bertugas di desa/kelurahan (dokter puskesmas/bidan desa), guru/kepala sekolah, Petugas Penyuluhan Pertanian (PPL), dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Salah satu fungsi pendataan Podes adalah menyajikan data atau informasi tentang desa/kelurahan untuk memenuhi keperluan perencanaan kegiatan sensus. Data atau informasi tersebut antara lain adalah tentang luas wilayah, jumlah RW, jumlah RT, dan satuan lingkungan setempat (SLS) yang merupakan bagian wilayah desa/kelurahan beserta batas-batas wilayahnya, keadaan geografis, keadaan topografis, jumlah dan struktur penduduk, dan struktur perekonomian. Sejalan dengan fungsinya tersebut, pelaksanaan pendataan Podes biasanya dilakukan menjelang penyelenggaraan suatu sensus.

Data yang dikumpulkan dalam Podes juga mencakup data tentang jenis dan jumlah fasilitas umum yang ada di desa/kelurahan, baik fasilitas sosial seperti posyandu, puskesmas, sekolah, mesjid, gereja, dan tempat ibadah lainnya, maupun fasilitas ekonomi seperti pasar, pertokoan, supermarket, KUD, sarana transportasi, bank, dan lembaga keuangan/perkreditan lainnya. Pendataan Podes juga mencakup pengumpulan data tentang jenis dan jumlah kejadian-kejadian penting yang sedang atau pernah terjadi di desa, seperti jenis dan jumlah bencana alam, wabah penyakit, kejadian kejahatan, dan konflik massal, baik antarwarga desa maupun antardesa.

Konsep dan Definisi

Konsep dan definisi dari berbagai variabel atau karakteristik yang digunakan dalam publikasi ini merujuk pada konsep dan definisi serta terminologi yang digunakan oleh sumber data yang bersangkutan. Sejalan dengan itu, penjelasan mengenai konsep dan definisi pada bagian ini akan diuraikan sesuai dengan urutan sumber data.

Konsep-Konsep Kriminalitas dalam Polri

A. Peristiwa Kejahatan (Kriminalitas)/Pelanggaran

1. Tindak kejahatan/kriminalitas atau pelanggaran merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.
2. Peristiwa yang dilaporkan adalah setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Polri, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindak-lanjuti oleh Polri jika dikategorikan memiliki cukup bukti.
3. Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian, adalah:
 - Peristiwa yang berkas perkaryanya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa;
 - Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang;
 - Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *Plichmatigheid* (setiap tindakan polisi sudah dianggap sah berdasarkan atau bersumber kepada kekuasaan atau kewenangan umum);
 - Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian;
 - Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia; dan
 - Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

B. Pelaku Kejahatan

Pelaku kejahatan adalah:

- Orang yang melakukan kejahatan
- Orang yang turut melakukan kejahatan
- Orang yang menyuruh melakukan kejahatan
- Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan
- Orang yang membantu untuk melakukan kejahatan

C. Tahanan

Tahanan adalah tersangka pelaku tindak kejahatan/pelanggaran yang ditahan oleh pihak kepolisian sebelum diteruskan kepada Kejaksaan atau masih dalam proses pengusutan lebih lanjut. Lamanya ditahan kurang dari 20 hari.

D. Kerugian

Kerugian adalah hilang, rusak, atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat dari suatu peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

E. Korban

Korban kejahatan adalah seseorang atau harta bendanya yang mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan.

Konsep-Konsep Kejahatan dalam Susenas dan Podes

A. Kejahatan

Konsep dan definisi kejahatan yang digunakan dalam Susenas dan Podes pada dasarnya merujuk pada konsep kejahatan yang digunakan oleh Polri maupun KUHP. Namun, karena konsep ini ditanyakan pada responden yang umumnya awam tentang hukum, pengertian tentang konsep kejahatan ini lebih didasarkan pada pengakuan, pemahaman, dan persepsi responden tanpa melihat lagi aspek hukumnya. Sejalan dengan itu, jenis-jenis tindak kejahatan yang dicakup Susenas atau Podes lebih fokus pada jenis kejahatan yang dikenal masyarakat, misalnya perampokan untuk menggantikan konsep pencurian dengan kekerasan yang biasa digunakan Polri.

B. Korban Kejahatan

Konsep korban kejahatan dalam Susenas adalah korban/sasaran dari tindak kejahatan yang terjadi dalam rentang waktu selama setahun yang lalu. Korban kejahatan dalam Susenas dikelompokkan menjadi dua klasifikasi, yaitu rumah tangga dan individu. Penentuan kriteria korban kejahatan ini hanya berdasarkan pada pengakuan responden tanpa melihat lagi aspek hukumnya.

Klasifikasi korban kejahatan menurut umur:

- Anak-anak adalah orang yang berumur kurang dari 18 tahun
- Dewasa adalah orang yang berumur 18 tahun dan lebih

C. Konflik Massal

Konsep konflik massal yang digunakan dalam Podes merujuk pada konflik fisik berupa perkelahian massal yang terjadi dalam satu wilayah desa/kelurahan yang meliputi:

- Perkelahian antarkelompok warga adalah perkelahian antara kelompok warga dengan kelompok warga yang lain dalam satu desa/kelurahan/nagari;
- Perkelahian warga antar desa/kelurahan adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan warga desa/kelurahan/nagari lainnya;
- Perkelahian warga dengan aparat keamanan adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan aparat keamanan;
- Perkelahian warga dengan aparat pemerintah adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan aparat pemerintah;

- Perkelahian antar pelajar/mahasiswa adalah perkelahian antar pelajar suatu sekolah dengan pelajar sekolah lain;
- Perkelahian antar suku/etnis adalah perkelahian antar suku/etnis yang terjadi di desa/kelurahan/nagari; dan
- Lainnya: perkelahian antar warga dengan pelajar/mahasiswa, perkelahian antar agama, perkelahian antar aparat keamanan, dan sebagainya.

Penjelasan Teknis

1. Angka Indeks Kejahatan/Crime Index (I_t)

$$I_t = \frac{\text{Jumlah Peristiwa Kejahatan pada Tahun } t}{\text{Jumlah Peristiwa Kejahatan pada Tahun } t_0} \times 100$$

di mana

$$\begin{aligned} t_0 &= \text{tahun dasar} \\ t &= \text{tahun } t \end{aligned}$$

2. Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk/Crime Rate

$$\text{Crime Rate} = \frac{\text{Jumlah Peristiwa Kejahatan pada Tahun } t}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100.000$$

3. Selang Waktu Kejahatan Tahun t /Crime Clock

$$\text{Crime Clock} = \frac{365 \times 24 \times 60 \times 60}{\text{Jumlah Peristiwa Kejahatan pada Tahun } t} \times (\text{detik})$$

4. Persentase Penyelesaian Peristiwa Kejahatan/Crime Clearence

$$\text{Crime Clearence} = \frac{\text{Jumlah Peristiwa Kejahatan yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Peristiwa Kejahatan yang Dilaporkan}} \times 100$$

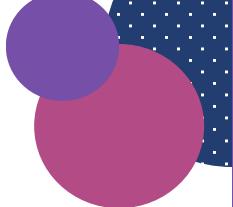
Penjelasan Tanda/Simbol

Pada publikasi ini, terdapat beberapa tanda/simbol yang digunakan. Berikut adalah penjelasan terkait penggunaan simbol-simbol tersebut:

- Tidak ada atau nol : -
 Angka diperbaiki : r
 Catatan : *)

LAMPIRAN





https://www.bps.go.id

DATA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA



Tabel 2.1.1 Indikator Kriminalitas Nasional, 2019-2021

Jenis Indikator (1)	Tahun		
	2019 (2)	2020 (3)	2021 (4)
Jumlah Kejahatan (<i>Crime Total</i>)	269 324	247 218	239 481
Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan (<i>Crime Cleared</i>)	183 605	176 726	172 065
Persentase Penyelesaian Kejahatan (<i>Clearence Rate</i>)	68,17	71,49 ^r	71,85
Selang Waktu Terjadinya Kejahatan (<i>Crime Clock</i>)	0 01'57"	0 02'07"	0 02'11"
Risiko Penduduk Terkena Kejahatan (<i>Crime Rate</i>)	103	94	90

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan:

Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3 (Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan)

Tabel 2.1.2 Peringkat Polda Menurut Jumlah Kejahatan dan Risiko Penduduk Terkena Kejahatan, 2021

No.	Polda	Jumlah Kejahatan	No.	Polda	Risiko Penduduk Terkena Kejahatan
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1	Sumatera Utara	36 534	1	Papua Barat	289
2	Metro Jaya	29 103	2	Metro Jaya	277
3	Jawa Timur	19 257	3	Sumatera Utara	250
4	Sulawesi Selatan	14 636	4	Sulawesi Utara	249
5	Sumatera Selatan	13 037	5	Gorontalo	208
6	Lampung	9 764	6	Papua	186
7	Jawa Tengah	8 909	7	Maluku	177
8	Riau	7 512	8	Bengkulu	177
9	Jawa Barat	7 502	9	Sulawesi Tengah	169
10	A c e h	6 651	10	Sulawesi Selatan	166
11	Nusa Tenggara Barat	6 296	11	Sumatera Selatan	153
12	Papua	6 236	12	Kalimantan Utara	140
13	Sulawesi Utara	6 215	13	Kalimantan Timur	126
14	Sumatera Barat	5 666	14	A c e h	125
15	Sulawesi Tengah	5 139	15	DI Yogyakarta	123
16	Kalimantan Selatan	4 973	16	Nusa Tenggara Barat	122
17	Nusa Tenggara Timur	4 909	17	Kalimantan Selatan	118
18	DI Yogyakarta	4 774	18	Lampung	115
19	Kalimantan Timur	4 564	19	Kepulauan Riau	111
20	Kalimantan Barat	4 048	20	Sulawesi Barat	110
21	Jambi	3 701	21	Riau	110
22	Bengkulu	3 493	22	Kep. Bangka Belitung	108
23	Banten	3 434	23	Jambi	104
24	Maluku	3 139	24	Sumatera Barat	103
25	Papua Barat	2 784	25	Sulawesi Tenggara	91
26	Kepulauan Riau	2 481	26	Kalimantan Tengah	91
27	Gorontalo	2 445	27	Nusa Tenggara Timur	90
28	Sulawesi Tenggara	2 431	28	Maluku Utara	82
29	Bali	2 404	29	Kalimantan Barat	80
30	Kalimantan Tengah	2 399	30	Bali	55
31	Kep. Bangka Belitung	1 566	31	Jawa Timur	48
32	Sulawesi Barat	1 500	32	Banten	27
33	Maluku Utara	1 008	33	Jawa Tengah	26
34	Kalimantan Utara	971	34	Jawa Barat	15
INDONESIA		239 481	INDONESIA		90

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Tabel 2.1.3 Jumlah Kejahatan Menurut Kepolisian Daerah, 2019-2021

Kepolisian Daerah (1)	Tahun		
	2019 (2)	2020 (3)	2021 (4)
A c e h	7 483	7 745	6 651
Sumatera Utara	30 831	32 990	36 534
Sumatera Barat	11 064	7 992	5 666
Riau	6 570	8 194	7 512
Jambi	6 848	4 709	3 701
Sumatera Selatan	12 861	12 189	13 037
Bengkulu	3 453	3 333	3 493
Lampung	8 534	7 594	9 764
Kep Bangka Belitung	1 953	1 931	1 566
Kepulauan Riau	3 159	2 843	2 481
Metro Jaya	31 934	26 585	29 103
Jawa Barat	13 145	11 256	7 502
Jawa Tengah	10 317	10 712	8 909
DI Yogyakarta	6 650	7 721	4 774
Jawa Timur	26 985	17 642	19 257
Banten	3 287	4 250	3 434
Bali	3 047	2 597	2 404
Nusa Tenggara Barat	8 185	8 591	6 296
Nusa Tenggara Timur	5 865	4 790	4 909
Kalimantan Barat	4 721	3 858	4 048
Kalimantan Tengah	2 444	2 629	2 399
Kalimantan Selatan	5 375	5 206	4 973
Kalimantan Timur	4 417	3 609	4 564
Kalimantan Utara	876	1015	971
Sulawesi Utara	7 425	6 274	6 215
Sulawesi Tengah	6 265	5 454	5 139
Sulawesi Selatan	16 008	12 815	14 636
Sulawesi Tenggara	1 213	2 148	2 431
Gorontalo	2 367	2 518	2 445
Sulawesi Barat	1 863	1 704	1 500
Maluku	3 495	5 350	3 139
Maluku Utara	718	850	1 008
Papua Barat	2 972	3 162	2 784
Papua	6 994	6 962	6 236
INDONESIA	269 324	247 218	239 481

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

**Tabel 2.1.4 Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan Menurut Kepolisian Daerah, 2019-
2021**

Kepolisian Daerah	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	2 648	2 936	3 790
Sumatera Utara	23 094	22 665	24 978
Sumatera Barat	5 996	6 708	8 139
Riau	2 938	3 122	5 810
Jambi	4 711	4 028	2 931
Sumatera Selatan	8 902	9 356	9 647
Bengkulu	2 332	2 278	1 635
Lampung	6 438	4 873	6 280
Kep Bangka Belitung	1 066	1 303	1 084
Kepulauan Riau	2 000	1 900	1 630
Metro Jaya	31 836	31 225	28 518
Jawa Barat	10 995	9 931	5 481
Jawa Tengah	6 668	3 894	6 306
DI Yogyakarta	4 506	7 383	6 605
Jawa Timur	12 057	9 305	10 659
Banten	2 071	3 106	2 613
Bali	2 537	2 344	2 036
Nusa Tenggara Barat	4 011	4 233	3 756
Nusa Tenggara Timur	3 209	2 360	1 623
Kalimantan Barat	4 216	3 933	3 702
Kalimantan Tengah	2 131	2 074	1 967
Kalimantan Selatan	4 371	4 284	3 907
Kalimantan Timur	3 724	3 224	2 893
Kalimantan Utara	739	827	842
Sulawesi Utara	4 717	4 860	3 607
Sulawesi Tengah	4 095	3 740	2 744
Sulawesi Selatan	11 451	10 632	9 405
Sulawesi Tenggara	418	567	1 493
Gorontalo	1 718	1 781	1 335
Sulawesi Barat	1 137	1 082	1 127
Maluku	1 538	1 421	1 372
Maluku Utara	437	470	589
Papua Barat	1 314	1 005	914
Papua	3 584	3 876	2 647
INDONESIA	183 605	176 726	172 065

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

**Tabel 2.1.5 Persentase Penyelesaian Kejahatan Menurut Kepolisian Daerah, 2019-
2021**

Kepolisian Daerah	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	35,39	37,91	56,98
Sumatera Utara	74,91	68,70	68,37
Sumatera Barat	54,19	83,93	100,00
Riau	44,72	38,10	77,34
Jambi	68,79	85,54	79,19
Sumatera Selatan	69,22	76,76	74,00
Bengkulu	67,54	68,35	46,81
Lampung	75,44	64,17	64,32
Kep. Bangka Belitung	54,58	67,48	69,22
Kepulauan Riau	63,31	66,83	65,70
Metro Jaya	99,69	100,00	97,99
Jawa Barat	83,64	88,23	73,06
Jawa Tengah	64,63	36,35	70,78
DI Yogyakarta	67,76	95,62	100,00
Jawa Timur	44,68	52,74	55,35
Banten	63,01	73,08	76,09
Bali	83,26	90,26	84,69
Nusa Tenggara Barat	49,00	49,27	59,66
Nusa Tenggara Timur	54,71	49,27	33,06
Kalimantan Barat	89,30	100,00	91,45
Kalimantan Tengah	87,19	78,89	81,99
Kalimantan Selatan	81,32	82,29	78,56
Kalimantan Timur	84,31	89,33	63,39
Kalimantan Utara	84,36	81,48	86,71
Sulawesi Utara	63,53	77,46	58,04
Sulawesi Tengah	65,36	68,57	53,40
Sulawesi Selatan	71,53	82,97	64,26
Sulawesi Tenggara	34,46	26,40	61,42
Gorontalo	72,58	70,73	54,60
Sulawesi Barat	61,03	63,50	75,13
Maluku	44,01	26,56	43,71
Maluku Utara	60,86	55,29	58,43
Papua Barat	44,21	31,78	32,83
Papua	51,24	55,67	42,45
INDONESIA	68,17	71,49	71,85

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Tabel 2.1.6 Selang Waktu Terjadinya Kejahatan Menurut Kepolisian Daerah, 2019-2021

Kepolisian Daerah	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	01.10'14"	01.07'51"	01.19'01"
Sumatera Utara	00.17'02"	00.15'55"	00.14'23"
Sumatera Barat	00.47'30"	01.05'45"	01.32'45"
Riau	01.20'00"	01.04'08"	01.09'58"
Jambi	01.16'45"	01.51'36"	02.22'00"
Sumatera Selatan	00.40'52"	00.43'07"	00.40'18"
Bengkulu	02.32'12"	02.37'41"	02.30'28"
Lampung	01.01.35"	01.09'12"	00.53'49"
Kep. Bangka Belitung	04.29'07"	04.32'11"	05.35'37"
Kepulauan Riau	02.46'22"	03.04'52"	03.31'51"
Metro Jaya	00.16'27"	00.19'46"	00.18'03"
Jawa Barat	00.39'59"	00.46'41"	01.10'03"
Jawa Tengah	00.50'56"	00.49'03"	00.58'59"
DI Yogyakarta	01.19'02"	01.08'04"	01.50'05"
Jawa Timur	00.19'28"	00.29'47"	00.27'17"
Banten	02.39'54"	02.03'40"	02.33'03"
Bali	02.52'29"	03.22'23"	03.38'38"
Nusa Tenggara Barat	01.04'12"	01.01'10"	01.23'28"
Nusa Tenggara Timur	01.29'36"	01.49'43"	01.47'04"
Kalimantan Barat	01.51'19"	02.16'14"	02.09'50"
Kalimantan Tengah	03.35'03"	03.19'55"	03.39'05"
Kalimantan Selatan	01.37'47"	01.40'57"	01.45'41"
Kalimantan Timur	01.58'59"	02.25'38"	01.55'09"
Kalimantan Utara	10.00'00"	22.07'16"	09.01'17"
Sulawesi Utara	01.10'47"	01.23'46"	01.24'34"
Sulawesi Tengah	01.23'53"	01.36'22"	01.42'16"
Sulawesi Selatan	00.32'50"	00.41'00"	00.35'54"
Sulawesi Tenggara	07.13'18"	04.04'41"	03.36'12"
Gorontalo	03.42'03"	03.28'44"	03.34'58"
Sulawesi Barat	04.42'07"	05.08'27°	05.50'24"
Maluku	02.30'23"	01.38'14"	02.47'26"
Maluku Utara	12.12'02"	10.24'13"	08.41'25"
Papua Barat	02.56'51"	02.46'13"	03.08'47"
Papua	01.15'09"	01.15'29"	01.24'17"
INDONESIA	00.01'57"	00.02'07"	00.02'11"

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Tabel 2.1.7 Risiko Penduduk Terkena Kejahanan per 100.000 Penduduk Menurut Kepolisian Daerah, 2019-2021

Kepolisian Daerah	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	144	149	125
Sumatera Utara	216	231	250
Sumatera Barat	208	150	103
Riau	99	123	110
Jambi	195	134	104
Sumatera Selatan	156	147	153
Bengkulu	179	172	177
Lampung	103	92	115
Kep. Bangka Belitung	136	133	108
Kepulauan Riau	152	127	111
Metro Jaya	127	105	277
Jawa Barat	34	29	15
Jawa Tengah	30	31	26
DI Yogyakarta	177	200	123
Jawa Timur	69	44	48
Banten	49	63	27
Bali	72	60	55
Nusa Tenggara Barat	165	167	122
Nusa Tenggara Timur	111	88	90
Kalimantan Barat	96	76	80
Kalimantan Tengah	94	62	91
Kalimantan Selatan	130	196	118
Kalimantan Timur	124	100	126
Kalimantan Utara	127	146	140
Sulawesi Utara	302	252	249
Sulawesi Tengah	211	179	169
Sulawesi Selatan	190	145	166
Sulawesi Tenggara	47	81	91
Gorontalo	203	214	208
Sulawesi Barat	148	125	110
Maluku	200	303	177
Maluku Utara	59	69	82
Papua Barat	325	328	289
Papua	214	208	186
INDONESIA	103	94	90

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Tabel 2.1.8 Jumlah Kejahatan Menurut Kelompok Jenis Kejahatan, 2019-2021

Kelompok/Jenis Kejahatan	Tahun		
	2019 (1)	2020 (2)	2021 (3)
Kejahatan terhadap Nyawa			
Pembunuhan	964	898	927
Kejahatan terhadap Fisik/Badan			
Penganiayaan Berat	10 323	8 373	8 445
Penganiayaan Ringan	20 431	20 195	12 211
Kekerasan dalam Rumah Tangga	8 229	8 104	7 435
Kejahatan terhadap Kesusastraan			
Perkosaan	1 172	1 336	1 164
Pencabulan	4 061	5 536	4 741
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang			
Penculikan	189	254	206
Memperkerjakan Anak Dibawah Umur	2 114	1 716	1 449
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan			
Pencurian dengan Kekerasan	6 421	5 647	4 548
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api	143	151	108
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam	757	740	182
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang			
Pencurian	22 271	23 984	23 308
Pencurian dengan Pemberatan	26 931	25 686	23 422
Pencurian Kendaraan Bermotor	23 476	18 557	18 005
Pengrusakan/Penghancuran Barang	4 342	3 720	3 515
Pembakaran dengan Sengaja	715	518	478
Penadahan	595	799	619
Kejahatan Terkait Narkotika			
Narkotika dan Psikotropika	36 478	36 611	36 954
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			
Penipuan/Perbuatan Curang	22 220	21 175	20 523
Penggelapan	16 612	15 546	14 206
Korupsi	488	376	364
Kejahatan terhadap Ketertiban Umum			
Terhadap Ketertiban Umum	2 964	3 662	2 532

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Tabel 2.1.9 Jumlah Kejahatan Menurut Kelompok/Jenis Kejahatan dan Bulan, 2021

Kelompok/Jenis Kejahatan	Bulan		
	Januari (2)	Februari (3)	Maret (4)
(1)			
Kejahatan terhadap Nyawa			
Pembunuhan	79	74	81
Kejahatan terhadap Fisik/Badan			
Penganiayaan Berat	636	679	654
Penganiayaan Ringan	1 250	1 050	1 332
Kekerasan dalam Rumah Tangga	607	728	752
Kejahatan terhadap Kesusilaan			
Perkosaan	94	96	92
Pencabulan	408	369	326
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang			
Penculikan	14	8	35
Memperkerjakan Anak Dibawah Umur	116	169	160
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan			
Pencurian dengan Kekerasan	433	351	352
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api	11	6	11
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam	48	11	6
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang			
Pencurian	1 924	1 829	1 924
Pencurian dengan Pemberatan	2 000	2 010	2 031
Pencurian Kendaraan Bermotor	1 651	1 513	1 364
Pengrusakan/Penghancuran Barang	272	288	285
Pembakaran dengan Sengaja	27	48	38
Penadahan	88	74	51
Kejahatan Terkait Narkotika			
Narkotika dan Psikotropika	3 656	4 005	3 717
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			
Penipuan/Perbuatan Curang	1 637	1 881	1 752
Penggelapan	1 093	1 272	1 195
Korupsi	52	34	36
Kejahatan terhadap Ketertiban Umum			
Terhadap Ketertiban Umum	305	200	256

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

**Tabel 2.1.9 Jumlah Kejahatan Menurut Kelompok/Jenis Kejahatan dan Bulan, 2021
(lanjutan)**

Kelompok/Jenis Kejahatan	Bulan		
	April	Mei	Juni
(1)	(5)	(6)	(7)
Kejahatan terhadap Nyawa			
Pembunuhan	74	63	123
Kejahatan terhadap Fisik/Badan			
Penganiayaan Berat	825	841	709
Penganiayaan Ringan	1 029	1 210	1 315
Kekerasan dalam Rumah Tangga	684	733	728
Kejahatan terhadap Kesusastraan			
Perkosaan	85	84	113
Pencabulan	359	412	445
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang			
Penculikan	26	22	16
Memperkerjakan Anak Dibawah Umur	141	74	118
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan			
Pencurian dengan Kekerasan	375	396	408
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api	12	10	10
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam	9	16	18
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang			
Pencurian	1 728	1 571	1 928
Pencurian dengan Pemberatan	1 952	1 658	1 817
Pencurian Kendaraan Bermotor	1 374	1 363	1 592
Pengrusakan/Penghancuran Barang	259	249	284
Pembakaran dengan Sengaja	25	43	45
Penadahan	56	49	61
Kejahatan Terkait Narkotika			
Narkotika dan Psikotropika	3 265	2 681	3 098
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			
Penipuan/Perbuatan Curang	1 837	1 305	1 738
Penggelapan	1 255	941	1 136
Korupsi	29	26	26
Kejahatan terhadap Ketertiban Umum			
Terhadap Ketertiban Umum	212	258	228

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

**Tabel 2.1.9 Jumlah Kejahatan Menurut Kelompok/Jenis Kejahatan dan Bulan, 2021
(lanjutan)**

Kelompok/Jenis Kejahatan	Bulan		
	Juli	Agustus	September
(1)	(8)	(9)	(10)
Kejahatan terhadap Nyawa			
Pembunuhan	79	66	63
Kejahatan terhadap Fisik/Badan			
Penganiayaan Berat	747	589	734
Penganiayaan Ringan	1 226	812	479
Kekerasan dalam Rumah Tangga	629	451	525
Kejahatan terhadap Kesusastraan			
Perkosaan	77	72	88
Pencabulan	348	370	339
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang			
Penculikan	16	21	15
Memperkerjakan Anak Dibawah Umur	106	112	165
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan			
Pencurian dengan Kekerasan	380	361	301
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api	8	7	7
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam	24	6	8
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang			
Pencurian	1 792	1 677	1 662
Pencurian dengan Pemberatan	1 784	1 890	2 218
Pencurian Kendaraan Bermotor	1 404	1 431	1 467
Pengrusakan/Penghancuran Barang	272	282	351
Pembakaran dengan Sengaja	35	44	54
Penadahan	51	63	35
Kejahatan Terkait Narkotika			
Narkotika dan Psikotropika	3 145	2 898	3 147
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			
Penipuan/Perbuatan Curang	1 507	1 639	1 647
Penggelapan	1 041	1 164	1 166
Korupsi	20	28	38
Kejahatan terhadap Ketertiban Umum			
Terhadap Ketertiban Umum	183	203	139

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

**Tabel 2.1.9 Jumlah Kejahatan Menurut Kelompok/Jenis Kejahatan dan Bulan, 2021
(lanjutan)**

Kelompok/Jenis Kejahatan	Bulan		
	Oktober	November	Desember
(1)	(11)	(12)	(13)
Kejahatan terhadap Nyawa			
Pembunuhan	75	64	86
Kejahatan terhadap Fisik/Badan			
Penganiayaan Berat	804	570	657
Penganiayaan Ringan	1 280	631	597
Kekerasan dalam Rumah Tangga	553	501	544
Kejahatan terhadap Kesusastraan			
Perkosaan	116	129	118
Pencabulan	479	436	450
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang			
Penculikan	13	7	13
Memperkerjakan Anak Dibawah Umur	180	63	45
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan			
Pencurian dengan Kekerasan	430	372	389
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api	15	7	4
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam	15	12	9
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang			
Pencurian	2 307	2 288	2 678
Pencurian dengan Pemberatan	2 101	2 053	1 908
Pencurian Kendaraan Bermotor	1 752	1 524	1 570
Pengrusakan/Penghancuran Barang	302	348	323
Pembakaran dengan Sengaja	36	35	48
Penadahan	43	29	19
Kejahatan Terkait Narkotika			
Narkotika dan Psikotropika	2 682	2 224	2 436
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			
Penipuan/Perbuatan Curang	1 731	1 890	1 959
Penggelapan	1 253	1 298	1 392
Korupsi	26	29	20
Kejahatan terhadap Ketertiban Umum			
Terhadap Ketertiban Umum	258	174	116

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Tabel 2.1.10 Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2019

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Nyawa		Kejahatan terhadap Fisik		KDRT
	Pembunuhan	Penganiayaan Berat	Penganiayaan Ringan	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
A c e h	26	235	764	257	
Sumatera Utara	104	2 251	2 561	5	
Sumatera Barat	16	288	1 480	220	
Riau	19	232	387	299	
Jambi	15	298	299	142	
Sumatera Selatan	136	932	281	495	
Bengkulu	24	207	45	147	
Lampung	20	134	331	162	
Kep Bangka Belitung	8	122	2	41	
Kepulauan Riau	9	124	280	171	
Metro Jaya	36	613	143	575	
Jawa Barat	32	878	446	490	
Jawa Tengah	34	210	293	120	
DI Yogyakarta	7	66	266	124	
Jawa Timur	65	673	702	928	
Banten	12	78	169	35	
Bali	5	41	403	163	
Nusa Tenggara Barat	5	55	-	397	
Nusa Tenggara Timur	62	164	1 872	372	
Kalimantan Barat	20	82	-	81	
Kalimantan Tengah	28	35	145	41	
Kalimantan Selatan	33	178	159	61	
Kalimantan Timur	13	176	118	230	
Kalimantan Utara	1	53	19	36	
Sulawesi Utara	50	639	1 275	445	
Sulawesi Tengah	17	39	1 099	346	
Sulawesi Selatan	50	166	3 516	984	
Sulawesi Tenggara	13	74	499	90	
Gorontalo	17	17	1 034	152	
Sulawesi Barat	12	2	506	71	
Maluku	10	677	-	214	
Maluku Utara	3	124	14	36	
Papua Barat	10	210	372	87	
Papua	52	250	951	212	
INDONESIA	964	10 323	20 431	8 229	

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

**Tabel 2.1.10 Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2019
(lanjutan)**

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Kesusastraan		Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang Kejahatan	
	Perkosaan	Pencabulan	Penculikan	Mempekerjakan Anak di Bawah Umur
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
A c e h	34	233	17	11
Sumatera Utara	216	-	25	80
Sumatera Barat	29	304	-	104
Riau	114	4	1	7
Jambi	23	46	2	29
Sumatera Selatan	69	100	11	141
Bengkulu	9	89	-	6
Lampung	44	263	5	37
Kep Bangka Belitung	1	37	-	50
Kepulauan Riau	11	118	1	-
Metro Jaya	35	85	18	-
Jawa Barat	41	424	5	8
Jawa Tengah	36	191	3	230
DI Yogyakarta	6	42	2	15
Jawa Timur	51	176	15	196
Banten	7	65	4	110
Bali	6	76	-	11
Nusa Tenggara Barat	41	-	1	50
Nusa Tenggara Timur	52	177	4	7
Kalimantan Barat	16	128	2	97
Kalimantan Tengah	5	52	-	2
Kalimantan Selatan	10	35	-	-
Kalimantan Timur	18	87	-	-
Kalimantan Utara	5	30	-	9
Sulawesi Utara	17	246	45	1
Sulawesi Tengah	37	174	1	37
Sulawesi Selatan	63	308	7	392
Sulawesi Tenggara	25	70	3	3
Gorontalo	17	128	1	52
Sulawesi Barat	11	48	1	9
Maluku	31	151	12	85
Maluku Utara	9	105	-	9
Papua Barat	21	12	3	108
Papua	62	57	-	218
INDONESIA	1 172	4 061	189	2 114

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

**Tabel 2.1.10 Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2019
(lanjutan)**

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan		
	Pencurian dengan Kekerasan	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam
	(10)	(11)	(12)
A c e h	135	1	4
Sumatera Utara	680	5	-
Sumatera Barat	267	1	9
Riau	242	12	-
Jambi	152	7	1
Sumatera Selatan	670	27	26
Bengkulu	89	-	-
Lampung	444	41	83
Kep Bangka Belitung	37	3	1
Kepulauan Riau	98	-	9
Metro Jaya	236	9	50
Jawa Barat	203	10	1
Jawa Tengah	160	5	28
DI Yogyakarta	107	1	3
Jawa Timur	535	3	5
Banten	78	4	-
Bali	63	5	-
Nusa Tenggara Barat	319	-	-
Nusa Tenggara Timur	83	-	-
Kalimantan Barat	72	2	-
Kalimantan Tengah	37	2	75
Kalimantan Selatan	64	1	255
Kalimantan Timur	57	1	112
Kalimantan Utara	13	-	11
Sulawesi Utara	50	-	16
Sulawesi Tengah	110	1	1
Sulawesi Selatan	546	1	30
Sulawesi Tenggara	16	-	-
Gorontalo	52	-	1
Sulawesi Barat	17	-	12
Maluku	18	-	-
Maluku Utara	4	-	2
Papua Barat	207	-	5
Papua	560	1	17
INDONESIA	6 421	143	757

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

**Tabel 2.1.10 Jumlah Kejadian Menurut Jenis Kejadian dan Kepolisian Daerah, 2019
(lanjutan)**

Kepolisian Daerah	Kejadian terhadap Hak Milik/Barang			
	Pencurian	Pencurian dengan Pemberatan	Pencurian Kendaraan Bermotor	Penadahan
	(1)	(13)	(14)	(15)
A c e h	1 094	526	729	97
Sumatera Utara	1 610	3 903	2 632	448
Sumatera Barat	1 770	2 041	2 181	264
Riau	427	972	471	70
Jambi	790	1 252	753	71
Sumatera Selatan	476	1 995	771	261
Bengkulu	203	520	358	28
Lampung	382	1 303	1 021	109
Kep Bangka Belitung	230	352	119	9
Kepulauan Riau	606	267	391	49
Metro Jaya	794	1 215	1 041	120
Jawa Barat	668	1 012	1 613	106
Jawa Tengah	760	1 829	1 531	75
DI Yogyakarta	563	553	520	76
Jawa Timur	1 584	2 686	2 356	195
Banten	127	455	758	22
Bali	470	335	349	35
Nusa Tenggara Barat	533	1 009	-	194
Nusa Tenggara Timur	1 083	217	196	294
Kalimantan Barat	597	657	419	38
Kalimantan Tengah	142	263	172	7
Kalimantan Selatan	347	493	372	22
Kalimantan Timur	239	401	419	25
Kalimantan Utara	63	222	54	4
Sulawesi Utara	804	125	123	283
Sulawesi Tengah	1 527	320	591	153
Sulawesi Selatan	3 036	1 026	986	528
Sulawesi Tenggara	235	35	81	36
Gorontalo	440	26	124	100
Sulawesi Barat	600	63	125	68
Maluku	686	56	135	109
Maluku Utara	75	8	6	9
Papua Barat	319	311	407	106
Papua	1 111	483	1 672	331
INDONESIA	24 391	26 931	23 476	4 342

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

**Tabel 2.1.10 Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2019
(lanjutan)**

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang			Kejahatan terkait Narkotika
	Pengrusakan/ Penghancuran Barang	Pembakaran dengan Sengaja	Narkotika dan Psikotropika	
(1)	(17)	(18)	(19)	
A c e h	28	30	1 582	
Sumatera Utara	78	22	6 201	
Sumatera Barat	21	1	806	
Riau	26	2	1 671	
Jambi	4	-	407	
Sumatera Selatan	35	10	1 621	
Bengkulu	6	7	206	
Lampung	12	8	1 771	
Kep Bangka Belitung	5	2	328	
Kepulauan Riau	11	13	360	
Metro Jaya	9	128	6 338	
Jawa Barat	5	17	1 013	
Jawa Tengah	37	33	1 415	
DI Yogyakarta	-	3	283	
Jawa Timur	26	82	3 640	
Banten	-	4	584	
Bali	4	2	777	
Nusa Tenggara Barat	7	20	288	
Nusa Tenggara Timur	46	13	2	
Kalimantan Barat	5	11	721	
Kalimantan Tengah	97	34	646	
Kalimantan Selatan	16	36	1 726	
Kalimantan Timur	22	8	1 677	
Kalimantan Utara	3	-	200	
Sulawesi Utara	8	44	145	
Sulawesi Tengah	9	8	319	
Sulawesi Selatan	24	5	1 208	
Sulawesi Tenggara	8	-	45	
Gorontalo	8	-	93	
Sulawesi Barat	8	-	121	
Maluku	9	2	124	
Maluku Utara	3	-	89	
Papua Barat	11	2	45	
Papua	124	48	26	
INDONESIA	715	595	36 478	

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Tabel 2.1.10 Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2019
(lanjutan)

Kepolisian Daerah	Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			Kejahatan terhadap Ketertiban Umum Terhadap Ketertiban Umum
	Penipuan/ Perbuatan Curang	Penggelapan	Korupsi	
	(1)	(20)	(21)	(22)
A c e h	628	475	17	3
Sumatera Utara	2 333	2 545	26	-
Sumatera Barat	576	740	36	1
Riau	315	658	14	1
Jambi	457	733	16	206
Sumatera Selatan	1 022	945	22	293
Bengkulu	214	253	19	9
Lampung	836	450	11	-
Kep Bangka Belitung	71	83	4	-
Kepulauan Riau	322	238	4	-
Metro Jaya	3 303	1 801	11	204
Jawa Barat	1 980	1 214	20	83
Jawa Tengah	772	695	21	36
DI Yogyakarta	558	293	2	58
Jawa Timur	2 801	1 254	47	105
Banten	356	153	1	-
Bali	172	196	14	1
Nusa Tenggara Barat	353	311	13	-
Nusa Tenggara Timur	420	310	9	827
Kalimantan Barat	132	263	22	-
Kalimantan Tengah	68	160	34	-
Kalimantan Selatan	131	251	21	-
Kalimantan Timur	135	224	12	62
Kalimantan Utara	19	42	0	-
Sulawesi Utara	672	400	3	12
Sulawesi Tengah	497	394	10	1
Sulawesi Selatan	1 658	781	20	1
Sulawesi Tenggara	110	28	9	2
Gorontalo	192	187	7	3
Sulawesi Barat	158	123	1	-
Maluku	254	66	7	322
Maluku Utara	27	22	-	-
Papua Barat	273	113	7	305
Papua	405	211	28	429
INDONESIA	22 220	16 612	488	2 964

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Tabel 2.1.11 Jumlah Kejadian Menurut Jenis Kejadian dan Kepolisian Daerah, 2020

Kepolisian Daerah	Kejadian terhadap Nyawa		Kejadian terhadap Fisik	
	Pembunuhan	Penganiayaan Berat	Penganiayaan Ringan	KDRT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	15	327	677	202
Sumatera Utara	99	2 140	3 321	746
Sumatera Barat	20	263	1 255	206
Riau	21	213	500	300
Jambi	11	123	287	121
Sumatera Selatan	77	790	337	424
Bengkulu	33	241	93	145
Lampung	21	121	376	150
Kep Bangka Belitung	10	75	43	32
Kepulauan Riau	13	87	280	147
Metro Jaya	32	489	213	747
Jawa Barat	20	583	424	438
Jawa Tengah	30	150	95	137
DI Yogyakarta	6	86	336	151
Jawa Timur	55	371	512	521
Banten	8	133	313	75
Bali	6	56	220	138
Nusa Tenggara Barat	11	73	139	434
Nusa Tenggara Timur	40	137	1 295	294
Kalimantan Barat	35	80	30	74
Kalimantan Tengah	17	34	214	57
Kalimantan Selatan	38	144	233	85
Kalimantan Timur	12	86	113	153
Kalimantan Utara	10	51	19	21
Sulawesi Utara	74	334	1 210	432
Sulawesi Tengah	18	119	952	320
Sulawesi Selatan	71	108	2 999	741
Sulawesi Tenggara	26	83	516	135
Gorontalo	13	23	868	152
Sulawesi Barat	8	47	389	69
Maluku	10	389	446	158
Maluku Utara	1	152	52	51
Papua Barat	10	132	454	69
Papua	27	133	984	179
INDONESIA	898	8 373	20 195	8 104

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

**Tabel 2.1.11 Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2020
(lanjutan)**

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Kesusastraan		Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang Kejahanat	
	Perkosaan	Pencabulan	Penculikan	Mempekerjakan Anak di Bawah Umur
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
A c e h	61	171	18	11
Sumatera Utara	170	604	25	30
Sumatera Barat	35	259	3	94
Riau	122	21	6	5
Jambi	25	44	3	6
Sumatera Selatan	64	108	5	136
Bengkulu	16	92	1	-
Lampung	54	193	9	32
Kep Bangka Belitung	10	42	2	45
Kepulauan Riau	6	103	1	-
Metro Jaya	36	77	22	9
Jawa Barat	67	304	10	1
Jawa Tengah	41	308	10	1
DI Yogyakarta	27	71	3	24
Jawa Timur	77	179	12	165
Banten	15	66	1	150
Bali	6	59	1	3
Nusa Tenggara Barat	59	36	4	42
Nusa Tenggara Timur	48	112	1	13
Kalimantan Barat	14	123	1	111
Kalimantan Tengah	14	101	-	1
Kalimantan Selatan	19	32	-	-
Kalimantan Timur	26	87	1	-
Kalimantan Utara	6	26	-	10
Sulawesi Utara	25	217	86	2
Sulawesi Tengah	49	126	-	22
Sulawesi Selatan	63	145	9	302
Sulawesi Tenggara	32	141	2	7
Gorontalo	19	110	1	72
Sulawesi Barat	11	53	1	6
Maluku	28	1 370	8	111
Maluku Utara	11	89	-	13
Papua Barat	29	18	2	122
Papua	51	49	6	170
INDONESIA	1 336	5 536	254	1 716

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

**Tabel 2.1.11 Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2020
(lanjutan)**

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan		
	Pencurian dengan Kekerasan	Pencurian dengan Kekerasan (Senpi)	Pencurian dengan Kekerasan (Sajam)
(1)	(10)	(11)	(12)
A c e h	136	5	4
Sumatera Utara	706	4	70
Sumatera Barat	173	1	11
Riau	381	24	8
Jambi	79	6	2
Sumatera Selatan	498	21	44
Bengkulu	100	2	4
Lampung	300	52	47
Kep Bangka Belitung	41	1	-
Kepulauan Riau	94	-	9
Metro Jaya	222	13	24
Jawa Barat	246	6	5
Jawa Tengah	207	4	25
DI Yogyakarta	122	-	4
Jawa Timur	336	2	3
Banten	87	7	-
Bali	52	2	-
Nusa Tenggara Barat	283	-	1
Nusa Tenggara Timur	42	-	-
Kalimantan Barat	54	-	-
Kalimantan Tengah	37	-	49
Kalimantan Selatan	111	-	256
Kalimantan Timur	50	-	101
Kalimantan Utara	9	-	10
Sulawesi Utara	62	-	10
Sulawesi Tengah	139	1	-
Sulawesi Selatan	325	-	23
Sulawesi Tenggara	42	-	-
Gorontalo	4	-	-
Sulawesi Barat	8	-	7
Maluku	23	-	-
Maluku Utara	14	-	-
Papua Barat	152	-	3
Papua	512	-	20
INDONESIA	5 647	151	740

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

**Tabel 2.1.11 Jumlah Kejadian Menurut Jenis Kejadian dan Kepolisian Daerah, 2020
(lanjutan)**

Kepolisian Daerah	Kejadian terhadap Hak Milik/Barang			
	Pencurian	Pencurian dengan Pemberatan	Pencurian Kendaraan Bermotor	Penadahan
	(1)	(13)	(14)	(15)
A c e h	1 216	438	607	30
Sumatera Utara	3 290	4 338	2 470	24
Sumatera Barat	1 225	1 315	997	5
Riau	715	1 530	812	9
Jambi	455	753	488	4
Sumatera Selatan	419	1 727	637	5
Bengkulu	213	485	215	8
Lampung	393	1 260	772	9
Kep Bangka Belitung	221	330	113	3
Kepulauan Riau	392	259	286	6
Metro Jaya	713	1 235	792	310
Jawa Barat	577	1 114	1 111	23
Jawa Tengah	767	1 741	1 231	73
DI Yogyakarta	627	676	388	4
Jawa Timur	1 184	2 176	1 429	36
Banten	176	629	801	5
Bali	348	251	177	2
Nusa Tenggara Barat	640	1 136	150	17
Nusa Tenggara Timur	942	191	152	2
Kalimantan Barat	427	483	312	3
Kalimantan Tengah	228	363	171	37
Kalimantan Selatan	321	521	267	52
Kalimantan Timur	242	335	267	2
Kalimantan Utara	118	184	24	3
Sulawesi Utara	1 002	106	92	16
Sulawesi Tengah	1 160	360	502	10
Sulawesi Selatan	2 744	651	589	9
Sulawesi Tenggara	303	65	208	1
Gorontalo	451	36	121	-
Sulawesi Barat	364	100	80	1
Maluku	542	91	143	2
Maluku Utara	69	14	7	5
Papua Barat	297	351	522	6
Papua	1 203	442	1 623	77
INDONESIA	23 984	25 686	18 557	799

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

**Tabel 2.1.11 Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2020
(lanjutan)**

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang		Kejahatan terkait Narkotika
	Pengrusakan/ Penghancuran Barang	Pembakaran dengan Sengaja	Narkotika dan Psikotropika
(1)	(17)	(18)	(19)
A c e h	103	14	1 596
Sumatera Utara	693	101	5 932
Sumatera Barat	181	9	913
Riau	71	15	1 646
Jambi	52	18	619
Sumatera Selatan	103	20	2 554
Bengkulu	40	2	340
Lampung	82	16	1 521
Kep. Bangka Belitung	18	5	332
Kepulauan Riau	47	13	362
Metro Jaya	99	4	5 981
Jawa Barat	120	5	1 141
Jawa Tengah	55	15	1 601
DI Yogyakarta	72	2	460
Jawa Timur	136	15	2 629
Banten	44	2	634
Bali	39	4	668
Nusa Tenggara Barat	169	8	571
Nusa Tenggara Timur	179	28	41
Kalimantan Barat	24	5	755
Kalimantan Tengah	23	15	590
Kalimantan Selatan	36	11	1 582
Kalimantan Timur	14	2	1 354
Kalimantan Utara	8	3	245
Sulawesi Utara	169	9	100
Sulawesi Tengah	87	2	340
Sulawesi Selatan	414	21	1 013
Sulawesi Tenggara	22	33	192
Gorontalo	77	11	101
Sulawesi Barat	57	5	175
Maluku	102	14	142
Maluku Utara	15	2	120
Papua Barat	115	10	120
Papua	254	79	241
INDONESIA	3 720	518	36 611

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

**Tabel 2.1.11 Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2020
(lanjutan)**

Kepolisian Daerah	Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			Kejahatan terhadap Ketertiban Umum
	Penipuan/ Perbuatan Curang	Penggelapan	Korupsi	
	(1)	(20)	(21)	(22)
A c e h	653	452	25	24
Sumatera Utara	2 809	2 740	13	249
Sumatera Barat	419	562	8	50
Riau	370	708	17	113
Jambi	327	421	19	182
Sumatera Selatan	905	857	4	100
Bengkulu	315	226	15	14
Lampung	890	469	14	30
Kep Bangka Belitung	55	72	3	21
Kepulauan Riau	363	173	7	27
Metro Jaya	3 091	1 503	1	213
Jawa Barat	1 768	1 008	16	141
Jawa Tengah	1 050	742	22	120
DI Yogyakarta	802	420	3	126
Jawa Timur	1 897	907	13	213
Banten	420	295	3	51
Bali	208	195	5	29
Nusa Tenggara Barat	504	361	11	72
Nusa Tenggara Timur	378	191	5	632
Kalimantan Barat	162	239	30	24
Kalimantan Tengah	127	174	14	5
Kalimantan Selatan	212	174	14	5
Kalimantan Timur	105	239	12	58
Kalimantan Utara	35	37	-	4
Sulawesi Utara	455	481	9	31
Sulawesi Tengah	352	315	10	31
Sulawesi Selatan	1 084	692	10	36
Sulawesi Tenggara	62	40	20	17
Gorontalo	261	192	14	34
Sulawesi Barat	144	97	3	4
Maluku	223	82	2	342
Maluku Utara	27	19	3	2
Papua Barat	232	117	7	279
Papua	470	210	21	347
INDONESIA	21 175	15 546	376	3 662

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Tabel 2.1.12 Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2021

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Nyawa		Kejahatan terhadap Fisik	
	Pembunuhan	Penganiayaan Berat	Penganiayaan Ringan	KDRT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	29	195	669	210
Sumatera Utara	96	2 260	1 190	837
Sumatera Barat	10	311	818	170
Riau	24	174	432	176
Jambi	15	120	173	97
Sumatera Selatan	69	874	102	277
Bengkulu	36	217	52	151
Lampung	22	91	32	188
Kep Bangka Belitung	8	91	3	29
Kepulauan Riau	16	95	255	98
Metro Jaya	77	752	174	693
Jawa Barat	29	478	331	286
Jawa Tengah	48	169	9	117
DI Yogyakarta	4	42	200	110
Jawa Timur	53	610	455	651
Banten	4	136	237	76
Bali	6	7	199	106
Nusa Tenggara Barat	5	76	52	286
Nusa Tenggara Timur	44	145	864	313
Kalimantan Barat	21	69	-	67
Kalimantan Tengah	14	34	163	65
Kalimantan Selatan	54	184	213	78
Kalimantan Timur	28	83	99	107
Kalimantan Utara	4	8	-	16
Sulawesi Utara	58	283	411	315
Sulawesi Tengah	17	83	827	354
Sulawesi Selatan	44	93	2 191	812
Sulawesi Tenggara	20	56	501	143
Gorontalo	11	5	785	179
Sulawesi Barat	9	8	214	51
Maluku	13	169	39	122
Maluku Utara	-	29	-	48
Papua Barat	8	211	218	63
Papua	31	287	303	144
INDONESIA	927	8 445	12 211	7 435

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

**Tabel 2.1.12 Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2021
(lanjutan)**

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Kesusastraan		Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang Kejahatan	
	Perkosaan	Pencabulan	Penculikan	Mempekerjakan Anak di Bawah Umur
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
A c e h	70	134	11	12
Sumatera Utara	202	702	28	58
Sumatera Barat	32	308	2	46
Riau	24	17	5	-
Jambi	9	37	2	1
Sumatera Selatan	46	43	1	106
Bengkulu	23	89	2	-
Lampung	61	214	8	70
Kep. Bangka Belitung	3	18	-	31
Kepulauan Riau	12	117	-	-
Metro Jaya	35	143	10	1
Jawa Barat	37	256	6	3
Jawa Tengah	32	388	5	1
DI Yogyakarta	15	33	1	12
Jawa Timur	51	257	9	101
Banten	6	87	-	77
Bali	4	56	3	4
Nusa Tenggara Barat	42	16	-	25
Nusa Tenggara Timur	80	136	-	63
Kalimantan Barat	23	85	3	132
Kalimantan Tengah	9	70	-	2
Kalimantan Selatan	18	47	1	1
Kalimantan Timur	22	94	1	-
Kalimantan Utara	-	20	-	12
Sulawesi Utara	22	128	90	1
Sulawesi Tengah	35	271	-	-
Sulawesi Selatan	74	228	9	366
Sulawesi Tenggara	32	205	3	-
Gorontalo	34	133	-	22
Sulawesi Barat	10	49	2	-
Maluku	14	178	2	68
Maluku Utara	10	96	2	1
Papua Barat	24	38	-	85
Papua	53	48	-	148
INDONESIA	1 164	4 741	206	1 449

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

**Tabel 2.1.12 Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2021
(lanjutan)**

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan		
	Pencurian dengan Kekerasan	Pencurian dengan Kekerasan (Senpi)	Pencurian dengan Kekerasan (Sajam)
(1)	(10)	(11)	(12)
A c e h	97	3	7
Sumatera Utara	530	-	10
Sumatera Barat	95	1	2
Riau	239	10	6
Jambi	71	1	1
Sumatera Selatan	515	24	25
Bengkulu	83	2	-
Lampung	388	31	12
Kep. Bangka Belitung	22	1	-
Kepulauan Riau	58	-	5
Metro Jaya	314	9	23
Jawa Barat	151	7	1
Jawa Tengah	173	3	12
DI Yogyakarta	51	3	1
Jawa Timur	393	6	5
Banten	76	2	-
Bali	34	-	-
Nusa Tenggara Barat	196	1	-
Nusa Tenggara Timur	35	-	-
Kalimantan Barat	38	-	-
Kalimantan Tengah	15	-	5
Kalimantan Selatan	121	2	26
Kalimantan Timur	30	1	16
Kalimantan Utara	10	-	1
Sulawesi Utara	16	-	4
Sulawesi Tengah	71	-	-
Sulawesi Selatan	249	-	12
Sulawesi Tenggara	31	-	-
Gorontalo	1	-	-
Sulawesi Barat	11	-	-
Maluku	5	-	-
Maluku Utara	5	-	-
Papua Barat	113	-	1
Papua	311	1	7
INDONESIA	4 548	108	182

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

**Tabel 2.1.12 Jumlah Kejadian Menurut Jenis Kejadian dan Kepolisian Daerah, 2021
(lanjutan)**

Kepolisian Daerah	Kejadian terhadap Hak Milik/Barang			
	Pencurian	Pencurian dengan Pemberatan	Pencurian Kendaraan Bermotor	Penadahan
	(1)	(13)	(14)	(15)
A c e h	1 207	410	632	13
Sumatera Utara	4 183	4 738	2 698	9
Sumatera Barat	623	683	507	6
Riau	821	1 136	585	12
Jambi	404	653	449	-
Sumatera Selatan	482	1 849	430	15
Bengkulu	219	507	266	11
Lampung	434	1 365	1 095	11
Kep. Bangka Belitung	217	223	89	-
Kepulauan Riau	294	198	323	4
Metro Jaya	1 070	1 472	909	316
Jawa Barat	396	648	1 035	15
Jawa Tengah	529	1 409	857	25
DI Yogyakarta	416	287	214	6
Jawa Timur	1 811	2 385	2 249	24
Banten	132	486	492	5
Bali	348	269	151	-
Nusa Tenggara Barat	502	805	47	12
Nusa Tenggara Timur	715	101	100	2
Kalimantan Barat	406	470	468	2
Kalimantan Tengah	226	320	126	38
Kalimantan Selatan	395	405	262	34
Kalimantan Timur	244	352	343	4
Kalimantan Utara	62	285	24	2
Sulawesi Utara	824	45	118	13
Sulawesi Tengah	1 030	290	536	6
Sulawesi Selatan	2 811	887	570	3
Sulawesi Tenggara	271	32	199	-
Gorontalo	375	30	74	-
Sulawesi Barat	285	59	57	-
Maluku	422	32	103	1
Maluku Utara	67	6	8	-
Papua Barat	226	236	459	-
Papua	861	349	1 530	30
INDONESIA	23 308	23 422	18 005	619

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

**Tabel 2.1.12 Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2021
(lanjutan)**

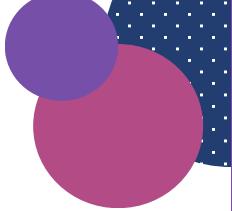
Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang			Kejahatan terkait Narkotika
	Pengrusakan/ Penghancuran Barang	Pembakaran dengan Sengaja	Narkotika dan Psikotropika	
	(1)	(17)	(18)	(19)
A c e h	103	15		1 208
Sumatera Utara	721	84		5 949
Sumatera Barat	144	8		994
Riau	49	19		1 670
Jambi	38	1		361
Sumatera Selatan	132	8		4 055
Bengkulu	28	1		350
Lampung	126	25		1 683
Kep Bangka Belitung	13	1		330
Kepulauan Riau	45	-		236
Metro Jaya	110	31		5 810
Jawa Barat	43	4		757
Jawa Tengah	54	15		1 673
DI Yogyakarta	36	5		312
Jawa Timur	139	26		2 873
Banten	23	2		565
Bali	21	3		696
Nusa Tenggara Barat	121	3		315
Nusa Tenggara Timur	172	16		2
Kalimantan Barat	33	19		880
Kalimantan Tengah	17	25		620
Kalimantan Selatan	24	4		1 442
Kalimantan Timur	18	2		2 066
Kalimantan Utara	7	5		287
Sulawesi Utara	224	3		95
Sulawesi Tengah	66	2		422
Sulawesi Selatan	464	32		399
Sulawesi Tenggara	36	37		174
Gorontalo	66	9		45
Sulawesi Barat	33	3		200
Maluku	81	12		143
Maluku Utara	9	2		143
Papua Barat	119	5		13
Papua	200	51		186
INDONESIA	3 515	478		36 954

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

**Tabel 2.1.12 Jumlah Kejadian Menurut Jenis Kejadian dan Kepolisian Daerah, 2021
(lanjutan)**

Kepolisian Daerah	Kejadian terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			Kejadian terhadap Ketertiban Umum
	Penipuan/ Perbuatan Curang	Penggelapan	Korupsi	
	(1)	(20)	(21)	(22)
A c e h	489	513	21	6
Sumatera Utara	2 853	2 531	12	23
Sumatera Barat	357	376	6	1
Riau	361	564	21	-
Jambi	251	346	-	156
Sumatera Selatan	929	838	1	97
Bengkulu	322	214	25	6
Lampung	1 109	656	13	-
Kep. Bangka Belitung	38	69	3	-
Kepulauan Riau	371	153	9	1
Metro Jaya	3 716	1 717	6	220
Jawa Barat	1 339	629	12	63
Jawa Tengah	746	563	17	144
DI Yogyakarta	522	281	-	61
Jawa Timur	2 391	1 088	18	95
Banten	510	184	6	-
Bali	143	167	10	4
Nusa Tenggara Barat	239	228	11	-
Nusa Tenggara Timur	318	173	4	616
Kalimantan Barat	162	274	28	2
Kalimantan Tengah	106	201	9	-
Kalimantan Selatan	219	341	12	-
Kalimantan Timur	114	139	18	28
Kalimantan Utara	27	28	-	-
Sulawesi Utara	419	430	3	4
Sulawesi Tengah	322	348	13	13
Sulawesi Selatan	1 137	575	17	1
Sulawesi Tenggara	71	23	28	1
Gorontalo	157	147	10	3
Sulawesi Barat	103	74	1	-
Maluku	141	98	5	360
Maluku Utara	23	15	2	3
Papua Barat	212	88	7	276
Papua	306	135	16	348
INDONESIA	20 523	14 206	364	2 532

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri



https://www.bps.go.id

DATA POTENSI DESA KEJADIAN KEJAHATAN



Tabel 2.2.1 Jumlah Desa/Kelurahan, 2014, 2018, dan 2021

Provinsi	Tahun		
	2014	2018	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	6 512	6 508	6 514
Sumatera Utara	6 104	6 132	6 132
Sumatera Barat	1 145	1 275	1 287
Riau	1 835	1 875	1 876
Jambi	1 551	1 562	1 562
Sumatera Selatan	3 237	3 262	3 292
Bengkulu	1 532	1 514	1 514
Lampung	2 632	2 654	2 654
Kep. Bangka Belitung	381	391	393
Kepulauan Riau	415	416	428
DKI Jakarta	267	267	267
Jawa Barat	5 962	5 957	5 957
Jawa Tengah	8 578	8 559	8 562
DI Yogyakarta	438	438	438
Jawa Timur	8 502	8 496	8 496
Banten	1 551	1 552	1 552
Bali	716	716	716
Nusa Tenggara Barat	1 141	1 143	1 151
Nusa Tenggara Timur	3 270 ^r	3 353	3 450
Kalimantan Barat	2 109	2 137	2 148
Kalimantan Tengah	1 569	1 576	1 576
Kalimantan Selatan	2 008	2 008	2 007
Kalimantan Timur	1 026	1 038	1 046
Kalimantan Utara	479	482	482
Sulawesi Utara	1 836	1 838	1 840
Sulawesi Tengah	1 986	2 020	2 020
Sulawesi Selatan	3 030 ^r	3 049	3 051
Sulawesi Tenggara	2 272	2 354	2 309
Gorontalo	736	734	734
Sulawesi Barat	648	650	650
Maluku	1 088	1 240	1 248
Maluku Utara	1 196	1 196	1 203
Papua Barat	1 567	1 987	1 986
Papua	4 871	5 552	5 555
INDONESIA	82 190	83 931	84 096

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

Catatan: Desa pada tabel ini termasuk nagari, Unit Permukiman Transmigrasi (UPT), dan Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait.

Tabel 2.2.2 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Kejahatan, 2014, 2018, dan 2021

Jenis Kejahatan	Jumlah			Persentase		
	2014	2018	2021	2014	2018	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pembunuhan	1 739	1 799	916	2,12	2,14	1,09
Penganiayaan	4 047	5 092	2 284	4,92	6,07	2,72
Perkosaan	2 050	2 851	1 209	2,49	3,40	1,44
Pencurian dengan Kekerasan	2 963	2 821	1 455	3,61	3,36	1,73
Pencurian	33 739	37 778	22 285	41,05	45,01	26,50
Penipuan/Penggelapan	7 244	8 620	4 284	8,81	10,27	5,09
Pembakaran	874	1 050	463	1,06	1,25	0,55
Perdagangan Orang	122	124	49	0,15	0,15	0,06
Penyalahgunaan/Pengedaran Narkoba	5 931	12 579	9 019	7,22	14,99	10,72
Perjudian	11 079	12 842	7 473	13,48	15,30	8,89

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

Tabel 2.2.3 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021

Provinsi	Tahun		
	2014	2018	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	26	33	21
Sumatera Utara	130	122	64
Sumatera Barat	39	43	20
Riau	56	72	28
Jambi	30	33	18
Sumatera Selatan	140	114	65
Bengkulu	27	21	11
Lampung	50	66	29
Kep. Bangka Belitung	14	8	9
Kepulauan Riau	14	5	5
DKI Jakarta	29	14	11
Jawa Barat	142	130	51
Jawa Tengah	86	93	37
DI Yogyakarta	16	13	7
Jawa Timur	163	150	90
Banten	32	38	14
Bali	17	9	12
Nusa Tenggara Barat	37	37	23
Nusa Tenggara Timur	80	82	57
Kalimantan Barat	41	29	32
Kalimantan Tengah	51	41	19
Kalimantan Selatan	64	58	40
Kalimantan Timur	31	32	20
Kalimantan Utara	8	4	3
Sulawesi Utara	61	57	29
Sulawesi Tengah	41	41	22
Sulawesi Selatan	99	95	46
Sulawesi Tenggara	26	39	25
Gorontalo	17	25	12
Sulawesi Barat	8	8	11
Maluku	17	15	9
Maluku Utara	13	21	5
Papua Barat	22	27	19
Papua	112	224	52
INDONESIA	1 739	1 799	916

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

Tabel 2.2.4 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penganiayaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021

Provinsi	Tahun		
	2014	2018	2021
	(1)	(2)	(4)
A c e h	99	141	62
Sumatera Utara	264	295	162
Sumatera Barat	107	112	49
Riau	74	139	36
Jambi	50	81	30
Sumatera Selatan	168	173	77
Bengkulu	46	57	41
Lampung	110	157	53
Kep. Bangka Belitung	50	47	20
Kepulauan Riau	20	30	11
DKI Jakarta	66	30	27
Jawa Barat	425	598	251
Jawa Tengah	274	328	163
DI Yogyakarta	54	61	44
Jawa Timur	429	519	224
Banten	84	123	43
Bali	54	64	33
Nusa Tenggara Barat	107	134	97
Nusa Tenggara Timur	166	209	98
Kalimantan Barat	85	78	44
Kalimantan Tengah	68	66	24
Kalimantan Selatan	110	105	51
Kalimantan Timur	52	71	36
Kalimantan Utara	11	18	5
Sulawesi Utara	161	181	80
Sulawesi Tengah	102	138	59
Sulawesi Selatan	261	263	123
Sulawesi Tenggara	158	140	57
Gorontalo	64	105	44
Sulawesi Barat	17	22	10
Maluku	50	60	28
Maluku Utara	48	46	25
Papua Barat	21	62	28
Papua	192	439	149
INDONESIA	4 047	5 092	2 284

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

Tabel 2.2.5 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perkosaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021

Provinsi	Tahun		
	2014	2018	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	91	93	42
Sumatera Utara	115	178	75
Sumatera Barat	66	106	60
Riau	59	95	25
Jambi	35	54	22
Sumatera Selatan	78	72	35
Bengkulu	57	39	33
Lampung	57	96	41
Kep. Bangka Belitung	16	19	7
Kepulauan Riau	19	13	11
DKI Jakarta	25	9	6
Jawa Barat	175	206	96
Jawa Tengah	148	159	67
DI Yogyakarta	11	15	11
Jawa Timur	215	210	99
Banten	39	52	27
Bali	9	9	7
Nusa Tenggara Barat	39	54	40
Nusa Tenggara Timur	104	111	80
Kalimantan Barat	63	65	42
Kalimantan Tengah	32	30	21
Kalimantan Selatan	25	44	16
Kalimantan Timur	23	45	26
Kalimantan Utara	9	14	7
Sulawesi Utara	54	95	42
Sulawesi Tengah	56	67	29
Sulawesi Selatan	47	90	31
Sulawesi Tenggara	40	51	21
Gorontalo	36	58	25
Sulawesi Barat	5	15	13
Maluku	27	40	22
Maluku Utara	26	35	20
Papua Barat	23	41	14
Papua	226	571	96
INDONESIA	2 050	2 851	1 209

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

Tabel 2.2.6 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021

Provinsi	Tahun		
	2014	2018	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	47	59	44
Sumatera Utara	141	182	141
Sumatera Barat	71	53	47
Riau	101	103	89
Jambi	76	85	27
Sumatera Selatan	430	323	119
Bengkulu	40	52	15
Lampung	255	233	102
Kep. Bangka Belitung	15	8	9
Kepulauan Riau	17	20	4
DKI Jakarta	73	38	32
Jawa Barat	344	342	172
Jawa Tengah	176	155	60
DI Yogyakarta	20	17	14
Jawa Timur	419	295	159
Banten	49	76	49
Bali	23	22	12
Nusa Tenggara Barat	146	76	30
Nusa Tenggara Timur	67	68	35
Kalimantan Barat	37	34	40
Kalimantan Tengah	27	20	7
Kalimantan Selatan	73	48	17
Kalimantan Timur	37	32	22
Kalimantan Utara	9	8	1
Sulawesi Utara	21	30	12
Sulawesi Tengah	23	24	37
Sulawesi Selatan	47	73	30
Sulawesi Tenggara	16	18	9
Gorontalo	3	9	9
Sulawesi Barat	7	4	4
Maluku	20	12	6
Maluku Utara	7	9	9
Papua Barat	13	34	24
Papua	113	259	68
INDONESIA	2 963	2 821	1 455

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

Tabel 2.2.7 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021

Provinsi	Tahun		
	2014	2018	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	1 744	2 225	982
Sumatera Utara	2 116	2 776	1 642
Sumatera Barat	574	779	597
Riau	942	1 169	667
Jambi	661	915	641
Sumatera Selatan	1 939	2 016	1 124
Bengkulu	635	743	449
Lampung	1 621	1 875	1 251
Kep. Bangka Belitung	203	206	146
Kepulauan Riau	133	159	91
DKI Jakarta	229	184	153
Jawa Barat	4 390	4 394	2 803
Jawa Tengah	4 064	4 068	2 185
DI Yogyakarta	283	294	202
Jawa Timur	4 122	3 919	2 385
Banten	1 079	1 104	723
Bali	202	254	159
Nusa Tenggara Barat	782	730	509
Nusa Tenggara Timur	724	863	437
Kalimantan Barat	648	808	502
Kalimantan Tengah	409	562	330
Kalimantan Selatan	889	926	567
Kalimantan Timur	354	456	347
Kalimantan Utara	62	134	87
Sulawesi Utara	676	705	382
Sulawesi Tengah	578	777	451
Sulawesi Selatan	1 206	1 309	744
Sulawesi Tenggara	489	733	297
Gorontalo	179	253	114
Sulawesi Barat	171	195	95
Maluku	225	266	132
Maluku Utara	297	352	203
Papua Barat	149	227	170
Papua	964	1 402	718
INDONESIA	33 739	37 778	22 285

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

Tabel 2.2.8 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penipuan/Penggelapan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021

Provinsi	Tahun		
	2014	2018	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	229	356	141
Sumatera Utara	378	512	211
Sumatera Barat	138	204	93
Riau	204	235	131
Jambi	109	180	79
Sumatera Selatan	334	287	142
Bengkulu	77	106	53
Lampung	284	422	194
Kep. Bangka Belitung	62	55	32
Kepulauan Riau	39	45	12
DKI Jakarta	100	62	43
Jawa Barat	1 111	1 187	620
Jawa Tengah	952	986	578
DI Yogyakarta	96	121	70
Jawa Timur	1 001	1 100	645
Banten	227	292	115
Bali	42	54	37
Nusa Tenggara Barat	136	178	130
Nusa Tenggara Timur	163	154	62
Kalimantan Barat	141	153	97
Kalimantan Tengah	95	72	37
Kalimantan Selatan	150	172	66
Kalimantan Timur	84	91	52
Kalimantan Utara	10	28	10
Sulawesi Utara	89	138	60
Sulawesi Tengah	107	143	51
Sulawesi Selatan	305	458	166
Sulawesi Tenggara	87	157	49
Gorontalo	35	56	31
Sulawesi Barat	27	62	17
Maluku	52	49	34
Maluku Utara	49	52	21
Papua Barat	37	55	28
Papua	294	398	177
INDONESIA	7 244	8 620	4 284

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

Tabel 2.2.9 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembakaran dengan Sengaja Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021

Provinsi	Tahun		
	2014 (2)	2018 (3)	2021 (4)
A c e h	48	32	19
Sumatera Utara	53	61	16
Sumatera Barat	18	27	5
Riau	78	60	26
Jambi	26	28	19
Sumatera Selatan	30	54	28
Bengkulu	15	8	19
Lampung	11	20	5
Kep. Bangka Belitung	6	2	2
Kepulauan Riau	10	13	5
DKI Jakarta	10	3	4
Jawa Barat	54	57	14
Jawa Tengah	39	37	12
DI Yogyakarta	5	5	3
Jawa Timur	68	65	37
Banten	13	6	8
Bali	7	9	2
Nusa Tenggara Barat	14	13	12
Nusa Tenggara Timur	98	100	65
Kalimantan Barat	23	38	16
Kalimantan Tengah	34	34	13
Kalimantan Selatan	18	32	16
Kalimantan Timur	11	12	10
Kalimantan Utara	10	10	4
Sulawesi Utara	17	11	11
Sulawesi Tengah	21	16	9
Sulawesi Selatan	32	28	13
Sulawesi Tenggara	9	15	3
Gorontalo	5	9	6
Sulawesi Barat	6	5	0
Maluku	9	19	7
Maluku Utara	7	22	2
Papua Barat	8	17	11
Papua	61	182	41
INDONESIA	874	1 050	463

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

Tabel 2.2.10 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perdagangan Orang Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021

Provinsi	Tahun		
	2014	2018	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	2	3	0
Sumatera Utara	11	5	2
Sumatera Barat	-	1	1
Riau	2	6	0
Jambi	-	3	0
Sumatera Selatan	5	6	0
Bengkulu	2	1	0
Lampung	1	6	1
Kep. Bangka Belitung	2	4	1
Kepulauan Riau	2	2	1
DKI Jakarta	2	-	2
Jawa Barat	25	17	19
Jawa Tengah	11	3	1
DI Yogyakarta	-	-	0
Jawa Timur	11	14	7
Banten	2	6	2
Bali	1	-	0
Nusa Tenggara Barat	2	3	1
Nusa Tenggara Timur	14	27	2
Kalimantan Barat	7	-	3
Kalimantan Tengah	3	1	1
Kalimantan Selatan	-	1	1
Kalimantan Timur	-	1	0
Kalimantan Utara	1	-	0
Sulawesi Utara	6	6	2
Sulawesi Tengah	1	-	0
Sulawesi Selatan	4	2	1
Sulawesi Tenggara	1	-	0
Gorontalo	1	-	1
Sulawesi Barat	-	-	0
Maluku	1	1	0
Maluku Utara	-	-	0
Papua Barat	-	-	0
Papua	2	5	0
INDONESIA	122	124	49

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

Tabel 2.2.11 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Penyalahgunaan/Pengedaran Narkoba Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021

Provinsi	Tahun		
	2014	2018	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	508	1 212	562
Sumatera Utara	1 033	1 795	1 373
Sumatera Barat	168	481	411
Riau	315	683	546
Jambi	167	387	298
Sumatera Selatan	409	783	596
Bengkulu	74	115	138
Lampung	186	466	341
Kep. Bangka Belitung	58	112	86
Kepulauan Riau	27	63	29
DKI Jakarta	126	92	89
Jawa Barat	558	952	631
Jawa Tengah	263	495	316
DI Yogyakarta	37	73	72
Jawa Timur	639	1 480	1 165
Banten	155	259	184
Bali	34	65	57
Nusa Tenggara Barat	93	216	232
Nusa Tenggara Timur	18	9	12
Kalimantan Barat	61	241	165
Kalimantan Tengah	81	229	160
Kalimantan Selatan	312	675	340
Kalimantan Timur	148	301	253
Kalimantan Utara	32	94	57
Sulawesi Utara	25	56	29
Sulawesi Tengah	144	316	257
Sulawesi Selatan	128	506	340
Sulawesi Tenggara	25	84	79
Gorontalo	21	43	21
Sulawesi Barat	20	60	67
Maluku	15	28	20
Maluku Utara	21	28	22
Papua Barat	8	34	26
Papua	22	146	45
INDONESIA	5 931	12 579	9 019

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

Tabel 2.2.12 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Perjudian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021

Provinsi	Tahun		
	2014	2018	2021
	(1)	(2)	(4)
A c e h	401	598	283
Sumatera Utara	1 665	1 947	1 227
Sumatera Barat	267	458	276
Riau	329	510	284
Jambi	157	297	158
Sumatera Selatan	683	662	386
Bengkulu	67	107	54
Lampung	393	546	246
Kep. Bangka Belitung	71	60	28
Kepulauan Riau	31	48	14
DKI Jakarta	83	35	25
Jawa Barat	692	776	574
Jawa Tengah	770	1 153	711
DI Yogyakarta	59	74	29
Jawa Timur	1 502	1 295	692
Banten	180	231	131
Bali	81	67	45
Nusa Tenggara Barat	198	205	168
Nusa Tenggara Timur	293	389	198
Kalimantan Barat	303	416	230
Kalimantan Tengah	250	217	106
Kalimantan Selatan	283	230	118
Kalimantan Timur	129	145	111
Kalimantan Utara	39	44	30
Sulawesi Utara	377	300	158
Sulawesi Tengah	337	297	122
Sulawesi Selatan	377	458	263
Sulawesi Tenggara	126	235	106
Gorontalo	116	115	76
Sulawesi Barat	95	60	31
Maluku	165	125	168
Maluku Utara	147	93	75
Papua Barat	57	61	82
Papua	356	588	268
INDONESIA	11 079	12 842	7 473

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

Tabel 2.2.13 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021

Provinsi	Tahun		
	2014	2018	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	0,40	0,51	0,32
Sumatera Utara	2,13	1,99	1,04
Sumatera Barat	3,41	3,37	1,55
Riau	3,05	3,84	1,49
Jambi	1,93	2,11	1,15
Sumatera Selatan	4,32	3,49	1,97
Bengkulu	1,76	1,39	0,73
Lampung	1,90	2,49	1,09
Kep. Bangka Belitung	3,67	2,05	2,29
Kepulauan Riau	3,37	1,20	1,17
DKI Jakarta	10,86	5,24	4,12
Jawa Barat	2,38	2,18	0,86
Jawa Tengah	1,00	1,09	0,43
DI Yogyakarta	3,65	2,97	1,60
Jawa Timur	1,92	1,77	1,06
Banten	2,06	2,45	0,90
Bali	2,37	1,26	1,68
Nusa Tenggara Barat	3,24	3,24	2,00
Nusa Tenggara Timur	2,45	2,45	1,65
Kalimantan Barat	1,94	1,36	1,49
Kalimantan Tengah	3,25	2,60	1,21
Kalimantan Selatan	3,19	2,89	1,99
Kalimantan Timur	3,02	3,08	1,91
Kalimantan Utara	1,67	0,83	0,62
Sulawesi Utara	3,32	3,10	1,58
Sulawesi Tengah	2,06	2,03	1,09
Sulawesi Selatan	3,27	3,12	1,51
Sulawesi Tenggara	1,14	1,66	1,08
Gorontalo	2,31	3,41	1,63
Sulawesi Barat	1,23	1,23	1,69
Maluku	1,56	1,21	0,72
Maluku Utara	1,09	1,76	0,42
Papua Barat	1,40	1,36	0,96
Papua	2,30	4,03	0,94
INDONESIA	2,12	2,14	1,09

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

Tabel 2.2.14 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penganiayaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021

Provinsi	Tahun		
	2014	2018	2021
	(1)	(2)	(4)
A c e h	1,52	2,17	0,95
Sumatera Utara	4,33	4,81	2,64
Sumatera Barat	9,34	8,78	3,81
Riau	4,03	7,41	1,92
Jambi	3,22	5,19	1,92
Sumatera Selatan	5,19	5,30	2,34
Bengkulu	3,00	3,76	2,71
Lampung	4,18	5,92	2,00
Kep. Bangka Belitung	13,12	12,02	5,09
Kepulauan Riau	4,82	7,21	2,57
DKI Jakarta	24,72	11,24	10,11
Jawa Barat	7,13	10,04	4,21
Jawa Tengah	3,19	3,83	1,90
DI Yogyakarta	12,33	13,93	10,05
Jawa Timur	5,05	6,11	2,64
Banten	5,42	7,93	2,77
Bali	7,54	8,94	4,61
Nusa Tenggara Barat	9,38	11,72	8,43
Nusa Tenggara Timur	5,08	6,23	2,84
Kalimantan Barat	4,03	3,65	2,05
Kalimantan Tengah	4,33	4,19	1,52
Kalimantan Selatan	5,48	5,23	2,54
Kalimantan Timur	5,07	6,84	3,44
Kalimantan Utara	2,30	3,73	1,04
Sulawesi Utara	8,77	9,85	4,35
Sulawesi Tengah	5,14	6,83	2,92
Sulawesi Selatan	8,61	8,63	4,03
Sulawesi Tenggara	6,95	5,95	2,47
Gorontalo	8,70	14,31	5,99
Sulawesi Barat	2,62	3,38	1,54
Maluku	4,60	4,84	2,24
Maluku Utara	4,01	3,85	2,08
Papua Barat	1,34	3,12	1,41
Papua	3,94	7,91	2,68
INDONESIA	4,92	6,07	2,72

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

Tabel 2.2.15 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perkosaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021

Provinsi	Tahun		
	2014	2018	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	1,40	1,43	0,64
Sumatera Utara	1,88	2,90	1,22
Sumatera Barat	5,76	8,31	4,66
Riau	3,22	5,07	1,33
Jambi	2,26	3,46	1,41
Sumatera Selatan	2,41	2,21	1,06
Bengkulu	3,72	2,58	2,18
Lampung	2,17	3,62	1,54
Kep. Bangka Belitung	4,20	4,86	1,78
Kepulauan Riau	4,58	3,13	2,57
DKI Jakarta	9,36	3,37	2,25
Jawa Barat	2,94	3,46	1,61
Jawa Tengah	1,73	1,86	0,78
DI Yogyakarta	2,51	3,42	2,51
Jawa Timur	2,53	2,47	1,17
Banten	2,51	3,35	1,74
Bali	1,26	1,26	0,98
Nusa Tenggara Barat	3,42	4,72	3,48
Nusa Tenggara Timur	3,18	3,31	2,32
Kalimantan Barat	2,99	3,04	1,96
Kalimantan Tengah	2,04	1,90	1,33
Kalimantan Selatan	1,25	2,19	0,80
Kalimantan Timur	2,24	4,34	2,49
Kalimantan Utara	1,88	2,90	1,45
Sulawesi Utara	2,94	5,17	2,28
Sulawesi Tengah	2,82	3,32	1,44
Sulawesi Selatan	1,55	2,95	1,02
Sulawesi Tenggara	1,76	2,17	0,91
Gorontalo	4,89	7,90	3,41
Sulawesi Barat	0,77	2,31	2,00
Maluku	2,48	3,23	1,76
Maluku Utara	2,17	2,93	1,66
Papua Barat	1,47	2,06	0,70
Papua	4,64	10,28	1,73
INDONESIA	2,49	3,40	1,44

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

Tabel 2.2.16 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021

Provinsi	Tahun		
	2014 (1)	2018 (2)	2021 (3)
A c e h	0,72	0,91	0,68
Sumatera Utara	2,31	2,97	2,30
Sumatera Barat	6,20	4,16	3,65
Riau	5,50	5,49	4,74
Jambi	4,90	5,44	1,73
Sumatera Selatan	13,28	9,90	3,61
Bengkulu	2,61	3,43	0,99
Lampung	9,69	8,78	3,84
Kep. Bangka Belitung	3,94	2,05	2,29
Kepulauan Riau	4,10	4,81	0,93
DKI Jakarta	27,34	14,23	11,99
Jawa Barat	5,77	5,74	2,89
Jawa Tengah	2,05	1,81	0,70
DI Yogyakarta	4,57	3,88	3,20
Jawa Timur	4,93	3,47	1,87
Banten	3,16	4,90	3,16
Bali	3,21	3,07	1,68
Nusa Tenggara Barat	12,80	6,65	2,61
Nusa Tenggara Timur	2,05	2,03	1,01
Kalimantan Barat	1,75	1,59	1,86
Kalimantan Tengah	1,72	1,27	0,44
Kalimantan Selatan	3,64	2,39	0,85
Kalimantan Timur	3,61	3,08	2,10
Kalimantan Utara	1,88	1,66	0,21
Sulawesi Utara	1,14	1,63	0,65
Sulawesi Tengah	1,16	1,19	1,83
Sulawesi Selatan	1,55	2,39	0,98
Sulawesi Tenggara	0,70	0,76	0,39
Gorontalo	0,41	1,23	1,23
Sulawesi Barat	1,08	0,62	0,62
Maluku	1,84	0,97	0,48
Maluku Utara	0,59	0,75	0,75
Papua Barat	0,83	1,71	1,21
Papua	2,32	4,66	1,22
INDONESIA	3,61	3,36	1,73

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

Tabel 2.2.17 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021

Provinsi	Tahun		
	2014	2018	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	26,78	34,19	15,08
Sumatera Utara	34,67	45,27	26,78
Sumatera Barat	50,13	61,10	46,39
Riau	51,34	62,35	35,55
Jambi	42,62	58,58	41,04
Sumatera Selatan	59,90	61,80	34,14
Bengkulu	41,45	49,08	29,66
Lampung	61,59	70,65	47,14
Kep. Bangka Belitung	53,28	52,69	37,15
Kepulauan Riau	32,05	38,22	21,26
DKI Jakarta	85,77	68,91	57,30
Jawa Barat	73,63	73,76	47,05
Jawa Tengah	47,38	47,53	25,52
DI Yogyakarta	64,61	67,12	46,12
Jawa Timur	48,48	46,13	28,07
Banten	69,57	71,13	46,59
Bali	28,21	35,47	22,21
Nusa Tenggara Barat	68,54	63,87	44,22
Nusa Tenggara Timur	22,14	25,74	12,67
Kalimantan Barat	30,73	37,81	23,37
Kalimantan Tengah	26,07	35,66	20,94
Kalimantan Selatan	44,27	46,12	28,25
Kalimantan Timur	34,50	43,93	33,17
Kalimantan Utara	12,94	27,80	18,05
Sulawesi Utara	36,82	38,36	20,76
Sulawesi Tengah	29,10	38,47	22,33
Sulawesi Selatan	39,80	42,93	24,39
Sulawesi Tenggara	21,52	31,14	12,86
Gorontalo	24,32	34,47	15,53
Sulawesi Barat	26,39	30,00	14,62
Maluku	20,68	21,45	10,58
Maluku Utara	24,83	29,43	16,87
Papua Barat	9,51	11,42	8,56
Papua	19,79	25,25	12,93
INDONESIA	41,05	45,01	26,50

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

Tabel 2.2.18 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penipuan/ Penggelapan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021

Provinsi	Tahun		
	2014	2018	2021
	(1)	(2)	(3)
A c e h	3,52	5,47	2,16
Sumatera Utara	6,19	8,35	3,44
Sumatera Barat	12,05	16,00	7,23
Riau	11,12	12,53	6,98
Jambi	7,03	11,52	5,06
Sumatera Selatan	10,32	8,80	4,31
Bengkulu	5,03	7,00	3,50
Lampung	10,79	15,90	7,31
Kep. Bangka Belitung	16,27	14,07	8,14
Kepulauan Riau	9,40	10,82	2,80
DKI Jakarta	37,45	23,22	16,10
Jawa Barat	18,63	19,93	10,41
Jawa Tengah	11,10	11,52	6,75
DI Yogyakarta	21,92	27,63	15,98
Jawa Timur	11,77	12,95	7,59
Banten	14,64	18,81	7,41
Bali	5,87	7,54	5,17
Nusa Tenggara Barat	11,92	15,57	11,29
Nusa Tenggara Timur	4,98	4,59	1,80
Kalimantan Barat	6,69	7,16	4,52
Kalimantan Tengah	6,05	4,57	2,35
Kalimantan Selatan	7,47	8,57	3,29
Kalimantan Timur	8,19	8,77	4,97
Kalimantan Utara	2,09	5,81	2,07
Sulawesi Utara	4,85	7,51	3,26
Sulawesi Tengah	5,39	7,08	2,52
Sulawesi Selatan	10,07	15,02	5,44
Sulawesi Tenggara	3,83	6,67	2,12
Gorontalo	4,76	7,63	4,22
Sulawesi Barat	4,17	9,54	2,62
Maluku	4,78	3,95	2,72
Maluku Utara	4,10	4,35	1,75
Papua Barat	2,36	2,77	1,41
Papua	6,04	7,17	3,19
INDONESIA	8,81	10,27	5,09

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

Tabel 2.2.19 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembakaran dengan Sengaja Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021

Provinsi	Tahun		
	2014	2018	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	0,74	0,49	0,29
Sumatera Utara	0,87	0,99	0,26
Sumatera Barat	1,57	2,12	0,39
Riau	4,25	3,20	1,39
Jambi	1,68	1,79	1,22
Sumatera Selatan	0,93	1,66	0,85
Bengkulu	0,98	0,53	1,25
Lampung	0,42	0,75	0,19
Kep. Bangka Belitung	1,57	0,51	0,51
Kepulauan Riau	2,41	3,13	1,17
DKI Jakarta	3,75	1,12	1,50
Jawa Barat	0,91	0,96	0,24
Jawa Tengah	0,45	0,43	0,14
DI Yogyakarta	1,14	1,14	0,68
Jawa Timur	0,80	0,77	0,44
Banten	0,84	0,39	0,52
Bali	0,98	1,26	0,28
Nusa Tenggara Barat	1,23	1,14	1,04
Nusa Tenggara Timur	3,00	2,98	1,88
Kalimantan Barat	1,09	1,78	0,74
Kalimantan Tengah	2,17	2,16	0,82
Kalimantan Selatan	0,90	1,59	0,80
Kalimantan Timur	1,07	1,16	0,96
Kalimantan Utara	2,09	2,07	0,83
Sulawesi Utara	0,93	0,60	0,60
Sulawesi Tengah	1,06	0,79	0,45
Sulawesi Selatan	1,06	0,92	0,43
Sulawesi Tenggara	0,40	0,64	0,13
Gorontalo	0,68	1,23	0,82
Sulawesi Barat	0,93	0,77	0,00
Maluku	0,83	1,53	0,56
Maluku Utara	0,59	1,84	0,17
Papua Barat	0,51	0,86	0,55
Papua	1,25	3,28	0,74
INDONESIA	1,06	1,25	0,55

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

Tabel 2.2.20 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perdagangan Orang Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021

Provinsi	Tahun		
	2014	2018	2021
	(1)	(2)	(4)
A c e h	0,03	0,05	0,00
Sumatera Utara	0,18	0,08	0,03
Sumatera Barat	-	0,08	0,08
Riau	0,11	0,32	0,00
Jambi	-	0,19	0,00
Sumatera Selatan	0,15	0,18	0,00
Bengkulu	0,13	0,07	0,00
Lampung	0,04	0,23	0,04
Kep. Bangka Belitung	0,52	1,02	0,25
Kepulauan Riau	0,48	0,48	0,23
DKI Jakarta	0,75	0,00	0,75
Jawa Barat	0,42	0,29	0,32
Jawa Tengah	0,13	0,04	0,01
DI Yogyakarta	-	0,00	0,00
Jawa Timur	0,13	0,16	0,08
Banten	0,13	0,39	0,13
Bali	0,14	0,00	0,00
Nusa Tenggara Barat	0,18	0,26	0,09
Nusa Tenggara Timur	0,43	0,81	0,06
Kalimantan Barat	0,33	0,00	0,14
Kalimantan Tengah	0,19	0,06	0,06
Kalimantan Selatan	-	0,05	0,05
Kalimantan Timur	-	0,10	0,00
Kalimantan Utara	0,21	0,00	0,00
Sulawesi Utara	0,33	0,33	0,11
Sulawesi Tengah	0,05	0,00	0,00
Sulawesi Selatan	0,13	0,07	0,03
Sulawesi Tenggara	0,04	0,00	0,00
Gorontalo	0,14	0,00	0,14
Sulawesi Barat	-	0,00	0,00
Maluku	0,09	0,08	0,00
Maluku Utara	-	0,00	0,00
Papua Barat	-	0,00	0,00
Papua	0,04	0,09	0,00
INDONESIA	0,15	0,15	0,06

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

Tabel 2.2.21 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Penyalahgunaan/Pengedaran Narkoba Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021

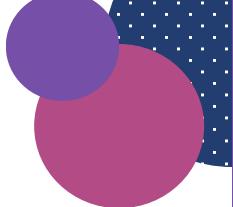
Provinsi	Tahun		
	2014	2018	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	7,80	18,62	8,63
Sumatera Utara	16,92	29,27	22,39
Sumatera Barat	14,67	37,73	31,93
Riau	17,17	36,43	29,10
Jambi	10,77	24,78	19,08
Sumatera Selatan	12,64	24,00	18,10
Bengkulu	4,83	7,60	9,11
Lampung	7,07	17,56	12,85
Kep. Bangka Belitung	15,22	28,64	21,88
Kepulauan Riau	6,51	15,14	6,78
DKI Jakarta	47,19	34,46	33,33
Jawa Barat	9,36	15,98	10,59
Jawa Tengah	3,07	5,78	3,69
DI Yogyakarta	8,45	16,67	16,44
Jawa Timur	7,52	17,42	13,71
Banten	9,99	16,69	11,86
Bali	4,75	9,08	7,96
Nusa Tenggara Barat	8,15	18,90	20,16
Nusa Tenggara Timur	0,55	0,27	0,35
Kalimantan Barat	2,89	11,28	7,68
Kalimantan Tengah	5,16	14,53	10,15
Kalimantan Selatan	15,54	33,62	16,94
Kalimantan Timur	14,42	29,00	24,19
Kalimantan Utara	6,68	19,50	11,83
Sulawesi Utara	1,36	3,05	1,58
Sulawesi Tengah	7,25	15,64	12,72
Sulawesi Selatan	4,22	16,60	11,14
Sulawesi Tenggara	1,10	3,57	3,42
Gorontalo	2,85	5,86	2,86
Sulawesi Barat	3,09	9,23	10,31
Maluku	1,38	2,26	1,60
Maluku Utara	1,76	2,34	1,83
Papua Barat	0,51	1,71	1,31
Papua	0,45	2,63	0,81
INDONESIA	7,22	14,99	10,72

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

Tabel 2.2.22 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Perjudian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021

Provinsi	Tahun		
	2014	2018	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	6,16	9,19	4,34
Sumatera Utara	27,28	31,75	20,01
Sumatera Barat	23,32	35,92	21,45
Riau	17,93	27,20	15,14
Jambi	10,12	19,01	10,12
Sumatera Selatan	21,10	20,29	11,73
Bengkulu	4,37	7,07	3,57
Lampung	14,93	20,57	9,27
Kep. Bangka Belitung	18,64	15,35	7,12
Kepulauan Riau	7,47	11,54	3,27
DKI Jakarta	31,09	13,11	9,36
Jawa Barat	11,61	13,03	9,64
Jawa Tengah	8,98	13,47	8,30
DI Yogyakarta	13,47	16,89	6,62
Jawa Timur	17,67	15,24	8,15
Banten	11,61	14,88	8,44
Bali	11,31	9,36	6,28
Nusa Tenggara Barat	17,35	17,94	14,60
Nusa Tenggara Timur	8,96	11,60	5,74
Kalimantan Barat	14,37	19,47	10,71
Kalimantan Tengah	15,93	13,77	6,73
Kalimantan Selatan	14,09	11,45	5,88
Kalimantan Timur	12,57	13,97	10,61
Kalimantan Utara	8,14	9,13	6,22
Sulawesi Utara	20,53	16,32	8,59
Sulawesi Tengah	16,97	14,70	6,04
Sulawesi Selatan	12,44	15,02	8,62
Sulawesi Tenggara	5,55	9,98	4,59
Gorontalo	15,76	15,67	10,35
Sulawesi Barat	14,66	9,23	4,77
Maluku	15,17	10,08	13,46
Maluku Utara	12,29	7,78	6,23
Papua Barat	3,64	3,07	4,13
Papua	7,31	10,59	4,82
INDONESIA	13,48	15,30	8,89

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021



https://www.bps.go.id

DATA POTENSI DESA KONFLIK MASSAL



Tabel 2.3.1 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia Menurut Beberapa Karakteristik Perkelahian Massal yang Terjadi, 2014, 2018, dan 2021

Kelompok/Jenis Kejadian	2014		2018		2021	
	N	%	N	%	N	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Keberadaan Kejadian Perkelahian Massal						
1 Ada kejadian	2 779	3,38	3 147	3,75	1 553	1,85
2 Tidak ada kejadian	79 411	96,47	80 784	96,25	82 543	98,15
Total desa/kelurahan	82 190	100,00	83 931	100,00	84 096	100,00
B Jenis Perkelahian Massal						
1 Antar Kelompok Warga	1 404	1,71	1 674	1,99	845	1,00
2 Warga Antar Desa/ Kelurahan	1 128	1,37	1 078	1,28	542	0,64
3 Warga dengan Aparat Keamanan	108	0,13	91	0,11	45	0,05
4 Warga dengan Aparat Keamanan	99	0,12	132	0,16	77	0,09
5 Antar Pelajar/Mahasiswa	327	0,40	548	0,65	188	0,22
6 Antar Suku	70	0,09	112	0,13	34	0,04
7 Lainnya	160	0,19	171	0,20	120	0,14
C Penyelesaian Perkelahian Massal						
1 Diselesaikan secara damai	2 564	92,26	2 961	94,09	1 483	95,49
2 Tidak dapat diselesaikan	215	7,74	186	5,91	70	4,51
Total desa/kelurahan yang ada kejadian perkelahian massal	2 779	100,00	3 147	100,00	1 553	100,00

Sumber: Diolah dari Podes 2014, 2018, dan 2021

Tabel 2.3.2 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Konflik Massal Selama Setahun yang Lalu Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021

Provinsi	2014		2018		2021	
	N	%	N	%	N	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	61	0,94	90	1,38	34	0,52
Sumatera Utara	118	1,93	176	2,87	84	1,37
Sumatera Barat	45	3,93	80	6,27	36	2,80
Riau	38	2,07	51	2,72	13	0,69
Jambi	40	2,58	41	2,62	24	1,54
Sumatera Selatan	67	2,07	37	1,13	20	0,61
Bengkulu	27	1,76	28	1,85	9	0,59
Lampung	34	1,29	44	1,66	6	0,23
Kep. Bangka Belitung	24	6,30	3	0,77	5	1,27
Kepulauan Riau	3	0,72	4	0,96	0	0,00
DKI Jakarta	72	26,97	55	20,60	47	17,60
Jawa Barat	259	4,34	291	4,89	158	2,65
Jawa Tengah	252	2,94	233	2,72	95	1,11
DI Yogyakarta	12	2,74	14	3,20	9	2,05
Jawa Timur	132	1,55	185	2,18	104	1,22
Banten	40	2,58	58	3,74	15	0,97
Bali	6	0,84	5	0,70	3	0,42
Nusa Tenggara Barat	76	6,66	81	7,09	22	1,91
Nusa Tenggara Timur	174	5,32	205	6,11	129	3,74
Kalimantan Barat	39	1,85	30	1,40	8	0,37
Kalimantan Tengah	36	2,29	13	0,83	17	1,08
Kalimantan Selatan	26	1,29	21	1,05	13	0,65
Kalimantan Timur	20	1,95	17	1,64	15	1,43
Kalimantan Utara	6	1,25	5	1,04	4	0,83
Sulawesi Utara	165	8,99	111	6,04	49	2,66
Sulawesi Tengah	149	7,50	98	4,85	36	1,78
Sulawesi Selatan	145	4,79	130	4,26	78	2,56
Sulawesi Tenggara	73	3,21	84	3,57	40	1,73
Gorontalo	24	3,26	18	2,45	10	1,36
Sulawesi Barat	14	2,16	15	2,31	1	0,15
Maluku	160	14,71	199	16,05	161	12,90
Maluku Utara	186	15,55	164	13,71	93	7,73
Papua Barat	59	3,77	114	5,74	75	3,78
Papua	197	4,04	447	8,05	140	2,52
INDONESIA	2 779	3,38	3 147	3,75	1 553	1,85

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

Tabel 2.3.3 Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2014

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal Yang Pernah Terjadi			
	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa	Warga dengan Aparat Keamanan	Warga dengan Aparat Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	26	24	1	2
Sumatera Utara	58	43	10	7
Sumatera Barat	29	10	5	-
Riau	14	13	3	1
Jambi	8	22	-	1
Sumatera Selatan	34	23	9	4
Bengkulu	7	8	-	-
Lampung	11	20	1	1
Kep. Bangka Belitung	12	11	-	1
Kepulauan Riau	2	-	-	-
DKI Jakarta	34	7	-	-
Jawa Barat	103	91	4	4
Jawa Tengah	120	120	4	5
DI Yogyakarta	5	4	-	-
Jawa Timur	62	51	3	2
Banten	14	12	1	-
Bali	3	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	33	42	4	2
Nusa Tenggara Timur	90	64	1	12
Kalimantan Barat	29	8	3	-
Kalimantan Tengah	27	1	1	-
Kalimantan Selatan	9	11	-	1
Kalimantan Timur	12	1	1	2
Kalimantan Utara	3	3	-	-
Sulawesi Utara	83	99	8	4
Sulawesi Tengah	54	102	2	1
Sulawesi Selatan	71	68	5	-
Sulawesi Tenggara	34	44	5	3
Gorontalo	14	7	2	4
Sulawesi Barat	6	8	-	-
Maluku	99	68	5	7
Maluku Utara	125	76	5	5
Papua Barat	36	23	6	2
Papua	137	44	19	28
INDONESIA	1 404	1 128	108	99

Sumber: Diolah dari Podes 2014

Tabel 2.3.3 Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2014 (lanjutan)

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal Yang Pernah Terjadi		
	Antar Pelajar/ Mahasiswa	Antar Suku	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)
A c e h	7	2	4
Sumatera Utara	8	2	11
Sumatera Barat	7	1	2
Riau	1	2	8
Jambi	10	1	2
Sumatera Selatan	7	-	4
Bengkulu	11	1	2
Lampung	1	2	3
Kep. Bangka Belitung	2	1	1
Kepulauan Riau	1	1	-
DKI Jakarta	47	-	2
Jawa Barat	89	3	19
Jawa Tengah	11	-	10
DI Yogyakarta	2	1	5
Jawa Timur	12	-	9
Banten	12	-	2
Bali	-	-	3
Nusa Tenggara Barat	9	3	3
Nusa Tenggara Timur	10	6	8
Kalimantan Barat	4	-	2
Kalimantan Tengah	6	-	4
Kalimantan Selatan	2	-	4
Kalimantan Timur	6	-	2
Kalimantan Utara	-	-	1
Sulawesi Utara	10	1	4
Sulawesi Tengah	3	2	8
Sulawesi Selatan	18	1	5
Sulawesi Tenggara	3	-	1
Gorontalo	3	-	1
Sulawesi Barat	-	-	-
Maluku	8	2	1
Maluku Utara	7	2	13
Papua Barat	1	4	3
Papua	9	32	13
INDONESIA	327	70	160

Sumber: Diolah dari Podes 2014

Tabel 2.3.4 Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2018

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal Yang Pernah Terjadi			
	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa	Warga dengan Aparat Keamanan	Warga dengan Aparat Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	43	39	4	8
Sumatera Utara	95	64	3	9
Sumatera Barat	27	14	1	-
Riau	17	18	3	3
Jambi	7	22	-	2
Sumatera Selatan	16	11	2	-
Bengkulu	8	8	-	1
Lampung	21	16	1	1
Kep. Bangka Belitung	1	-	-	-
Kepulauan Riau	1	1	1	-
DKI Jakarta	32	18	-	-
Jawa Barat	122	60	4	8
Jawa Tengah	107	99	1	2
DI Yogyakarta	5	1	-	-
Jawa Timur	82	58	7	3
Banten	25	20	1	2
Bali	5	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	36	48	3	2
Nusa Tenggara Timur	123	78	3	4
Kalimantan Barat	16	9	-	1
Kalimantan Tengah	8	4	-	-
Kalimantan Selatan	9	12	3	2
Kalimantan Timur	7	3	-	-
Kalimantan Utara	2	1	-	-
Sulawesi Utara	65	50	4	6
Sulawesi Tengah	46	50	-	-
Sulawesi Selatan	71	39	2	1
Sulawesi Tenggara	34	46	1	-
Gorontalo	4	11	1	1
Sulawesi Barat	13	2	1	-
Maluku	117	80	10	13
Maluku Utara	71	85	6	11
Papua Barat	85	28	8	8
Papua	353	83	21	44
INDONESIA	1 674	1 078	91	132

Sumber: Diolah dari Podes 2018

Tabel 2.3.4 Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2018 (lanjutan)

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal Yang Pernah Terjadi		
	Antar Pelajar/ Mahasiswa	Antar Suku	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)
A c e h	10	2	6
Sumatera Utara	25	-	12
Sumatera Barat	41	1	5
Riau	18	-	2
Jambi	11	1	4
Sumatera Selatan	9	-	4
Bengkulu	10	-	2
Lampung	6	-	4
Kep. Bangka Belitung	1	1	-
Kepulauan Riau	1	-	-
DKI Jakarta	18	-	-
Jawa Barat	118	5	21
Jawa Tengah	36	-	15
DI Yogyakarta	5	1	2
Jawa Timur	18	3	28
Banten	14	1	4
Bali	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	12	-	-
Nusa Tenggara Timur	37	5	10
Kalimantan Barat	3	-	3
Kalimantan Tengah	1	-	-
Kalimantan Selatan	1	-	1
Kalimantan Timur	6	-	2
Kalimantan Utara	-	-	2
Sulawesi Utara	9	-	5
Sulawesi Tengah	13	-	2
Sulawesi Selatan	33	2	4
Sulawesi Tenggara	15	-	4
Gorontalo	3	-	-
Sulawesi Barat	2	-	-
Maluku	29	1	3
Maluku Utara	26	1	2
Papua Barat	8	12	4
Papua	9	76	20
INDONESIA	548	112	171

Sumber: Diolah dari Podes 2018

Tabel 2.3.5 Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2021

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal Yang Pernah Terjadi			
	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa	Warga dengan Aparat Keamanan	Warga dengan Aparat Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	12	18	0	1
Sumatera Utara	38	17	2	3
Sumatera Barat	14	13	0	3
Riau	9	3	0	0
Jambi	5	14	0	0
Sumatera Selatan	9	5	1	2
Bengkulu	3	1	1	0
Lampung	5	1	1	1
Kep. Bangka Belitung	4	0	1	1
Kepulauan Riau	-	-	-	-
DKI Jakarta	24	7	1	1
Jawa Barat	83	45	2	1
Jawa Tengah	50	29	1	0
DI Yogyakarta	6	2	0	0
Jawa Timur	49	34	3	2
Banten	6	9	0	0
Bali	1	2	0	0
Nusa Tenggara Barat	9	14	0	2
Nusa Tenggara Timur	78	38	4	4
Kalimantan Barat	5	1	0	0
Kalimantan Tengah	14	1	1	0
Kalimantan Selatan	8	5	0	0
Kalimantan Timur	8	4	0	0
Kalimantan Utara	2	1	0	1
Sulawesi Utara	24	31	0	0
Sulawesi Tengah	17	16	1	0
Sulawesi Selatan	39	36	1	3
Sulawesi Tenggara	24	19	0	1
Gorontalo	7	6	0	2
Sulawesi Barat	1	0	0	0
Maluku	87	77	6	16
Maluku Utara	54	40	1	5
Papua Barat	56	23	6	6
Papua	94	30	12	22
INDONESIA	845	542	45	77

Sumber: Diolah dari Podes 2021

Tabel 2.3.5 Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2021 (lanjutan)

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal Yang Pernah Terjadi		
	Antar Pelajar/ Mahasiswa	Antar Suku	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)
A c e h	7	0	2
Sumatera Utara	15	0	17
Sumatera Barat	7	0	4
Riau	0	1	2
Jambi	5	0	0
Sumatera Selatan	5	0	1
Bengkulu	3	0	1
Lampung	1	0	1
Kep. Bangka Belitung	0	0	0
Kepulauan Riau	-	-	-
DKI Jakarta	13	0	5
Jawa Barat	37	1	19
Jawa Tengah	10	0	10
DI Yogyakarta	1	0	0
Jawa Timur	11	1	18
Banten	0	0	0
Bali	0	0	0
Nusa Tenggara Barat	4	0	1
Nusa Tenggara Timur	14	5	8
Kalimantan Barat	1	0	1
Kalimantan Tengah	0	0	1
Kalimantan Selatan	2	0	0
Kalimantan Timur	3	1	2
Kalimantan Utara	0	0	0
Sulawesi Utara	3	0	2
Sulawesi Tengah	5	0	4
Sulawesi Selatan	7	0	1
Sulawesi Tenggara	2	1	0
Gorontalo	0	0	0
Sulawesi Barat	0	0	1
Maluku	15	2	3
Maluku Utara	11	0	2
Papua Barat	3	5	4
Papua	3	17	10
INDONESIA	188	34	120

Sumber: Diolah dari Podes 2021

Tabel 2.3.6 Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2014

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal Yang Pernah Terjadi			
	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa	Warga dengan Aparat Keamanan	Warga dengan Aparat Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	0,40	0,37	0,02	0,03
Sumatera Utara	0,95	0,70	0,16	0,11
Sumatera Barat	2,53	0,87	0,44	-
Riau	0,76	0,71	0,16	0,05
Jambi	0,52	1,42	-	0,06
Sumatera Selatan	1,05	0,71	0,28	0,12
Bengkulu	0,46	0,52	-	-
Lampung	0,42	0,76	0,04	0,04
Kep. Bangka Belitung	3,15	2,89	-	0,26
Kepulauan Riau	0,48	-	-	-
DKI Jakarta	12,73	2,62	-	-
Jawa Barat	1,73	1,53	0,07	0,07
Jawa Tengah	1,40	1,40	0,05	0,06
DI Yogyakarta	1,14	0,91	-	-
Jawa Timur	0,73	0,60	0,04	0,02
Banten	0,90	0,77	0,06	-
Bali	0,42	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	2,89	3,68	0,35	0,18
Nusa Tenggara Timur	2,75	1,96	0,03	0,37
Kalimantan Barat	1,38	0,38	0,14	-
Kalimantan Tengah	1,72	0,06	0,06	-
Kalimantan Selatan	0,45	0,55	-	0,05
Kalimantan Timur	1,17	0,10	0,10	0,19
Kalimantan Utara	0,63	0,63	-	-
Sulawesi Utara	4,52	5,39	0,44	0,22
Sulawesi Tengah	2,72	5,14	0,10	0,05
Sulawesi Selatan	2,34	2,24	0,17	-
Sulawesi Tenggara	1,50	1,94	0,22	0,13
Gorontalo	1,90	0,95	0,27	0,54
Sulawesi Barat	0,93	1,23	-	-
Maluku	9,10	6,25	0,46	0,64
Maluku Utara	10,45	6,35	0,42	0,42
Papua Barat	2,30	1,47	0,38	0,13
Papua	2,81	0,90	0,39	0,57
INDONESIA	1,71	1,37	0,13	0,12

Sumber: Diolah dari Podes 2014

Tabel 2.3.6 Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2014 (lanjutan)

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal Yang Pernah Terjadi		
	Antar Pelajar/ Mahasiswa	Antar Suku	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)
A c e h	0,11	0,03	0,06
Sumatera Utara	0,13	0,03	0,18
Sumatera Barat	0,61	0,09	0,17
Riau	0,05	0,11	0,44
Jambi	0,64	0,06	0,13
Sumatera Selatan	0,22	-	0,12
Bengkulu	0,72	0,07	0,13
Lampung	0,04	0,08	0,11
Kep. Bangka Belitung	0,52	0,26	0,26
Kepulauan Riau	0,24	0,24	-
DKI Jakarta	17,60	-	0,75
Jawa Barat	1,49	0,05	0,32
Jawa Tengah	0,13	-	0,12
DI Yogyakarta	0,46	0,23	1,14
Jawa Timur	0,14	-	0,11
Banten	0,77	-	0,13
Bali	-	-	0,42
Nusa Tenggara Barat	0,79	0,26	0,26
Nusa Tenggara Timur	0,31	0,18	0,24
Kalimantan Barat	0,19	-	0,09
Kalimantan Tengah	0,38	-	0,25
Kalimantan Selatan	0,10	-	0,20
Kalimantan Timur	0,58	-	0,19
Kalimantan Utara	-	-	0,21
Sulawesi Utara	0,54	0,05	0,22
Sulawesi Tengah	0,15	0,10	0,40
Sulawesi Selatan	0,59	0,03	0,17
Sulawesi Tenggara	0,13	-	0,04
Gorontalo	0,41	-	0,14
Sulawesi Barat	-	-	-
Maluku	0,74	0,18	0,09
Maluku Utara	0,59	0,17	1,09
Papua Barat	0,06	0,26	0,19
Papua	0,18	0,66	0,27
INDONESIA	0,40	0,09	0,19

Sumber: Diolah dari Podes 2014

Tabel 2.3.7 Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2018

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal Yang Pernah Terjadi			
	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa	Warga dengan Aparat Keamanan	Warga dengan Aparat Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	0,66	0,60	0,06	0,12
Sumatera Utara	1,55	1,04	0,05	0,15
Sumatera Barat	2,12	1,10	0,08	-
Riau	0,91	0,96	0,16	0,16
Jambi	0,45	1,41	-	0,13
Sumatera Selatan	0,49	0,34	0,06	-
Bengkulu	0,53	0,53	-	0,07
Lampung	0,79	0,60	0,04	0,04
Kep. Bangka Belitung	0,26	-	-	-
Kepulauan Riau	0,24	0,24	0,24	-
DKI Jakarta	11,99	6,74	-	-
Jawa Barat	2,05	1,01	0,07	0,13
Jawa Tengah	1,25	1,16	0,01	0,02
DI Yogyakarta	1,14	0,23	-	-
Jawa Timur	0,97	0,68	0,08	0,04
Banten	1,61	1,29	0,06	0,13
Bali	0,70	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	3,15	4,20	0,26	0,17
Nusa Tenggara Timur	3,67	2,33	0,09	0,12
Kalimantan Barat	0,75	0,42	-	0,05
Kalimantan Tengah	0,51	0,25	-	-
Kalimantan Selatan	0,45	0,60	0,15	0,10
Kalimantan Timur	0,67	0,29	-	-
Kalimantan Utara	0,41	0,21	-	-
Sulawesi Utara	3,54	2,72	0,22	0,33
Sulawesi Tengah	2,28	2,48	-	-
Sulawesi Selatan	2,33	1,28	0,07	0,03
Sulawesi Tenggara	1,44	1,95	0,04	-
Gorontalo	0,54	1,50	0,14	0,14
Sulawesi Barat	2,00	0,31	0,15	-
Maluku	9,44	6,45	0,81	1,05
Maluku Utara	5,94	7,11	0,50	0,92
Papua Barat	4,28	1,41	0,40	0,40
Papua	6,36	1,49	0,38	0,79
INDONESIA	1,99	1,28	0,11	0,16

Sumber: Diolah dari Podes 2018

Tabel 2.3.7 Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2018 (lanjutan)

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal Yang Pernah Terjadi		
	Antar Pelajar/ Mahasiswa	Antar Suku	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)
A c e h	0,15	0,03	0,09
Sumatera Utara	0,41	-	0,20
Sumatera Barat	3,22	0,08	0,39
Riau	0,96	-	0,11
Jambi	0,70	0,06	0,26
Sumatera Selatan	0,28	-	0,12
Bengkulu	0,66	-	0,13
Lampung	0,23	-	0,15
Kep. Bangka Belitung	0,26	0,26	-
Kepulauan Riau	0,24	-	-
DKI Jakarta	6,74	-	-
Jawa Barat	1,98	0,08	0,35
Jawa Tengah	0,42	-	0,18
DI Yogyakarta	1,14	0,23	0,46
Jawa Timur	0,21	0,04	0,33
Banten	0,90	0,06	0,26
Bali	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	1,05	-	-
Nusa Tenggara Timur	1,10	0,15	0,30
Kalimantan Barat	0,14	-	0,14
Kalimantan Tengah	0,06	-	-
Kalimantan Selatan	0,05	-	0,05
Kalimantan Timur	0,58	-	0,19
Kalimantan Utara	-	-	0,41
Sulawesi Utara	0,49	-	0,27
Sulawesi Tengah	0,64	-	0,10
Sulawesi Selatan	1,08	0,07	0,13
Sulawesi Tenggara	0,64	-	0,17
Gorontalo	0,41	-	-
Sulawesi Barat	0,31	-	-
Maluku	2,34	0,08	0,24
Maluku Utara	2,17	0,08	0,17
Papua Barat	0,40	0,60	0,20
Papua	0,16	1,37	0,36
INDONESIA	0,65	0,13	0,20

Sumber: Diolah dari Podes 2018

Tabel 2.3.8 Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2021

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal Yang Pernah Terjadi			
	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa	Warga dengan Aparat Keamanan	Warga dengan Aparat Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	0,18	0,28	0,00	0,02
Sumatera Utara	0,62	0,28	0,03	0,05
Sumatera Barat	1,09	1,01	0,00	0,23
Riau	0,48	0,16	0,00	0,00
Jambi	0,32	0,90	0,00	0,00
Sumatera Selatan	0,27	0,15	0,03	0,06
Bengkulu	0,20	0,07	0,07	0,00
Lampung	0,19	0,04	0,04	0,04
Kep. Bangka Belitung	1,02	0,00	0,25	0,25
Kepulauan Riau	-	-	-	-
DKI Jakarta	8,99	2,62	0,37	0,37
Jawa Barat	1,39	0,76	0,03	0,02
Jawa Tengah	0,58	0,34	0,01	0,00
DI Yogyakarta	1,37	0,46	0,00	0,00
Jawa Timur	0,58	0,40	0,04	0,02
Banten	0,39	0,58	0,00	0,00
Bali	0,14	0,28	0,00	0,00
Nusa Tenggara Barat	0,78	1,22	0,00	0,17
Nusa Tenggara Timur	2,26	1,10	0,12	0,12
Kalimantan Barat	0,23	0,05	0,00	0,00
Kalimantan Tengah	0,89	0,06	0,06	0,00
Kalimantan Selatan	0,40	0,25	0,00	0,00
Kalimantan Timur	0,76	0,38	0,00	0,00
Kalimantan Utara	0,41	0,21	0,00	0,21
Sulawesi Utara	1,30	1,68	0,00	0,00
Sulawesi Tengah	0,84	0,79	0,05	0,00
Sulawesi Selatan	1,28	1,18	0,03	0,10
Sulawesi Tenggara	1,04	0,82	0,00	0,04
Gorontalo	0,95	0,82	0,00	0,27
Sulawesi Barat	0,15	0,00	0,00	0,00
Maluku	6,97	6,17	0,48	1,28
Maluku Utara	4,49	3,33	0,08	0,42
Papua Barat	2,82	1,16	0,30	0,30
Papua	1,69	0,54	0,22	0,40
INDONESIA	1,00	0,64	0,05	0,09

Sumber: Diolah dari Podes 2021

Tabel 2.3.8 Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2021 (lanjutan)

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal Yang Pernah Terjadi		
	Antar Pelajar/ Mahasiswa	Antar Suku	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)
A c e h	0,11	0,00	0,03
Sumatera Utara	0,24	0,00	0,28
Sumatera Barat	0,54	0,00	0,31
Riau	0,00	0,05	0,11
Jambi	0,32	0,00	0,00
Sumatera Selatan	0,15	0,00	0,03
Bengkulu	0,20	0,00	0,07
Lampung	0,04	0,00	0,04
Kep. Bangka Belitung	0,00	0,00	0,00
Kepulauan Riau	-	-	-
DKI Jakarta	4,87	0,00	1,87
Jawa Barat	0,62	0,02	0,32
Jawa Tengah	0,12	0,00	0,12
DI Yogyakarta	0,23	0,00	0,00
Jawa Timur	0,13	0,01	0,21
Banten	0,00	0,00	0,00
Bali	0,00	0,00	0,00
Nusa Tenggara Barat	0,35	0,00	0,09
Nusa Tenggara Timur	0,41	0,14	0,23
Kalimantan Barat	0,05	0,00	0,05
Kalimantan Tengah	0,00	0,00	0,06
Kalimantan Selatan	0,10	0,00	0,00
Kalimantan Timur	0,29	0,10	0,19
Kalimantan Utara	0,00	0,00	0,00
Sulawesi Utara	0,16	0,00	0,11
Sulawesi Tengah	0,25	0,00	0,20
Sulawesi Selatan	0,23	0,00	0,03
Sulawesi Tenggara	0,09	0,04	0,00
Gorontalo	0,00	0,00	0,00
Sulawesi Barat	0,00	0,00	0,15
Maluku	1,20	0,16	0,24
Maluku Utara	0,91	0,00	0,17
Papua Barat	0,15	0,25	0,20
Papua	0,05	0,31	0,18
INDONESIA	0,22	0,04	0,14

Sumber: Diolah dari Podes 2021

Tabel 2.3.9 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal dan Mampu Menyelesaiakannya Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021

Provinsi	2014		2018		2021	
	N	%	N	%	N	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	54	88,52	70	77,78	33	97,06
Sumatera Utara	103	87,29	170	96,59	82	97,62
Sumatera Barat	44	97,78	72	90,00	34	94,44
Riau	32	84,21	44	86,27	13	100,00
Jambi	39	97,50	38	92,68	23	95,83
Sumatera Selatan	62	92,54	33	89,19	19	95,00
Bengkulu	24	88,89	28	100,00	9	100,00
Lampung	30	88,24	41	93,18	6	100,00
Kep. Bangka Belitung	24	100,00	3	100,00	5	100,00
Kepulauan Riau	2	66,67	4	100,00	-	-
DKI Jakarta	69	95,83	52	94,55	45	95,74
Jawa Barat	246	94,98	280	96,22	146	92,41
Jawa Tengah	237	94,05	226	96,58	94	98,95
DI Yogyakarta	12	100,00	14	100,00	8	88,89
Jawa Timur	121	91,67	179	96,76	101	97,12
Banten	36	90,00	56	96,55	15	100,00
Bali	5	83,33	4	80,00	3	100,00
Nusa Tenggara Barat	73	96,05	78	96,30	22	100,00
Nusa Tenggara Timur	143	82,18	184	89,76	117	90,70
Kalimantan Barat	38	97,44	28	93,33	8	100,00
Kalimantan Tengah	33	91,67	14	100,00	16	94,12
Kalimantan Selatan	24	92,31	18	85,71	13	100,00
Kalimantan Timur	15	75,00	18	105,88	14	93,33
Kalimantan Utara	6	100,00	4	80,00	4	100,00
Sulawesi Utara	151	91,52	106	95,50	45	91,84
Sulawesi Tengah	142	95,30	96	97,96	36	100,00
Sulawesi Selatan	140	96,55	118	90,77	78	100,00
Sulawesi Tenggara	68	93,15	80	95,24	39	97,50
Gorontalo	19	79,17	18	100,00	10	100,00
Sulawesi Barat	10	71,43	14	93,33	1	100,00
Maluku	147	91,88	185	92,96	153	95,03
Maluku Utara	178	95,70	157	95,73	89	95,70
Papua Barat	56	94,92	106	92,98	72	96,00
Papua	181	91,88	426	95,30	130	92,86
INDONESIA	2 564	92,26	2 964	94,13	1 483	95,49

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

DATA POTENSI DESA UPAYA MENJAGA KEAMANAN



Tabel 2.4.1 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya yang Dilakukan Warganya untuk Menjaga Keamanan, 2014, 2018, dan 2021

Jenis Upaya yang Dilakukan untuk Menjaga Keamanan	2014		2018		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1, Membangun Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling)	41 611	50,63	46 752	55,70	45 600	54,22
2, Membentuk Regu Keamanan Lingkungan	35 629	43,35	39 585	47,16	40 043	47,62
3, Menambah Jumlah Anggota Hansip	19 299	23,48	20 869	24,86	13 374	15,90
4, Pelaporan Tamu yang Menginap Lebih dari 24 Jam ke Aparat Lingkungan	48 357	58,84	52 240	62,24	58 728	69,83
5, Pengaktifan Sistem Keamanan Lingkungan dari Inisiatif Warga *)	-	-	44 451	52,96	46 014	54,72

Sumber: Diolah dari Podes 2014, 2018, dan 2021

Catatan: *) Pengaktifan sistem keamanan lingkungan dari inisiatif warga baru tersedia pada Podes 2018 dan 2021

Tabel 2.4.2 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan, 2014

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan			
	Membangun Poskamling	Membentuk Regu Kamling	Menambah Anggota Hansip	Pelaporan Tamu Menginap (1x24 jam)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	2 819	1927	656	5 375
Sumatera Utara	1 368	1 056	324	2 248
Sumatera Barat	813	563	236	770
Riau	1 083	915	357	1 118
Jambi	1 010 ^r	750	328	1 002
Sumatera Selatan	1 902	1 636	738	2 044
Bengkulu	1 118	1 019	402	1 003
Lampung	2 032	1 933	1 118	1 982
Kep. Bangka Belitung	210	157	113	272
Kepulauan Riau	193	176	165	294
DKI Jakarta	227	223	138	245
Jawa Barat	4 976	4 610 ^r	2 445	5 029
Jawa Tengah	5 098	4 595	2 269	6 218
DI Yogyakarta	365	310	195	329
Jawa Timur	5 171	4 469	2 890 ^r	6 268
Banten	1 181	906	497	1 044
Bali	374	445	97	499
Nusa Tenggara Barat	826	677	324	597
Nusa Tenggara Timur	772	858	622	746
Kalimantan Barat	548	488	433	952
Kalimantan Tengah	991	734	467	1 035
Kalimantan Selatan	1 167	640	368	1 124
Kalimantan Timur	758	664	351	796
Kalimantan Utara	177	134	73	250
Sulawesi Utara	1 090 ^r	1 166	611	1 517
Sulawesi Tengah	1 105	1 129	612	1 296
Sulawesi Selatan	1 941	1 256	792	1 322
Sulawesi Tenggara	1 040 ^r	802	403	885
Gorontalo	253	401	254	483
Sulawesi Barat	342	227	173	258
Maluku	183	200	188	470
Maluku Utara	159	197	183	450
Papua Barat	132	145	143	213
Papua	187	221	334	223
INDONESIA	41 611	35 629	19 299	48 357

Sumber: Diolah dari Podes 2014

Tabel 2.4.3 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan, 2018

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan		
	Membangun Poskamling	Membentuk Regu Kamling	Menambah Anggota Hansip
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	2 329	1 404	614
Sumatera Utara	1 903	1 396	594
Sumatera Barat	971	723	351
Riau	1 196	985	416
Jambi	1 112	749	426
Sumatera Selatan	2 243	2 003	917
Bengkulu	1 051	888	323
Lampung	2 198	2 071	863
Kep. Bangka Belitung	245	209	128
Kepulauan Riau	194	181	108
DKI Jakarta	190	199	125
Jawa Barat	5 409	4 709	2 375
Jawa Tengah	5 999	5 140	2 511
DI Yogyakarta	392	347	222
Jawa Timur	6 321	5 245	3 086
Banten	1 280	1 035	602
Bali	395	380	123
Nusa Tenggara Barat	916	724	400
Nusa Tenggara Timur	1 085	1 244	867
Kalimantan Barat	963	838	521
Kalimantan Tengah	1 042	911	464
Kalimantan Selatan	1 243	799	425
Kalimantan Timur	744	594	267
Kalimantan Utara	241	177	101
Sulawesi Utara	1 167	1 136	429
Sulawesi Tengah	1 168	1 155	518
Sulawesi Selatan	1 896	1 325	825
Sulawesi Tenggara	1 055	901	522
Gorontalo	254	281	255
Sulawesi Barat	358	230	168
Maluku	252	316	226
Maluku Utara	248	348	317
Papua Barat	251	295	185
Papua	441	647	595
INDONESIA	46 752	39 585	20 869

Sumber: Diolah dari Podes 2018

Tabel 2.4.3 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan, 2018 (lanjutan)

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan	
	Pelaporan Tamu Menginap (1x24 jam)	Pengaktifan Sistem Keamanan Lingkungan dari Inisiatif Warga
(1)	(5)	(6)
A c e h	5 083	2 356
Sumatera Utara	2 516	1 987
Sumatera Barat	962	866
Riau	1 292	1 071
Jambi	1 029	887
Sumatera Selatan	2 201	1 994
Bengkulu	1 089	829
Lampung	2 114	1 974
Kep. Bangka Belitung	304	191
Kepulauan Riau	309	205
DKI Jakarta	242	226
Jawa Barat	5 134	4 970
Jawa Tengah	6 437	6 337
DI Yogyakarta	376	388
Jawa Timur	6 614	5 824
Banten	1 258	1 197
Bali	556	426
Nusa Tenggara Barat	634	799
Nusa Tenggara Timur	979	1 440
Kalimantan Barat	1 208	854
Kalimantan Tengah	1 028	735
Kalimantan Selatan	1 240	979
Kalimantan Timur	742	579
Kalimantan Utara	286	212
Sulawesi Utara	1 636	1 230
Sulawesi Tengah	1 347	974
Sulawesi Selatan	1 623	1 606
Sulawesi Tenggara	947	947
Gorontalo	500	213
Sulawesi Barat	314	290
Maluku	647	415
Maluku Utara	723	395
Papua Barat	239	334
Papua	631	721
INDONESIA	52 240	44 451

Sumber: Diolah dari Podes 2018

Tabel 2.4.4 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan, 2021

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan		
	Membangun Poskamling	Membentuk Regu Kamling	Menambah Anggota Hansip
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	1 921	1 061	281
Sumatera Utara	2 006	1 424	425
Sumatera Barat	822	621	167
Riau	1 055	918	244
Jambi	962	795	239
Sumatera Selatan	2 229	2 039	490
Bengkulu	681	731	184
Lampung	1 959	1 951	393
Kep. Bangka Belitung	186	21	49
Kepulauan Riau	179	184	103
DKI Jakarta	205	211	90
Jawa Barat	5 218	4 750	1 623
Jawa Tengah	6 447	5 960	2 063
DI Yogyakarta	375	355	161
Jawa Timur	6 588	5 759	2 266
Banten	1 246	1 049	318
Bali	383	401	120
Nusa Tenggara Barat	823	761	321
Nusa Tenggara Timur	1 137	1 326	383
Kalimantan Barat	1 318	1 087	403
Kalimantan Tengah	983	839	258
Kalimantan Selatan	1 015	656	181
Kalimantan Timur	770	630	218
Kalimantan Utara	249	190	49
Sulawesi Utara	1 254	1 193	401
Sulawesi Tengah	1 151	1 051	270
Sulawesi Selatan	1 571	1 094	362
Sulawesi Tenggara	912	691	221
Gorontalo	248	277	100
Sulawesi Barat	329	236	94
Maluku	407	494	297
Maluku Utara	256	312	183
Papua Barat	258	281	104
Papua	457	495	313
INDONESIA	45 600	40 043	13 374

Sumber: Diolah dari Podes 2021

Tabel 2.4.4 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan, 2021 (lanjutan)

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan	
	Pelaporan Tamu Menginap (1x24 jam)	Pengaktifan Sistem Keamanan Lingkungan dari Inisiatif Warga
(1)	(5)	(6)
A c e h	5 692	2 237
Sumatera Utara	3 356	1 951
Sumatera Barat	908	852
Riau	1 477	1 141
Jambi	1 196	965
Sumatera Selatan	2 659	2 177
Bengkulu	1 107	627
Lampung	2 378	2 030
Kep. Bangka Belitung	329	154
Kepulauan Riau	330	205
DKI Jakarta	250	253
Jawa Barat	5 557	5 239
Jawa Tengah	7 333	7 087
DI Yogyakarta	405	418
Jawa Timur	7 186	6 703
Banten	1 357	1 355
Bali	627	436
Nusa Tenggara Barat	694	846
Nusa Tenggara Timur	1 220	1 314
Kalimantan Barat	1 473	1 005
Kalimantan Tengah	1 156	720
Kalimantan Selatan	1 347	912
Kalimantan Timur	851	626
Kalimantan Utara	339	243
Sulawesi Utara	1 680	1 209
Sulawesi Tengah	1 487	878
Sulawesi Selatan	1 882	1 478
Sulawesi Tenggara	1 058	776
Gorontalo	592	268
Sulawesi Barat	359	255
Maluku	764	485
Maluku Utara	762	346
Papua Barat	379	328
Papua	538	495
INDONESIA	58 728	46 014

Sumber: Diolah dari Podes 2021

Tabel 2.4.5 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan, 2014

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan			
	Membangun Poskamling	Membentuk Regu Kamling	Menambah Anggota Hansip	Pelaporan Tamu Menginap (1x24 jam)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	43,29	29,59	10,07	82,54
Sumatera Utara	22,41	17,30	5,31	36,83
Sumatera Barat	71,00	49,17	20,61	67,25
Riau	59,02	49,86	19,46	60,93
Jambi	65,12	48,36	21,15	64,60
Sumatera Selatan	58,76	50,54	22,80	63,14
Bengkulu	72,98	66,51	26,24	65,47
Lampung	77,20	73,44	42,48	75,30
Kep. Bangka Belitung	55,12	41,21	29,66	71,39
Kepulauan Riau	46,51	42,41	39,76	70,84
DKI Jakarta	85,02	83,52	51,69	91,76
Jawa Barat	83,46	77,32	41,01	84,35
Jawa Tengah	59,43	53,57	26,45	72,49
DI Yogyakarta	83,33	70,78	44,52	75,11
Jawa Timur	60,82	52,56	33,99	73,72
Banten	76,14	58,41	32,04	67,31
Bali	52,23	62,15	13,55	69,69
Nusa Tenggara Barat	72,39	59,33	28,40	52,32
Nusa Tenggara Timur	23,61	26,24	19,02	22,81
Kalimantan Barat	25,98	23,14	20,53	45,14
Kalimantan Tengah	63,16	46,78	29,76	65,97
Kalimantan Selatan	58,12	31,87	18,33	55,98
Kalimantan Timur	73,88	64,72	34,21	77,58
Kalimantan Utara	36,95	27,97	15,24	52,19
Sulawesi Utara	59,37	63,51	33,28	82,63
Sulawesi Tengah	55,64	56,85	30,82	65,26
Sulawesi Selatan	64,06	41,45	26,14	43,63
Sulawesi Tenggara	45,77	35,30	17,74	38,95
Gorontalo	34,38	54,48	34,51	65,63
Sulawesi Barat	52,78	35,03	26,70	39,81
Maluku	16,82	18,38	17,28	43,20
Maluku Utara	13,29	16,47	15,30	37,63
Papua Barat	8,42	9,25	9,13	13,59
Papua	3,84	4,54	6,86	4,58
INDONESIA	50,63	43,35	23,48	58,84

Sumber: Diolah dari Podes 2014

Tabel 2.4.6 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan, 2018

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan		
	Membangun Poskamling	Membentuk Regu Kamling	Menambah Anggota Hansip
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	35,79	21,57	9,43
Sumatera Utara	31,03	22,77	9,69
Sumatera Barat	76,16	56,71	27,53
Riau	63,79	52,53	22,19
Jambi	71,19	47,95	27,27
Sumatera Selatan	68,76	61,40	28,11
Bengkulu	69,42	58,65	21,33
Lampung	82,82	78,03	32,52
Kep. Bangka Belitung	62,66	53,45	32,74
Kepulauan Riau	46,63	43,51	25,96
DKI Jakarta	71,16	74,53	46,82
Jawa Barat	90,80	79,05	39,87
Jawa Tengah	70,09	60,05	29,34
DI Yogyakarta	89,50	79,22	50,68
Jawa Timur	74,40	61,73	36,32
Banten	82,47	66,69	38,79
Bali	55,17	53,07	17,18
Nusa Tenggara Barat	80,14	63,34	35,00
Nusa Tenggara Timur	32,36	37,10	25,86
Kalimantan Barat	45,06	39,21	24,38
Kalimantan Tengah	66,12	57,80	29,44
Kalimantan Selatan	61,90	39,79	21,17
Kalimantan Timur	71,68	57,23	25,72
Kalimantan Utara	50,00	36,72	20,95
Sulawesi Utara	63,49	61,81	23,34
Sulawesi Tengah	57,82	57,18	25,64
Sulawesi Selatan	62,18	43,46	27,06
Sulawesi Tenggara	44,82	38,28	22,18
Gorontalo	34,60	38,28	34,74
Sulawesi Barat	55,08	35,38	25,85
Maluku	20,32	25,48	18,23
Maluku Utara	20,74	29,10	26,51
Papua Barat	12,63	14,85	9,31
Papua	7,94	11,65	10,72
INDONESIA	55,70	47,16	24,86

Sumber: Diolah dari Podes 2018

Tabel 2.4.6 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan, 2018 (lanjutan)

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan	
	Pelaporan Tamu Menginap (1x24 jam)	Pengaktifan Sistem Keamanan Lingkungan dari Inisiatif Warga
	(1)	(5)
Aceh	78,10	36,20
Sumatera Utara	41,03	32,40
Sumatera Barat	75,45	67,92
Riau	68,91	57,12
Jambi	65,88	56,79
Sumatera Selatan	67,47	61,13
Bengkulu	71,93	54,76
Lampung	79,65	74,38
Kep. Bangka Belitung	77,75	48,85
Kepulauan Riau	74,28	49,28
DKI Jakarta	90,64	84,64
Jawa Barat	86,18	83,43
Jawa Tengah	75,21	74,04
DI Yogyakarta	85,84	88,58
Jawa Timur	77,85	68,55
Banten	81,06	77,13
Bali	77,65	59,50
Nusa Tenggara Barat	55,47	69,90
Nusa Tenggara Timur	29,20	42,95
Kalimantan Barat	56,53	39,96
Kalimantan Tengah	65,23	46,64
Kalimantan Selatan	61,75	48,75
Kalimantan Timur	71,48	55,78
Kalimantan Utara	59,34	43,98
Sulawesi Utara	89,01	66,92
Sulawesi Tengah	66,68	48,22
Sulawesi Selatan	53,23	52,67
Sulawesi Tenggara	40,23	40,23
Gorontalo	68,12	29,02
Sulawesi Barat	48,31	44,62
Maluku	52,18	33,47
Maluku Utara	60,45	33,03
Papua Barat	12,03	16,81
Papua	11,37	12,99
INDONESIA	62,24	52,96

Sumber: Diolah dari Podes 2018

Tabel 2.4.7 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan, 2021

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan		
	Membangun Poskamling	Membentuk Regu Kamling	Menambah Anggota Hansip
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	29,49	16,29	4,31
Sumatera Utara	32,71	23,22	6,93
Sumatera Barat	63,87	48,25	12,98
Riau	56,24	48,93	13,01
Jambi	61,59	50,90	15,30
Sumatera Selatan	67,71	61,94	14,88
Bengkulu	44,98	48,28	12,15
Lampung	73,81	73,51	14,81
Kep. Bangka Belitung	47,33	56,23	12,47
Kepulauan Riau	41,82	42,99	24,07
DKI Jakarta	76,78	79,03	33,71
Jawa Barat	87,59	79,74	27,25
Jawa Tengah	75,30	69,61	24,09
DI Yogyakarta	85,62	81,05	36,76
Jawa Timur	77,54	67,78	26,67
Banten	80,28	67,59	20,49
Bali	53,49	56,01	16,76
Nusa Tenggara Barat	71,50	66,12	27,89
Nusa Tenggara Timur	32,96	38,43	11,10
Kalimantan Barat	61,36	50,61	18,76
Kalimantan Tengah	62,37	53,24	16,37
Kalimantan Selatan	50,57	32,69	9,02
Kalimantan Timur	73,61	60,23	20,84
Kalimantan Utara	51,66	39,42	10,17
Sulawesi Utara	68,15	64,84	21,79
Sulawesi Tengah	56,98	52,03	13,37
Sulawesi Selatan	51,49	35,86	11,86
Sulawesi Tenggara	39,50	29,93	9,57
Gorontalo	33,79	37,74	13,62
Sulawesi Barat	50,62	36,31	14,46
Maluku	32,61	39,58	23,80
Maluku Utara	21,28	25,94	15,21
Papua Barat	12,99	14,15	5,24
Papua	8,23	8,91	5,63
INDONESIA	54,22	47,62	15,90

Sumber: Diolah dari Podes 2021

Tabel 2.4.7 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan, 2021 (lanjutan)

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan	
	Pelaporan Tamu Menginap (1x24 jam)	Pengaktifan Sistem Keamanan Lingkungan dari Inisiatif Warga
	(5)	(6)
Aceh	87,38	34,34
Sumatera Utara	54,73	31,82
Sumatera Barat	70,55	66,20
Riau	78,73	60,82
Jambi	76,57	61,78
Sumatera Selatan	80,77	66,13
Bengkulu	73,12	41,41
Lampung	89,60	76,49
Kep. Bangka Belitung	83,72	39,19
Kepulauan Riau	77,10	47,90
DKI Jakarta	93,63	94,76
Jawa Barat	93,29	87,95
Jawa Tengah	85,65	82,77
DI Yogyakarta	92,47	95,43
Jawa Timur	84,58	78,90
Banten	87,44	87,31
Bali	87,57	60,89
Nusa Tenggara Barat	60,30	73,50
Nusa Tenggara Timur	35,36	38,09
Kalimantan Barat	68,58	46,79
Kalimantan Tengah	73,35	45,69
Kalimantan Selatan	67,12	45,44
Kalimantan Timur	81,36	59,85
Kalimantan Utara	70,33	50,41
Sulawesi Utara	91,30	65,71
Sulawesi Tengah	73,61	43,47
Sulawesi Selatan	61,68	48,44
Sulawesi Tenggara	45,82	33,61
Gorontalo	80,65	36,51
Sulawesi Barat	55,23	39,23
Maluku	61,22	38,86
Maluku Utara	63,34	28,76
Papua Barat	19,08	16,52
Papua	9,68	8,91
INDONESIA	69,83	54,72

Sumber: Diolah dari Podes 2021

Tabel 2.4.8 Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Membangun Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021

Provinsi	Jumlah			Persentase		
	2014	2018	2021	2014	2018	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	2 819	2 329	1 921	43,29	35,79	29,49
Sumatera Utara	1 368	1 903	2 006	22,41	31,03	32,71
Sumatera Barat	813	971	822	71,00	76,16	63,87
Riau	1 083	1 196	1 055	59,02	63,79	56,24
Jambi	1 010 ^r	1 112	962	65,12	71,19	61,59
Sumatera Selatan	1 902	2 243	2 229	58,76	68,76	67,71
Bengkulu	1 118	1 051	681	72,98	69,42	44,98
Lampung	2 032	2 198	1 959	77,20	82,82	73,81
Kep. Bangka Belitung	210	245	186	55,12	62,66	47,33
Kepulauan Riau	193	194	179	46,51	46,63	41,82
DKI Jakarta	227	190	205	85,02	71,16	76,78
Jawa Barat	4 976	5 409	5 218	83,46	90,80	87,59
Jawa Tengah	5 098	5 999	6 447	59,43	70,09	75,30
DI Yogyakarta	365	392	375	83,33	89,50	85,62
Jawa Timur	5 171	6 321	6 588	60,82	74,40	77,54
Banten	1 181	1 280	1 246	76,14	82,47	80,28
Bali	374	395	383	52,23	55,17	53,49
Nusa Tenggara Barat	826	916	823	72,39	80,14	71,50
Nusa Tenggara Timur	772	1 085	1 137	23,61	32,36	32,96
Kalimantan Barat	548	963	1 318	25,98	45,06	61,36
Kalimantan Tengah	991	1 042	983	63,16	66,12	62,37
Kalimantan Selatan	1 167	1 243	1 015	58,12	61,90	50,57
Kalimantan Timur	758	744	770	73,88	71,68	73,61
Kalimantan Utara	177	241	249	36,95	50,00	51,66
Sulawesi Utara	1 090 ^r	1 167	1 254	59,37	63,49	68,15
Sulawesi Tengah	1 105	1 168	1 151	55,64	57,82	56,98
Sulawesi Selatan	1 941	1 896	1 571	64,06	62,18	51,49
Sulawesi Tenggara	1 040 ^r	1 055	912	45,77	44,82	39,50
Gorontalo	253	254	248	34,38	34,60	33,79
Sulawesi Barat	342	358	329	52,78	55,08	50,62
Maluku	183	252	407	16,82	20,32	32,61
Maluku Utara	159	248	256	13,29	20,74	21,28
Papua Barat	132	251	258	8,42	12,63	12,99
Papua	187	441	457	3,84	7,94	8,23
INDONESIA	41 611	46 752	45 600	50,63	55,70	54,22

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

Tabel 2.4.9 Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Membentuk Regu Keamanan Lingkungan Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021

Provinsi	Jumlah			Persentase		
	2014 ^r	2018	2021	2014	2018	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	1 927	1 404	1 061	29,59	21,57	16,29
Sumatera Utara	1 056	1 396	1 424	17,30	22,77	23,22
Sumatera Barat	563	723	621	49,17	56,71	48,25
Riau	915	985	918	49,86	52,53	48,93
Jambi	750	749	795	48,36	47,95	50,90
Sumatera Selatan	1 636	2 003	2 039	50,54	61,40	61,94
Bengkulu	1 019	888	731	66,51	58,65	48,28
Lampung	1 933	2 071	1 951	73,44	78,03	73,51
Kep. Bangka Belitung	157	209	221	41,21	53,45	56,23
Kepulauan Riau	176	181	184	42,41	43,51	42,99
DKI Jakarta	223	199	211	83,52	74,53	79,03
Jawa Barat	4 610	4 709	4 750	77,32	79,05	79,74
Jawa Tengah	4 595	5 140	5 960	53,57	60,05	69,61
DI Yogyakarta	310	347	355	70,78	79,22	81,05
Jawa Timur	4 469	5 245	5 759	52,56	61,73	67,78
Banten	906	1 035	1 049	58,41	66,69	67,59
Bali	445	380	401	62,15	53,07	56,01
Nusa Tenggara Barat	677	724	761	59,33	63,34	66,12
Nusa Tenggara Timur	858	1 244	1 326	26,24	37,10	38,43
Kalimantan Barat	488	838	1 087	23,14	39,21	50,61
Kalimantan Tengah	734	911	839	46,78	57,80	53,24
Kalimantan Selatan	640	799	656	31,87	39,79	32,69
Kalimantan Timur	664	594	630	64,72	57,23	60,23
Kalimantan Utara	134	177	190	27,97	36,72	39,42
Sulawesi Utara	1 166	1 136	1 193	63,51	61,81	64,84
Sulawesi Tengah	1 129	1 155	1 051	56,85	57,18	52,03
Sulawesi Selatan	1 256	1 325	1 094	41,45	43,46	35,86
Sulawesi Tenggara	802	901	691	35,30	38,28	29,93
Gorontalo	401	281	277	54,48	38,28	37,74
Sulawesi Barat	227	230	236	35,03	35,38	36,31
Maluku	200	316	494	18,38	25,48	39,58
Maluku Utara	197	348	312	16,47	29,10	25,94
Papua Barat	145	295	281	9,25	14,85	14,15
Papua	221	647	495	4,54	11,65	8,91
INDONESIA	35 629	39 585	40 043	43,35	47,16	47,62

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

Tabel 2.4.10 Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Menambah Anggota Hansip/Linmas Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021

Provinsi	Jumlah			Persentase		
	2014	2018 ^r	2021	2014	2018	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	656	614	281	10,07	9,43	4,31
Sumatera Utara	324	594	425	5,31	9,69	6,93
Sumatera Barat	236	351	167	20,61	27,53	12,98
Riau	357	416	244	19,46	22,19	13,01
Jambi	328	426	239	21,15	27,27	15,30
Sumatera Selatan	738	917	490	22,80	28,11	14,88
Bengkulu	402	323	184	26,24	21,33	12,15
Lampung	1 118	863	393	42,48	32,52	14,81
Kep. Bangka Belitung	113	128	49	29,66	32,74	12,47
Kepulauan Riau	165	108	103	39,76	25,96	24,07
DKI Jakarta	138	125	90	51,69	46,82	33,71
Jawa Barat	2 445	2 375	1 623	41,01	39,87	27,25
Jawa Tengah	2 269	2 511	2 063	26,45	29,34	24,09
DI Yogyakarta	195	222	161	44,52	50,68	36,76
Jawa Timur	2 890 ^r	3 086	2 266	33,99	36,32	26,67
Banten	497	602	318	32,04	38,79	20,49
Bali	97	123	120	13,55	17,18	16,76
Nusa Tenggara Barat	324	400	321	28,40	35,00	27,89
Nusa Tenggara Timur	622	867	383	19,02	25,86	11,10
Kalimantan Barat	433	521	403	20,53	24,38	18,76
Kalimantan Tengah	467	464	258	29,76	29,44	16,37
Kalimantan Selatan	368	425	181	18,33	21,17	9,02
Kalimantan Timur	351	267	218	34,21	25,72	20,84
Kalimantan Utara	73	101	49	15,24	20,95	10,17
Sulawesi Utara	611	429	401	33,28	23,34	21,79
Sulawesi Tengah	612	518	270	30,82	25,64	13,37
Sulawesi Selatan	792	825	362	26,14	27,06	11,86
Sulawesi Tenggara	403	522	221	17,74	22,18	9,57
Gorontalo	254	255	100	34,51	34,74	13,62
Sulawesi Barat	173	168	94	26,70	25,85	14,46
Maluku	188	226	297	17,28	18,23	23,80
Maluku Utara	183	317	183	15,30	26,51	15,21
Papua Barat	143	185	104	9,13	9,31	5,24
Papua	334	595	313	6,86	10,72	5,63
INDONESIA	19 299	20 869	13 374	23,48	24,86	15,90

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

Tabel 2.4.11 Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Memeriksa Setiap Warga Luar Desa yang Masuk (Pelaporan Tamu yang Menginap Lebih dari 24 Jam ke Aparat Lingkungan Menurut Provinsi, 2014, 2018, dan 2021)

Provinsi	Jumlah			Persentase		
	2014	2018	2021	2014	2018	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	5 375	5 083	5 692	82,54	78,10	87,38
Sumatera Utara	2 248	2 516	3 356	36,83	41,03	54,73
Sumatera Barat	770	962	908	67,25	75,45	70,55
Riau	1 118	1 292	1 477	60,93	68,91	78,73
Jambi	1 002	1 029	1 196	64,60	65,88	76,57
Sumatera Selatan	2 044	2 201	2 659	63,14	67,47	80,77
Bengkulu	1 003	1 089	1 107	65,47	71,93	73,12
Lampung	1 982	2 114	2 378	75,30	79,65	89,60
Kep. Bangka Belitung	272	304	329	71,39	77,75	83,72
Kepulauan Riau	294	309	330	70,84	74,28	77,10
DKI Jakarta	245	242	250	91,76	90,64	93,63
Jawa Barat	5 029	5 134	5 557	84,35	86,18	93,29
Jawa Tengah	6 218	6 437	7 333	72,49	75,21	85,65
DI Yogyakarta	329	376	405	75,11	85,84	92,47
Jawa Timur	6 268	6 614	7 186	73,72	77,85	84,58
Banten	1 044	1 258	1 357	67,31	81,06	87,44
Bali	499	556	627	69,69	77,65	87,57
Nusa Tenggara Barat	597	634	694	52,32	55,47	60,30
Nusa Tenggara Timur	746	979	1 220	22,81	29,20	35,36
Kalimantan Barat	952	1 208	1 473	45,14	56,53	68,58
Kalimantan Tengah	1 035	1 028	1 156	65,97	65,23	73,35
Kalimantan Selatan	1 124	1 240	1 347	55,98	61,75	67,12
Kalimantan Timur	796	742	851	77,58	71,48	81,36
Kalimantan Utara	250	286	339	52,19	59,34	70,33
Sulawesi Utara	1 517	1 636	1 680	82,63	89,01	91,30
Sulawesi Tengah	1 296	1 347	1 487	65,26	66,68	73,61
Sulawesi Selatan	1 322	1 623	1 882	43,63	53,23	61,68
Sulawesi Tenggara	885	947	1 058	38,95	40,23	45,82
Gorontalo	483	500	592	65,63	68,12	80,65
Sulawesi Barat	258	314	359	39,81	48,31	55,23
Maluku	470	647	764	43,20	52,18	61,22
Maluku Utara	450	723	762	37,63	60,45	63,34
Papua Barat	213	239	379	13,59	12,03	19,08
Papua	223	631	538	4,58	11,37	9,68
INDONESIA	48 357	52 240	58 728	58,84	62,24	69,83

Sumber: Statistik Podes 2014, 2018, dan 2021

Tabel 2.4.12 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2014

Provinsi	Keberadaan Pos Polisi		Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat (Bagi Desa/Kel yang Tidak ada Pos Polisi)			
	Ada	Tidak	Sangat Mudah	Mudah	Sulit	Sangat Sulit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	355	6 157	1 118	4 353	582	104
Sumatera Utara	432	5 672	786	3 485	1 114	287
Sumatera Barat	210	935	201	650	66	18
Riau	380	1 455	295	891	243	26
Jambi	202	1 349	287	894	145	23
Sumatera Selatan	313	2 924	393	2 162	329	40
Bengkulu	105	1 427	290	940	175	22
Lampung	269	2 363	386	1 649	282	46
Kep. Bangka Belitung	69	312	103	198	10	1
Kepulauan Riau	101	314	77	168	55	14
DKI Jakarta	182	85	42	43	-	-
Jawa Barat	813	5 149	1 163	3 583	365	38
Jawa Tengah	755	7 823	1 949	5 641	213	20
DI Yogyakarta	117	321	125	196	-	-
Jawa Timur	949	7 553	2 472	4 835	220	26
Banten	201	1 350 ^r	295	887	150	18
Bali	144	572	230	342	-	-
Nusa Tenggara Barat	156	985	294	596	72	23
Nusa Tenggara Timur	310	2 960 ^r	350	1 487	900	223
Kalimantan Barat	294	1 815	176	884	577	178
Kalimantan Tengah	187	1 382	115	692	457	118
Kalimantan Selatan	217	1 791	350	1 193	210	38
Kalimantan Timur	180	846	153	387	239	67
Kalimantan Utara	61	418	44	164	139	71
Sulawesi Utara	168	1 668	463	1 007	165	33
Sulawesi Tengah	277	1 709	350	975	275	109
Sulawesi Selatan	360	2 670 ^r	632	1 566	361	111
Sulawesi Tenggara	167	2 105	404	1 298	324	79
Gorontalo	59	677	226	365	68	18
Sulawesi Barat	59	589	94	266	163	66
Maluku	125	963	118	392	328	125
Maluku Utara	107	1 089	212	481	292	104
Papua Barat	108	1 459	127	416	648	268
Papua	280	4 591	247	966	1 602	1 776
INDONESIA	8 712	73 478	14 567	44 052	10 769	4 090^r

Sumber: Diolah dari Podes 2014

Tabel 2.4.13 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2018

Provinsi	Keberadaan Pos Polisi		Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat (Bagi Desa/Kel yang Tidak ada Pos Polisi)			
	Ada	Tidak	Sangat Mudah	Mudah	Sulit	Sangat Sulit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	353	6 155	940	4 769	399	47
Sumatera Utara	481	5 651	621	3 629	1 215	186
Sumatera Barat	226	1 049	259	729	53	8
Riau	550	1 325	232	888	190	15
Jambi	207	1 355	270	906	159	20
Sumatera Selatan	381	2 881	320	2 135	391	35
Bengkulu	130	1 384	299	918	151	16
Lampung	280	2 374	403 ^r	1 698	244	30
Kep. Bangka Belitung	91	300	112	183	5	-
Kepulauan Riau	113	303	49	182	63	9
DKI Jakarta	222	45	30	15	-	-
Jawa Barat	910	5 047	1 085	3 666	294	2
Jawa Tengah	930	7 629	1 994	5 511	120	4
DI Yogyakarta	114	324	105	219	-	-
Jawa Timur	1 127	7 369	2 250	4 941	168	10
Banten	209	1 343	258	939	135	11
Bali	140	576	236	340	-	-
Nusa Tenggara Barat	176	967	241	659	53	14
Nusa Tenggara Timur	327	3 026	250	1 734	949	93
Kalimantan Barat	283	1 854	189	906	600	159
Kalimantan Tengah	201	1 375	121	748	421	85
Kalimantan Selatan	235	1 773	388	1 206	145	34
Kalimantan Timur	203	835	134	432	253	16
Kalimantan Utara	66	416	47	155	124	90
Sulawesi Utara	174	1 664	445	1 082	126	11
Sulawesi Tengah	293	1 727	316	1 087	265	59
Sulawesi Selatan	381	2 668	660	1 628	319	61
Sulawesi Tenggara	205	2 149	391	1 406	315	37
Gorontalo	77	657	183	381	88	5
Sulawesi Barat	62	588	86	299	152	51
Maluku	135	1 105	115	493	350	147
Maluku Utara	121	1 075	161	549	298	67
Papua Barat	113	1 874	127	619	752	376
Papua	243	5 309	205	1 323	1 960	1 821
INDONESIA	9 759	74 172	13 521	46 375	10 757	3 519

Sumber: Diolah dari Podes 2018

Tabel 2.4.14 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2021

Provinsi	Keberadaan Pos Polisi		Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat (Bagi Desa/Kel yang Tidak ada Pos Polisi)			
	Ada	Tidak	Sangat Mudah	Mudah	Sulit	Sangat Sulit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	337	6 177	1 204	4 657	274	42
Sumatera Utara	409	5 723	602	3 826	1 109	186
Sumatera Barat	215	1 072	320	690	55	7
Riau	517	1 359	211	939	186	23
Jambi	172	1 390	239	1 017	125	9
Sumatera Selatan	341	2 951	508	2 189	236	18
Bengkulu	123	1 391	302	983	93	13
Lampung	287	2 367	316	1 877	164	10
Kep. Bangka Belitung	82	311	152	151	7	1
Kepulauan Riau	110	318	58	175	69	16
DKI Jakarta	185	82	49	33	0	0
Jawa Barat	922	5 035	1 078	3 850	98	9
Jawa Tengah	801	7 761	1 905	5 814	38	4
DI Yogyakarta	134	304	64	239	1	0
Jawa Timur	1 052	7 444	2 549	4 785	102	8
Banten	195	1 357	222	1 028	101	6
Bali	156	560	317	243	0	0
Nusa Tenggara Barat	157	994	375	571	35	13
Nusa Tenggara Timur	304	3 146	446	1 824	824	52
Kalimantan Barat	268	1 880	147	958	649	126
Kalimantan Tengah	207	1 369	99	768	405	97
Kalimantan Selatan	251	1 756	529	1 076	128	23
Kalimantan Timur	193	853	135	460	230	28
Kalimantan Utara	67	415	60	167	131	57
Sulawesi Utara	167	1 673	422	1 142	102	7
Sulawesi Tengah	255	1 765	283	1 146	268	68
Sulawesi Selatan	343	2 708	453	1 930	279	46
Sulawesi Tenggara	177	2 132	461	1 421	227	23
Gorontalo	65	669	284	330	49	6
Sulawesi Barat	52	598	60	317	197	24
Maluku	126	1 122	107	558	355	102
Maluku Utara	108	1 095	186	544	309	56
Papua Barat	108	1 878	109	680	747	342
Papua	252	5 303	262	1 178	2 016	1 847
INDONESIA	9 138	7 4958	14 514	47 566	9 609	3 269

Sumber: Diolah dari Podes 2021

Tabel 2.4.15 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2014

Provinsi	Keberadaan Pos Polisi		Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat (Bagi Desa/Kel yang Tidak ada Pos Polisi)			
	Ada	Tidak	Sangat Mudah	Mudah	Sulit	Sangat Sulit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	5,45	94,55	17,17	66,85	8,94	1,60
Sumatera Utara	7,08	92,92	12,88	57,09	18,25	4,70
Sumatera Barat	18,34	81,66	17,55	56,77	5,76	1,57
Riau	20,71	79,29	16,08	48,56	13,24	1,42
Jambi	13,02	86,98	18,50	57,64	9,35	1,48
Sumatera Selatan	9,67	90,33	12,14	66,79	10,16	1,24
Bengkulu	6,85	93,15	18,93	61,36	11,42	1,44
Lampung	10,22	89,78	14,67	62,65	10,71	1,75
Kep. Bangka Belitung	18,11	81,89	27,03	51,97	2,62	0,26
Kepulauan Riau	24,34	75,66	18,55	40,48	13,25	3,37
DKI Jakarta	68,16	31,84	15,73	16,10	-	-
Jawa Barat	13,64	86,36	19,51	60,10	6,12	0,64
Jawa Tengah	8,80	91,20	22,72	65,76	2,48	0,23
DI Yogyakarta	26,71	73,29	28,54	44,75	-	-
Jawa Timur	11,16	88,84	29,08	56,87	2,59	0,31
Banten	12,96	87,04	19,02	57,19	9,67	1,16
Bali	20,11	79,89	32,12	47,77	-	-
Nusa Tenggara Barat	13,67	86,33	25,77	52,23	6,31	2,02
Nusa Tenggara Timur	9,48	90,52	10,70	45,47	27,52	6,82
Kalimantan Barat	13,94	86,06	8,35	41,92	27,36	8,44
Kalimantan Tengah	11,92	88,08	7,33	44,10	29,13	7,52
Kalimantan Selatan	10,81	89,19	17,43	59,41	10,46	1,89
Kalimantan Timur	17,54	82,46	14,91	37,72	23,29	6,53
Kalimantan Utara	12,73	87,27	9,19	34,24	29,02	14,82
Sulawesi Utara	9,15	90,85	25,22	54,85	8,99	1,80
Sulawesi Tengah	13,95	86,05	17,62	49,09	13,85	5,49
Sulawesi Selatan	11,88	88,12	20,86	51,68	11,91	3,66
Sulawesi Tenggara	7,35	92,65	17,78	57,13	14,26	3,48
Gorontalo	8,02	91,98	30,71	49,59	9,24	2,45
Sulawesi Barat	9,10	90,90	14,51	41,05	25,15	10,19
Maluku	11,49	88,51	10,85	36,03	30,15	11,49
Maluku Utara	8,95	91,05	17,73	40,22	24,41	8,70
Papua Barat	6,89	93,11	8,10	26,55	41,35	17,10
Papua	5,75	94,25	5,07	19,83	32,89	36,46
INDONESIA	10,60	89,40	17,72	53,60	13,10	4,98

Sumber: Diolah dari Podes 2014

Tabel 2.4.16 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2018

Provinsi	Keberadaan Pos Polisi		Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat (Bagi Desa/Kel yang Tidak ada Pos Polisi)			
	Ada	Tidak	Sangat Mudah	Mudah	Sulit	Sangat Sulit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	5,42	94,58	15,27	77,48	6,48	0,76
Sumatera Utara	7,84	92,16	10,99	64,22	21,50	3,29
Sumatera Barat	17,73	82,27	24,69	69,49	5,05	0,76
Riau	29,33	70,67	17,51	67,02	14,34	1,13
Jambi	13,25	86,75	19,93	66,86	11,73	1,48
Sumatera Selatan	11,68	88,32	11,11	74,11	13,57	1,21
Bengkulu	8,59	91,41	21,60	66,33	10,91	1,16
Lampung	10,55	89,45	16,93	71,52	10,28	1,26
Kep. Bangka Belitung	23,27	76,73	37,33	61,00	1,67	0,00
Kepulauan Riau	27,16	72,84	16,17	60,07	20,79	2,97
DKI Jakarta	83,15	16,85	66,67	33,33	0,00	0,00
Jawa Barat	15,28	84,72	21,50	72,64	5,83	0,04
Jawa Tengah	10,87	89,13	26,14	72,24	1,57	0,05
DI Yogyakarta	26,03	73,97	32,41	67,59	0,00	0,00
Jawa Timur	13,27	86,73	30,53	67,05	2,28	0,14
Banten	13,47	86,53	19,21	69,92	10,05	0,82
Bali	19,55	80,45	40,97	59,03	0,00	0,00
Nusa Tenggara Barat	15,40	84,60	24,92	68,15	5,48	1,45
Nusa Tenggara Timur	9,75	90,25	8,26	57,30	31,36	3,07
Kalimantan Barat	13,24	86,76	10,19	48,87	32,36	8,58
Kalimantan Tengah	12,75	87,25	8,80	54,40	30,62	6,18
Kalimantan Selatan	11,70	88,30	21,88	68,02	8,18	1,92
Kalimantan Timur	19,56	80,44	16,05	51,74	30,30	1,92
Kalimantan Utara	13,69	86,31	11,30	37,26	29,81	21,63
Sulawesi Utara	9,47	90,53	26,74	65,02	7,57	0,66
Sulawesi Tengah	14,50	85,50	18,30	62,94	15,34	3,42
Sulawesi Selatan	12,50	87,50	24,74	61,02	11,96	2,29
Sulawesi Tenggara	8,71	91,29	18,19	65,43	14,66	1,72
Gorontalo	10,49	89,51	27,85	57,99	13,39	0,76
Sulawesi Barat	9,54	90,46	14,63	50,85	25,85	8,67
Maluku	10,89	89,11	10,41	44,62	31,67	13,30
Maluku Utara	10,12	89,88	14,98	51,07	27,72	6,23
Papua Barat	5,69	94,31	6,78	33,03	40,13	20,06
Papua	4,38	95,62	3,86	24,92	36,92	34,30
INDONESIA	11,63	88,37	18,23	62,52	14,50	4,74

Sumber: Diolah dari Podes 2018

Tabel 2.4.17 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2021

Provinsi	Keberadaan Pos Polisi		Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat (Bagi Desa/Kel yang Tidak ada Pos Polisi)			
	Ada	Tidak	Sangat Mudah	Mudah	Sulit	Sangat Sulit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	5,17	94,83	19,49	75,39	4,44	0,68
Sumatera Utara	6,67	93,33	10,52	66,85	19,38	3,25
Sumatera Barat	16,71	83,29	29,85	64,37	5,13	0,65
Riau	27,56	72,44	15,53	69,09	13,69	1,69
Jambi	11,01	88,99	17,19	73,17	8,99	0,65
Sumatera Selatan	10,36	89,64	17,21	74,18	8,00	0,61
Bengkulu	8,12	91,88	21,71	70,67	6,69	0,93
Lampung	10,81	89,19	13,35	79,30	6,93	0,42
Kep. Bangka Belitung	20,87	79,13	48,87	48,55	2,25	0,32
Kepulauan Riau	25,70	74,30	18,24	55,03	21,70	5,03
DKI Jakarta	69,29	30,71	59,76	40,24	0,00	0,00
Jawa Barat	15,48	84,52	21,41	76,46	1,95	0,18
Jawa Tengah	9,36	90,64	24,55	74,91	0,49	0,05
DI Yogyakarta	30,59	69,41	21,05	78,62	0,33	0,00
Jawa Timur	12,38	87,62	34,24	64,28	1,37	0,11
Banten	12,56	87,44	16,36	75,76	7,44	0,44
Bali	21,79	78,21	56,61	43,39	0,00	0,00
Nusa Tenggara Barat	13,64	86,36	37,73	57,44	3,52	1,31
Nusa Tenggara Timur	8,81	91,19	14,18	57,98	26,19	1,65
Kalimantan Barat	12,48	87,52	7,82	50,96	34,52	6,70
Kalimantan Tengah	13,13	86,87	7,23	56,10	29,58	7,09
Kalimantan Selatan	12,51	87,49	30,13	61,28	7,29	1,31
Kalimantan Timur	18,45	81,55	15,83	53,93	26,96	3,28
Kalimantan Utara	13,90	86,10	14,46	40,24	31,57	13,73
Sulawesi Utara	9,08	90,92	25,22	68,26	6,10	0,42
Sulawesi Tengah	12,62	87,38	16,03	64,93	15,18	3,85
Sulawesi Selatan	11,24	88,76	16,73	71,27	10,30	1,70
Sulawesi Tenggara	7,67	92,33	21,62	66,65	10,65	1,08
Gorontalo	8,86	91,14	42,45	49,33	7,32	0,90
Sulawesi Barat	8,00	92,00	10,03	53,01	32,94	4,01
Maluku	10,10	89,90	9,54	49,73	31,64	9,09
Maluku Utara	8,98	91,02	16,99	49,68	28,22	5,11
Papua Barat	5,44	94,56	5,80	36,21	39,78	18,21
Papua	4,54	95,46	4,94	22,21	38,02	34,83
INDONESIA	10,87	89,13	19,36	63,46	12,82	4,36

Sumber: Diolah dari Podes 2021

DATA SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL



Tabel 3.1.1 Persentase Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kejahatan yang di Alami,
2019-2021

Jenis Kejahatan	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1, Pencurian	85,35	86,51	86,77
2, Penganiayaan	3,08	3,24	3,71
3, Pencurian dengan kekerasan	2,21	2,25	3,00
4, Pelecehan Seksual	1,25	1,24	1,71
5, Lainnya	12,28	12,64	13,21
6, Mengalami lebih dari 1 jenis kejahatan	4,17	5,88	8,40

Sumber : Diolah dari Susenas 2020, 2021, dan 2022

Tabel 3.1.2 Persentase Penduduk Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2019-2021

Provinsi	Tahun		
	2019 (1)	2020 (2)	2021 (3)
Aceh	0,71	0,61	0,32
Sumatera Utara	1,18	0,97	0,74
Sumatera Barat	0,98	0,97	0,48
Riau	1,24	0,73	0,56
Jambi	0,83	0,79	0,50
Sumatera Selatan	1,35	1,07	0,57
Bengkulu	1,42	0,95	0,97
Lampung	1,42	1,00	0,50
Kep. Bangka Belitung	0,66	0,72	0,41
Kepulauan Riau	1,02	1,44	0,55
DKI Jakarta	1,15	0,86	0,40
Jawa Barat	1,15	0,90	0,48
Jawa Tengah	0,80	0,57	0,37
DI Yogyakarta	1,35	0,79	0,41
Jawa Timur	0,82	0,66	0,35
Banten	0,80	0,46	0,36
Bali	0,42	0,23	0,20
Nusa Tenggara Barat	1,63	1,49	0,98
Nusa Tenggara Timur	0,84	0,73	0,57
Kalimantan Barat	0,63	0,69	0,44
Kalimantan Tengah	0,80	0,55	0,47
Kalimantan Selatan	0,84	0,59	0,42
Kalimantan Timur	1,19	0,60	0,47
Kalimantan Utara	1,53	1,36	0,57
Sulawesi Utara	0,78	0,63	0,57
Sulawesi Tengah	1,22	1,17	0,63
Sulawesi Selatan	0,96	0,73	0,41
Sulawesi Tenggara	0,95	0,90	0,50
Gorontalo	0,83	0,59	0,46
Sulawesi Barat	0,74	0,58	0,40
Maluku	1,19	1,09	0,78
Maluku Utara	1,16	1,06	0,55
Papua Barat	1,66	1,04	0,73
Papua	1,36	0,73	0,55
INDONESIA	1,01	0,78	0,47

Sumber: Diolah dari Susenas 2020, 2021, dan 2022

**Tabel 3.1.3 Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Menurut Jenis Kelamin, 2019-
2021**

Provinsi	2019		2020		2021	
	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	63,72	36,28	65,54	34,46	69,45	30,55
Sumatera Utara	63,66	36,34	61,1	38,9	60,62	39,38
Sumatera Barat	56,93	43,07	54,36	45,64	51,65	48,35
Riau	69,68	30,32	64,61	35,39	61,94	38,06
Jambi	62,16	37,84	66,52	33,48	60,35	39,65
Sumatera Selatan	63,75	36,25	78,91	21,09	75,93	24,07
Bengkulu	71,69	28,31	71,96	28,04	75,56	24,44
Lampung	69,36	30,64	71,25	28,75	77,88	22,12
Kep. Bangka Belitung	69,33	30,67	51,03	48,97	56,17	43,83
Kepulauan Riau	66,18	33,82	67,35	32,65	58,96	41,04
DKI Jakarta	66,7	33,30	63,18	36,82	66,71	33,29
Jawa Barat	64,97	35,03	64,25	35,75	65,34	34,66
Jawa Tengah	61,56	38,44	64,63	35,37	56,81	43,19
DI Yogyakarta	68,77	31,23	67,14	32,86	65,22	34,78
Jawa Timur	56,81	43,19	61,92	38,08	57,72	42,28
Banten	67,98	32,02	73,18	26,82	54,84	45,16
Bali	54,46	45,54	73,76	26,24	60,47	39,53
Nusa Tenggara Barat	62,5	37,5	57,14	42,86	64,56	35,44
Nusa Tenggara Timur	66,33	33,67	65,49	34,51	64,70	35,30
Kalimantan Barat	64,61	35,39	66,14	33,86	61,72	38,28
Kalimantan Tengah	63,98	36,02	66,85	33,15	64,59	35,41
Kalimantan Selatan	60,77	39,23	62,59	37,41	55,48	44,52
Kalimantan Timur	58,46	41,54	70,03	29,97	67,55	32,45
Kalimantan Utara	71,46	28,54	62,56	37,44	71,86	28,14
Sulawesi Utara	57,27	42,73	62,24	37,76	70,94	29,06
Sulawesi Tengah	72,24	27,76	70,87	29,13	56,48	43,52
Sulawesi Selatan	60,49	39,51	53,56	46,44	51,86	48,14
Sulawesi Tenggara	62,09	37,91	70,72	29,28	64,85	35,15
Gorontalo	60,56	39,44	42,25	57,75	63,33	36,67
Sulawesi Barat	66,36	33,64	62,32	37,68	50,34	49,66
Maluku	57,98	42,02	56,53	43,47	52,00	48,00
Maluku Utara	61,81	38,19	70,5	29,5	59,90	40,10
Papua Barat	62,69	37,31	71,92	28,08	62,44	37,56
Papua	64,69	35,31	63,08	36,92	60,06	39,94
INDONESIA	63,52	36,48	64,46	35,54	62,29	37,71

Sumber: Diolah dari Susenas 2020, 2021, dan 2022

Catatan : L=Laki-laki; P=Perempuan

Tabel 3.1.4 Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Menurut Kelompok Umur, 2019-2021

Provinsi	2019		2020		2021	
	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	7,47	92,53	8,51	91,49	2,31	97,69
Sumatera Utara	8,14	91,86	7,19	92,81	8,95	91,05
Sumatera Barat	7,85	92,15	10,11	89,89	7,99	92,01
Riau	5,48	94,52	4,41	95,59	9,33	90,67
Jambi	8,95	91,05	4,20	95,80	12,00	88,00
Sumatera Selatan	8,91	91,09	6,15	93,85	6,17	93,83
Bengkulu	3,69	96,31	6,79	93,21	5,11	94,89
Lampung	6,76	93,24	5,64	94,36	3,06	96,94
Kep. Bangka Belitung	2,93	97,07	5,87	94,13	8,35	91,65
Kepulauan Riau	5,87	94,13	15,39	84,61	6,08	93,92
DKI Jakarta	4,17	95,83	4,16	95,84	11,70	88,30
Jawa Barat	6,33	93,67	5,31	94,69	5,17	94,83
Jawa Tengah	5,56	94,44	4,45	95,55	7,23	92,77
DI Yogyakarta	1,72	98,28	0,57	99,43	2,08	97,92
Jawa Timur	7,97	92,03	5,53	94,47	9,54	90,46
Banten	10,82	89,18	3,51	96,49	5,67	94,33
Bali	5,24	94,76	2,25	97,75	-	100,00
Nusa Tenggara Barat	9,10	90,90	7,86	92,14	4,50	95,50
Nusa Tenggara Timur	3,11	96,89	3,12	96,88	6,07	93,93
Kalimantan Barat	11,96	88,04	2,92	97,08	5,22	94,78
Kalimantan Tengah	5,30	94,70	4,84	95,16	4,34	95,66
Kalimantan Selatan	8,31	91,69	5,08	94,92	3,52	96,48
Kalimantan Timur	4,21	95,79	2,12	97,88	4,37	95,63
Kalimantan Utara	1,82	98,18	3,44	96,56	6,17	93,83
Sulawesi Utara	11,05	88,95	6,15	93,85	7,91	92,09
Sulawesi Tengah	7,74	92,26	8,29	91,71	10,55	89,45
Sulawesi Selatan	5,35	94,65	5,40	94,60	7,73	92,27
Sulawesi Tenggara	4,89	95,11	5,41	94,59	2,72	97,28
Gorontalo	7,63	92,37	7,06	92,94	9,12	90,88
Sulawesi Barat	6,71	93,29	4,21	95,79	6,64	93,36
Maluku	8,58	91,42	7,72	92,28	9,85	90,15
Maluku Utara	10,82	89,18	4,22	95,78	17,41	82,59
Papua Barat	7,73	92,27	5,24	94,76	6,58	93,42
Papua	9,70	90,30	11,60	88,40	10,21	89,79
INDONESIA	6,86	93,14	5,68	94,32	6,94	93,06

Sumber: Diolah dari Susenas 2020, 2021, dan 2022

Tabel 3.1.5 Persentase Penduduk Korban Kejahatan Pencurian Menurut Provinsi, 2019-2021

Provinsi	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	89,48	88,66	96,47
Sumatera Utara	91,05	93,67	91,60
Sumatera Barat	90,27	89,11	90,15
Riau	86,43	91,92	88,98
Jambi	88,14	81,23	92,36
Sumatera Selatan	89,08	91,32	93,34
Bengkulu	91,11	96,71	96,44
Lampung	89,92	87,90	86,73
Kep. Bangka Belitung	92,07	80,63	82,36
Kepulauan Riau	93,93	94,03	94,51
DKI Jakarta	79,88	88,65	88,33
Jawa Barat	86,64	86,91	87,02
Jawa Tengah	80,01	81,06	75,35
DI Yogyakarta	69,03	69,82	79,04
Jawa Timur	76,81	79,99	81,83
Banten	87,20	87,44	91,57
Bali	90,98	90,17	83,52
Nusa Tenggara Barat	91,81	88,42	94,22
Nusa Tenggara Timur	84,66	87,71	88,57
Kalimantan Barat	81,80	85,70	94,72
Kalimantan Tengah	86,38	84,56	86,30
Kalimantan Selatan	86,35	86,46	72,25
Kalimantan Timur	84,46	87,57	84,13
Kalimantan Utara	94,50	95,98	93,38
Sulawesi Utara	87,83	88,94	83,23
Sulawesi Tengah	89,79	94,11	95,28
Sulawesi Selatan	91,40	87,72	80,52
Sulawesi Tenggara	92,26	89,78	92,43
Gorontalo	95,44	85,76	83,49
Sulawesi Barat	91,62	82,91	87,04
Maluku	90,80	80,71	92,52
Maluku Utara	87,80	94,20	96,53
Papua Barat	78,96	65,31	78,47
Papua	87,79	89,77	87,85
INDONESIA	85,35	86,51	86,77

Sumber: Diolah dari Susenas 2020, 2021, dan 2022

Catatan: Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk

Tabel 3.1.6 Persentase Penduduk Korban Kejahatan Penganiayaan Menurut Provinsi, 2019-2021

Provinsi	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	3,59	4,20	4,57
Sumatera Utara	0,72	2,76	3,43
Sumatera Barat	5,08	2,00	1,98
Riau	1,24	3,76	3,46
Jambi	1,39	1,92	0,59
Sumatera Selatan	3,63	2,37	1,33
Bengkulu	5,48	1,08	0,61
Lampung	2,55	2,87	3,45
Kep. Bangka Belitung	1,50	1,53	-
Kepulauan Riau	2,04	3,00	0,52
DKI Jakarta	3,72	7,08	8,44
Jawa Barat	2,83	2,41	5,25
Jawa Tengah	2,61	3,31	4,16
DI Yogyakarta	2,81	4,79	-
Jawa Timur	3,73	2,58	3,01
Banten	2,90	4,25	2,07
Bali	2,19	3,68	4,89
Nusa Tenggara Barat	2,90	1,33	2,19
Nusa Tenggara Timur	6,05	9,17	3,70
Kalimantan Barat	1,37	1,28	0,85
Kalimantan Tengah	3,83	5,12	2,85
Kalimantan Selatan	2,52	-	1,60
Kalimantan Timur	3,12	1,67	1,78
Kalimantan Utara	0,44	3,24	3,58
Sulawesi Utara	6,72	5,76	8,24
Sulawesi Tengah	4,80	4,79	2,07
Sulawesi Selatan	2,59	1,57	3,09
Sulawesi Tenggara	3,70	4,88	6,05
Gorontalo	3,94	2,39	10,40
Sulawesi Barat	0,66	4,75	9,58
Maluku	4,04	13,17	5,24
Maluku Utara	7,40	1,39	1,11
Papua Barat	9,03	14,66	8,29
Papua	7,17	7,91	6,59
INDONESIA	3,08	3,24	3,71

Sumber: Diolah dari Susenas 2020, 2021, dan 2022

Catatan: Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk

Tabel 3.1.7 Persentase Penduduk Korban Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Menurut Provinsi, 2019-2021

Provinsi	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	1,98	2,21	2,54
Sumatera Utara	1,90	1,16	3,76
Sumatera Barat	2,55	0,77	3,45
Riau	0,90	2,92	3,76
Jambi	5,66	3,03	3,21
Sumatera Selatan	4,27	3,34	2,54
Bengkulu	2,41	0,33	1,42
Lampung	4,17	3,15	0,49
Kep. Bangka Belitung	0,36	-	7,73
Kepulauan Riau	2,17	2,28	-
DKI Jakarta	4,25	4,65	5,00
Jawa Barat	2,47	2,38	5,09
Jawa Tengah	1,53	1,42	2,21
DI Yogyakarta	0,94	2,40	1,13
Jawa Timur	1,84	1,83	1,58
Banten	1,48	5,39	3,56
Bali	0,32	0,30	-
Nusa Tenggara Barat	1,74	0,78	0,59
Nusa Tenggara Timur	0,87	1,25	2,03
Kalimantan Barat	2,85	1,85	0,87
Kalimantan Tengah	3,18	0,99	2,98
Kalimantan Selatan	0,80	1,08	3,70
Kalimantan Timur	1,95	1,00	1,40
Kalimantan Utara	0,67	1,05	1,52
Sulawesi Utara	0,85	0,45	-
Sulawesi Tengah	0,83	1,21	-
Sulawesi Selatan	1,35	4,08	4,63
Sulawesi Tenggara	0,25	0,99	0,30
Gorontalo	-	-	6,15
Sulawesi Barat	-	-	4,77
Maluku	2,37	0,60	2,09
Maluku Utara	-	1,78	-
Papua Barat	7,03	7,10	8,45
Papua	2,56	7,71	6,63
INDONESIA	2,21	2,25	3,00

Sumber: Diolah dari Susenas 2020, 2021, dan 2022

Catatan: Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk

Tabel 3.1.8 Persentase Penduduk Korban Kejahanan Pelecehan Seksual dengan Kekerasan Menurut Provinsi, 2019-2021

Provinsi	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	0,99	1,58	2,54
Sumatera Utara	0,43	0,15	1,77
Sumatera Barat	0,59	0,48	1,54
Riau	0,61	-	0,36
Jambi	1,45	0,74	0,59
Sumatera Selatan	0,57	1,11	0,73
Bengkulu	1,87	-	0,56
Lampung	0,54	0,23	0,49
Kep. Bangka Belitung	2,23	-	4,48
Kepulauan Riau	-	0,02	0,67
DKI Jakarta	1,64	2,68	-
Jawa Barat	0,91	1,88	3,70
Jawa Tengah	0,81	0,74	0,49
DI Yogyakarta	3,10	0,40	1,71
Jawa Timur	3,84	1,20	1,69
Banten	1,08	3,91	2,76
Bali	2,65	-	-
Nusa Tenggara Barat	0,57	0,74	0,27
Nusa Tenggara Timur	1,82	1,40	1,99
Kalimantan Barat	0,35	0,29	0,72
Kalimantan Tengah	3,47	1,88	0,93
Kalimantan Selatan	1,03	-	2,98
Kalimantan Timur	0,70	0,45	0,35
Kalimantan Utara	-	2,86	-
Sulawesi Utara	0,84	0,29	0,48
Sulawesi Tengah	0,61	1,30	0,27
Sulawesi Selatan	0,52	0,48	2,28
Sulawesi Tenggara	0,27	2,01	1,41
Gorontalo	0,66	4,59	-
Sulawesi Barat	-	1,54	-
Maluku	0,04	2,95	1,76
Maluku Utara	1,44	-	3,16
Papua Barat	1,22	2,44	1,60
Papua	0,45	4,44	4,11
INDONESIA	1,25	1,24	1,71

Sumber: Diolah dari Susenas 2020, 2021, dan 2022

Catatan: Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahanan, bukan terhadap total penduduk

**Tabel 3.1.9 Persentase Penduduk Korban Kejahatan Lainnya Menurut Provinsi, 2019-
2021**

Provinsi	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	7,07	6,13	4,72
Sumatera Utara	7,39	3,84	7,43
Sumatera Barat	6,50	11,62	6,39
Riau	12,38	4,85	5,38
Jambi	7,30	17,11	10,04
Sumatera Selatan	4,30	7,11	6,57
Bengkulu	11,18	4,26	1,53
Lampung	7,13	10,34	11,11
Kep. Bangka Belitung	6,58	18,19	5,94
Kepulauan Riau	10,24	8,92	7,30
DKI Jakarta	14,95	14,31	12,15
Jawa Barat	12,93	15,76	18,36
Jawa Tengah	16,74	15,40	20,92
DI Yogyakarta	27,20	23,10	19,29
Jawa Timur	19,13	19,05	20,56
Banten	10,27	18,06	10,72
Bali	7,93	6,46	21,37
Nusa Tenggara Barat	8,35	10,02	4,93
Nusa Tenggara Timur	8,19	5,39	5,79
Kalimantan Barat	16,78	15,56	4,95
Kalimantan Tengah	11,42	10,55	11,55
Kalimantan Selatan	15,87	16,02	19,47
Kalimantan Timur	16,19	10,32	15,54
Kalimantan Utara	5,44	2,67	5,71
Sulawesi Utara	12,95	7,46	11,64
Sulawesi Tengah	5,38	3,47	7,03
Sulawesi Selatan	8,31	10,01	16,49
Sulawesi Tenggara	6,18	5,14	5,46
Gorontalo	5,71	7,26	5,55
Sulawesi Barat	11,58	10,80	10,79
Maluku	3,88	6,14	9,36
Maluku Utara	10,02	4,66	0,09
Papua Barat	6,65	16,04	10,81
Papua	7,88	7,60	10,63
INDONESIA	12,28	12,64	13,21

Sumber: Diolah dari Susenas 2020, 2021, dan 2022

Catatan: Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk

Tabel 3.1.10 Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi Menurut Provinsi, 2019-2021

Provinsi	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	17,27	13,29	29,15
Sumatera Utara	19,56	19,77	14,54
Sumatera Barat	23,15	25,99	20,27
Riau	15,15	27,61	14,79
Jambi	24,38	16,40	17,40
Sumatera Selatan	25,41	29,65	20,07
Bengkulu	20,39	17,58	12,12
Lampung	24,49	18,84	14,64
Kep. Bangka Belitung	18,99	14,46	25,43
Kepulauan Riau	26,30	32,16	26,10
DKI Jakarta	31,00	31,22	33,90
Jawa Barat	28,41	24,86	32,82
Jawa Tengah	16,76	21,67	16,57
DI Yogyakarta	16,85	21,47	20,34
Jawa Timur	20,53	25,16	21,75
Banten	22,07	31,95	26,04
Bali	10,06	16,23	27,17
Nusa Tenggara Barat	10,98	12,40	18,10
Nusa Tenggara Timur	15,63	15,89	16,88
Kalimantan Barat	22,94	19,14	22,71
Kalimantan Tengah	20,01	19,35	28,53
Kalimantan Selatan	13,57	24,03	24,54
Kalimantan Timur	18,10	26,81	26,52
Kalimantan Utara	10,38	14,15	31,14
Sulawesi Utara	27,36	28,83	26,79
Sulawesi Tengah	22,93	22,26	31,96
Sulawesi Selatan	24,94	24,89	31,64
Sulawesi Tenggara	25,15	23,68	30,55
Gorontalo	12,41	31,06	24,08
Sulawesi Barat	22,17	12,94	23,79
Maluku	19,09	22,57	16,05
Maluku Utara	15,70	16,76	15,46
Papua Barat	37,43	37,22	28,72
Papua	19,71	19,52	30,57
INDONESIA	22,19	23,46	23,31

Sumber: Diolah dari Susenas 2020, 2021, dan 2022

Catatan: Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk

Tabel 3.1.11 Persentase Penduduk yang Pernah Melapor dan Mendapatkan/Ditemani Bantuan Hukum Menurut Provinsi, 2019-2021

Provinsi	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	42,99	49,54	10,25
Sumatera Utara	26,49	22,28	26,50
Sumatera Barat	24,17	14,92	14,45
Riau	27,92	10,22	27,64
Jambi	25,49	9,53	29,98
Sumatera Selatan	14,89	18,14	28,63
Bengkulu	13,84	10,49	42,79
Lampung	24,26	21,88	28,73
Kep. Bangka Belitung	44,43	51,53	17,43
Kepulauan Riau	1,85	10,13	13,67
DKI Jakarta	11,93	10,15	21,11
Jawa Barat	18,56	25,49	21,07
Jawa Tengah	16,03	24,56	24,29
DI Yogyakarta	13,44	20,48	50,37
Jawa Timur	20,54	22,05	35,24
Banten	27,96	32,84	27,48
Bali	29,46	49,45	6,14
Nusa Tenggara Barat	24,82	18,50	21,54
Nusa Tenggara Timur	28,26	19,43	31,38
Kalimantan Barat	28,35	35,95	12,94
Kalimantan Tengah	22,71	35,93	40,00
Kalimantan Selatan	31,42	11,55	62,74
Kalimantan Timur	25,37	32,08	7,54
Kalimantan Utara	31,52	27,92	38,92
Sulawesi Utara	24,29	18,46	26,67
Sulawesi Tengah	31,78	31,43	28,06
Sulawesi Selatan	36,69	25,43	26,62
Sulawesi Tenggara	16,98	15,46	35,53
Gorontalo	54,74	20,07	15,21
Sulawesi Barat	56,56	43,04	39,66
Maluku	26,46	22,98	41,32
Maluku Utara	35,51	27,70	23,75
Papua Barat	14,84	27,69	9,19
Papua	27,42	27,26	56,39
INDONESIA	21,46	22,46	26,19

Sumber: Diolah dari Susenas 2020, 2021, dan 2022

Catatan: Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk

Tabel 3.1.12 Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melapor ke Polisi Menurut Jenis Kejahatan dan Provinsi, 2020-2021

Provinsi	Pencurian		Penganiayaan		Pencurian dengan Kekerasan	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A c e h	10,38	28,04	1,11	3,40	1,81	2,42
Sumatera Utara	16,08	11,19	2,02	3,16	0,69	2,51
Sumatera Barat	23,12	16,70	1,18	-	0,64	-
Riau	24,78	11,62	1,08	1,31	1,83	2,22
Jambi	13,16	17,40	1,65	0,59	0,61	0,59
Sumatera Selatan	25,06	17,41	1,58	1,25	2,30	0,83
Bengkulu	17,22	10,62	-	0,61	-	-
Lampung	15,27	13,51	1,64	0,31	1,37	-
Kep. Bangka Belitung	7,18	16,48	-	-	-	7,73
Kepulauan Riau	27,93	25,40	0,65	-	1,64	-
DKI Jakarta	27,66	27,94	4,96	2,49	4,65	3,81
Jawa Barat	21,28	25,85	1,50	4,11	1,74	2,35
Jawa Tengah	15,10	10,15	1,18	0,19	0,54	-
DI Yogyakarta	13,63	15,90	3,02	-	-	1,13
Jawa Timur	20,22	17,58	1,35	2,19	0,98	0,85
Banten	25,54	22,54	3,49	1,90	4,44	1,90
Bali	11,05	21,91	2,29	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	10,32	14,36	1,17	0,88	-	0,59
Nusa Tenggara Timur	9,40	9,57	5,18	2,87	0,66	0,62
Kalimantan Barat	12,83	22,11	0,83	-	1,77	-
Kalimantan Tengah	9,78	25,23	3,95	2,78	0,58	0,58
Kalimantan Selatan	20,34	7,76	-	-	1,08	2,91
Kalimantan Timur	23,69	20,43	1,07	1,78	-	-
Kalimantan Utara	10,93	26,04	2,39	3,58	1,05	1,52
Sulawesi Utara	22,72	18,05	4,78	7,62	0,45	-
Sulawesi Tengah	19,91	27,93	1,91	1,59	0,95	-
Sulawesi Selatan	21,38	23,25	0,90	2,32	2,10	1,66
Sulawesi Tenggara	16,88	28,19	3,50	1,73	0,35	0,30
Gorontalo	26,72	6,18	2,39	8,97	-	4,15
Sulawesi Barat	5,45	15,45	1,96	2,08	-	4,77
Maluku	10,74	12,28	7,46	1,84	0,17	1,20
Maluku Utara	12,47	11,99	1,00	0,31	1,78	-
Papua Barat	24,24	19,44	4,84	2,06	3,93	5,67
Papua	12,54	23,12	5,20	4,35	5,77	2,28
INDONESIA	18,98	18,27	1,87	2,15	1,45	1,41

Sumber: Diolah dari Susenas 2021 dan 2022

Tabel 3.1.12 Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melapor ke Polisi Menurut Jenis Kejahatan dan Provinsi, 2020-2021 (lanjutan)

Provinsi	Pelecehan Seksual		Lainnya	
	2020 (8)	2021 (9)	2020 (10)	2021 (11)
(1)				
A c e h	-	2,54	0,70	2,42
Sumatera Utara	0,12	1,61	1,10	2,29
Sumatera Barat	0,48	0,59	2,19	3,51
Riau	-	0,36	0,20	0,36
Jambi	0,74	0,59	2,71	2,56
Sumatera Selatan	0,62	0,73	2,60	3,19
Bengkulu	-	-	0,36	0,88
Lampung	-	-	2,46	0,82
Kep. Bangka Belitung	-	-	7,63	1,23
Kepulauan Riau	0,02	0,67	6,24	0,03
DKI Jakarta	2,68	-	5,41	5,16
Jawa Barat	1,13	2,09	3,52	9,59
Jawa Tengah	0,25	0,38	5,04	6,08
DI Yogyakarta	0,40	-	4,42	4,49
Jawa Timur	0,89	1,25	4,22	4,38
Banten	3,49	1,90	9,84	4,14
Bali	-	-	2,88	5,26
Nusa Tenggara Barat	0,07	0,27	1,35	2,17
Nusa Tenggara Timur	0,72	0,20	2,45	4,44
Kalimantan Barat	0,29	-	4,85	0,60
Kalimantan Tengah	1,46	0,93	6,55	2,41
Kalimantan Selatan	-	-	4,01	13,88
Kalimantan Timur	0,45	-	1,97	4,31
Kalimantan Utara	2,33	-	2,53	-
Sulawesi Utara	-	0,20	2,28	2,35
Sulawesi Tengah	0,95	0,27	2,34	4,36
Sulawesi Selatan	0,39	1,14	1,66	7,37
Sulawesi Tenggara	1,37	1,41	2,30	0,85
Gorontalo	-	-	1,94	4,77
Sulawesi Barat	1,54	-	3,99	1,48
Maluku	0,40	0,32	3,79	1,69
Maluku Utara	-	3,16	1,77	-
Papua Barat	1,95	1,49	3,44	3,24
Papua	2,73	1,53	4,75	6,53
INDONESIA	0,80	1,02	3,47	4,83

Sumber: Diolah dari Susenas 2021 dan 2022

DATA MODUL KETAHANAN SOSIAL



Tabel 4.1.1 Persentase Tingkat Kekhawatiran Rumah Tangga Berjalan Sendirian di Siang Hari Menurut Provinsi, 2020

Provinsi	Khawatir	Tidak Khawatir	Tidak Relevan
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	10,35	88,91	0,74
Sumatera Utara	11,69	87,86	0,45
Sumatera Barat	7,66	91,95	0,39
Riau	8,33	91,53	0,14
Jambi	6,26	93,15	0,59
Sumatera Selatan	5,13	94,69	0,18
Bengkulu	5,37	94,46	0,17
Lampung	6,03	93,85	0,12
Kep. Bangka Belitung	6,75	92,72	0,53
Kepulauan Riau	8,56	91,42	0,02
DKI Jakarta	22,61	76,24	1,15
Jawa Barat	16,52	83,37	0,11
Jawa Tengah	6,13	93,46	0,41
DI Yogyakarta	9,10	90,62	0,28
Jawa Timur	7,34	92,24	0,42
Banten	12,84	86,77	0,39
Bali	6,94	92,99	0,07
Nusa Tenggara Barat	7,08	92,72	0,20
Nusa Tenggara Timur	9,51	90,05	0,44
Kalimantan Barat	6,40	93,13	0,47
Kalimantan Tengah	7,35	91,56	1,09
Kalimantan Selatan	7,11	92,71	0,18
Kalimantan Timur	11,48	87,33	1,19
Kalimantan Utara	13,56	85,62	0,82
Sulawesi Utara	16,73	81,90	1,37
Sulawesi Tengah	20,45	79,34	0,21
Sulawesi Selatan	6,30	92,82	0,88
Sulawesi Tenggara	9,09	90,73	0,18
Gorontalo	10,35	89,65	-
Sulawesi Barat	8,00	91,76	0,24
Maluku	5,70	94,01	0,29
Maluku Utara	3,79	95,92	0,29
Papua Barat	9,27	90,57	0,16
Papua	9,74	89,65	0,61
INDONESIA	10,30	89,31	0,39

Sumber: Diolah dari Modul Ketahanan Sosial, 2020

Tabel 4.1.2 Persentase Tingkat Kekhawatiran Rumah Tangga Berjalan Sendirian di Malam Hari Menurut Provinsi, 2020

Provinsi	Khawatir	Tidak Khawatir	Tidak Relevan
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	38,79	60,64	0,57
Sumatera Utara	44,93	54,00	1,07
Sumatera Barat	41,01	56,80	2,19
Riau	34,69	63,21	2,10
Jambi	34,22	64,54	1,24
Sumatera Selatan	28,70	70,90	0,40
Bengkulu	31,50	67,41	1,09
Lampung	27,26	72,55	0,19
Kep. Bangka Belitung	32,04	67,21	0,75
Kepulauan Riau	27,25	72,73	0,02
DKI Jakarta	57,88	40,89	1,23
Jawa Barat	47,60	51,70	0,70
Jawa Tengah	24,86	73,90	1,24
DI Yogyakarta	23,67	74,33	2,00
Jawa Timur	33,96	65,32	0,72
Banten	44,45	54,65	0,90
Bali	18,60	81,02	0,38
Nusa Tenggara Barat	33,67	65,71	0,62
Nusa Tenggara Timur	35,19	64,39	0,42
Kalimantan Barat	27,47	70,27	2,26
Kalimantan Tengah	29,44	68,93	1,63
Kalimantan Selatan	32,96	65,64	1,40
Kalimantan Timur	38,70	59,58	1,72
Kalimantan Utara	34,39	64,39	1,22
Sulawesi Utara	39,69	58,00	2,31
Sulawesi Tengah	45,54	53,74	0,72
Sulawesi Selatan	34,69	63,73	1,58
Sulawesi Tenggara	29,90	69,92	0,18
Gorontalo	46,42	53,24	0,34
Sulawesi Barat	22,95	76,28	0,77
Maluku	34,47	64,85	0,68
Maluku Utara	28,66	70,57	0,77
Papua Barat	40,33	59,19	0,48
Papua	29,11	67,07	3,82
INDONESIA	36,72	62,27	1,01

Sumber: Diolah dari Modul Ketahanan Sosial, 2020

Tabel 4.1.3 Persentase Tingkat Kekhawatiran Rumah Tangga Berkendara (Sepeda, Sepeda Motor, Mobil) Sendirian di Malam Hari Menurut Provinsi, 2020

Provinsi	Khawatir	Tidak Khawatir	Tidak Relevan
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	35,71	60,00	4,29
Sumatera Utara	45,55	49,65	4,80
Sumatera Barat	37,95	56,32	5,73
Riau	32,40	63,68	3,92
Jambi	32,53	62,81	4,66
Sumatera Selatan	32,29	62,96	4,75
Bengkulu	30,66	62,36	6,98
Lampung	29,48	68,81	1,71
Kep. Bangka Belitung	27,46	67,89	4,65
Kepulauan Riau	24,78	74,25	0,97
DKI Jakarta	60,55	32,69	6,76
Jawa Barat	48,74	45,65	5,61
Jawa Tengah	25,01	68,99	6,00
DI Yogyakarta	23,93	69,44	6,63
Jawa Timur	34,79	58,15	7,06
Banten	51,92	43,63	4,45
Bali	17,56	79,92	2,52
Nusa Tenggara Barat	33,83	55,58	10,59
Nusa Tenggara Timur	27,99	54,67	17,34
Kalimantan Barat	25,74	68,50	5,76
Kalimantan Tengah	29,33	65,99	4,68
Kalimantan Selatan	31,35	65,69	2,96
Kalimantan Timur	36,81	60,70	2,49
Kalimantan Utara	33,32	61,57	5,11
Sulawesi Utara	36,64	54,77	8,59
Sulawesi Tengah	44,44	51,38	4,18
Sulawesi Selatan	35,29	58,29	6,42
Sulawesi Tenggara	27,49	66,05	6,46
Gorontalo	39,85	47,15	13,00
Sulawesi Barat	22,32	70,95	6,73
Maluku	30,20	55,85	13,95
Maluku Utara	27,41	61,33	11,26
Papua Barat	34,82	55,21	9,97
Papua	27,81	44,07	28,12
INDONESIA	37,15	56,63	6,22

Sumber: Diolah dari Modul Ketahanan Sosial, 2020

DATA SDGs TERKAIT KEAMANAN



Tabel 5.1.1 Proporsi Penduduk yang Menjadi Korban Kekerasan dalam 12 bulan Terakhir, 2019-2021

Provinsi	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	0,05	0,05	0,02
Sumatera Utara	0,03	0,04	0,04
Sumatera Barat	0,06	0,03	0,03
Riau	0,03	0,05	0,04
Jambi	0,06	0,04	0,02
Sumatera Selatan	0,11	0,06	0,02
Bengkulu	0,09	0,01	0,03
Lampung	0,09	0,05	0,02
Kep. Bangka Belitung	0,03	0,01	0,05
Kepulauan Riau	0,03	0,08	0,01
DKI Jakarta	0,11	0,07	0,05
Jawa Barat	0,06	0,04	0,04
Jawa Tengah	0,04	0,03	0,02
DI Yogyakarta	0,09	0,06	0,01
Jawa Timur	0,07	0,03	0,02
Banten	0,04	0,03	0,01
Bali	0,02	0,01	0,01
Nusa Tenggara Barat	0,08	0,04	0,03
Nusa Tenggara Timur	0,07	0,08	0,04
Kalimantan Barat	0,03	0,02	0,01
Kalimantan Tengah	0,05	0,04	0,03
Kalimantan Selatan	0,03	0,01	0,03
Kalimantan Timur	0,06	0,02	0,02
Kalimantan Utara	0,02	0,07	0,03
Sulawesi Utara	0,06	0,04	0,05
Sulawesi Tengah	0,08	0,06	0,01
Sulawesi Selatan	0,03	0,04	0,03
Sulawesi Tenggara	0,04	0,07	0,04
Gorontalo	0,04	0,04	0,08
Sulawesi Barat	0,00	0,04	0,04
Maluku	0,08	0,17	0,06
Maluku Utara	0,10	0,03	0,02
Papua Barat	0,29	0,25	0,12
Papua	0,12	0,11	0,07
INDONESIA	0,06	0,04	0,03

Sumber: Diolah dari Susenas 2020, 2021, dan 2022

Catatan: Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk

Tabel 5.1.2 Persentase Rumah Tangga yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya Menurut Provinsi, 2020

Provinsi	Khawatir	Tidak Khawatir	Tidak Relevan
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	38,91	60,79	0,30
Sumatera Utara	45,10	54,52	0,38
Sumatera Barat	41,45	58,19	0,36
Riau	35,04	64,82	0,14
Jambi	34,44	65,17	0,39
Sumatera Selatan	28,70	71,24	0,06
Bengkulu	31,84	68,03	0,13
Lampung	27,28	72,60	0,12
Kep. Bangka Belitung	32,37	67,10	0,53
Kepulauan Riau	27,24	72,74	0,02
DKI Jakarta	58,48	41,17	0,35
Jawa Barat	47,94	52,01	0,05
Jawa Tengah	24,95	74,66	0,39
DI Yogyakarta	24,24	75,60	0,16
Jawa Timur	34,15	65,57	0,28
Banten	44,49	55,38	0,13
Bali	18,68	81,32	-
Nusa Tenggara Barat	33,81	65,99	0,20
Nusa Tenggara Timur	35,39	64,36	0,25
Kalimantan Barat	27,50	72,18	0,32
Kalimantan Tengah	29,50	69,51	0,99
Kalimantan Selatan	33,22	66,60	0,18
Kalimantan Timur	39,19	60,04	0,77
Kalimantan Utara	35,19	64,07	0,74
Sulawesi Utara	40,06	58,86	1,08
Sulawesi Tengah	45,74	54,09	0,17
Sulawesi Selatan	34,83	64,60	0,57
Sulawesi Tenggara	29,90	69,92	0,18
Gorontalo	46,64	53,36	-
Sulawesi Barat	23,96	75,98	0,06
Maluku	34,54	65,17	0,29
Maluku Utara	29,15	70,56	0,29
Papua Barat	40,73	59,27	-
Papua	29,40	70,09	0,51
INDONESIA	36,94	62,80	0,26

Sumber: Diolah dari Susenas 2020, 2021, dan 2022

Catatan: Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk

**Tabel 5.1.3 Proporsi Korban Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir yang Melaporkan
Kepada Polisi Menurut Provinsi, 2019-2021**

Provinsi	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	49,99	36,53	73,19
Sumatera Utara	40,09	68,84	70,91
Sumatera Barat	34,76	66,70	8,52
Riau	13,62	42,41	46,21
Jambi	32,20	48,79	18,22
Sumatera Selatan	44,79	64,74	44,74
Bengkulu	49,28	-	23,61
Lampung	61,22	33,70	8,93
Kep. Bangka Belitung	40,36	-	63,28
Kepulauan Riau	100,00	43,68	56,24
DKI Jakarta	14,76	73,26	46,89
Jawa Barat	46,82	53,50	57,16
Jawa Tengah	25,10	36,02	8,44
DI Yogyakarta	15,46	45,01	39,69
Jawa Timur	23,02	45,31	59,18
Banten	65,38	67,55	51,11
Bali	57,57	57,55	-
Nusa Tenggara Barat	28,19	43,34	55,25
Nusa Tenggara Timur	46,00	52,12	45,79
Kalimantan Barat	65,08	81,07	-
Kalimantan Tengah	52,89	71,33	55,77
Kalimantan Selatan	49,25	100,00	35,12
Kalimantan Timur	10,56	48,67	50,41
Kalimantan Utara	78,66	72,69	100,00
Sulawesi Utara	78,31	80,49	89,80
Sulawesi Tengah	56,02	35,26	79,32
Sulawesi Selatan	32,00	48,93	41,11
Sulawesi Tenggara	56,42	65,84	40,25
Gorontalo	27,52	34,24	79,32
Sulawesi Barat	-	55,65	71,58
Maluku	54,75	50,63	34,50
Maluku Utara	53,53	87,65	81,43
Papua Barat	58,54	45,02	45,92
Papua	35,00	58,31	32,49
INDONESIA	37,50	52,43	46,71

Sumber: Diolah dari Susenas 2020, 2021, dan 2022

Catatan: Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk

RELATIVE STANDARD ERROR



Penghitungan Sampling Error

Secara teoritis, terdapat dua jenis kesalahan yang dapat terjadi dalam suatu survei, yaitu *non-sampling error* dan *sampling error*. *Non-sampling error* adalah kesalahan yang terjadi pada saat proses pengumpulan maupun pengolahan data. Misalnya, kesalahan dalam menginterpretasikan pertanyaan-pertanyaan di kuesioner maupun kesalahan dalam melakukan input data. Adapun *sampling error* adalah kesalahan yang terjadi sebagai akibat dari penggunaan teknik sampling tertentu dalam suatu survei.

Pada publikasi ini, dilakukan penghitungan *sampling error* untuk indikator-indikator yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2022. Secara statistik, besarnya *sampling error* hasil Susenas 2022 ditunjukkan oleh nilai galat baku (*standard error*) dari suatu ukuran statistik (rata-rata, persentase, atau jumlah). Untuk mengukur tingkat presisi dari indikator-indikator tersebut, dilakukan penghitungan nilai *Relative Standard Error* (RSE) yang merupakan perbandingan nilai *standard error* terhadap estimasi indikatornya yang dinyatakan dalam satuan persen.

Selain untuk menghitung nilai RSE, *standard error* juga digunakan untuk menghitung besaran selang kepercayaan (*confident interval*). Selang kepercayaan adalah interval nilai yang dapat memuat nilai populasi dari indikator yang diestimasi. Dengan tingkat kepercayaan 95 persen, dapat disajikan selang kepercayaan dengan batas bawah sebesar nilai estimasi dikurangi dua *standard error* dan batas atas sebesar nilai estimasi ditambah dua *standard error*. Semakin rendah nilai RSE atau semakin pendek selang kepercayaan menunjukkan bahwa nilai indikator yang diestimasi tersebut semakin baik.

Menurut Aryago Mulia, dkk (2007), kualitas dari hasil estimasi suatu survei dapat diamati dari nilai RSE yang dihasilkan. Kesalahan sampling yang digunakan dari beberapa estimasi harus diterapkan dan digunakan secara hati-hati. Apabila jumlah kasus yang diobservasi kecil, hasil estimasi akan memiliki kesalahan relatif yang sangat besar. Secara umum, nilai *standard error* akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya besaran estimasi. Sebaliknya, RSE akan menurun apabila ukuran estimasi tersebut meningkat. Oleh karena itu, peningkatan ukuran estimasi menjadi salah satu alternatif untuk memperkecil nilai RSE sehingga nilai estimasi yang dihasilkan menjadi lebih akurat.

Nilai estimasi indikator yang memiliki RSE \leq 25 persen dianggap akurat. Sementara itu, untuk nilai estimasi yang memiliki RSE $>$ 25 persen tetapi \leq 50 persen maka perlu kehati-hatian dalam menggunakan indikator tersebut. Estimasi dengan RSE $>$ 50 persen dianggap sangat tidak akurat dan seharusnya digabungkan dengan estimasi yang lain untuk memberikan estimasi dengan RSE \leq 25 persen.

Penghitungan tingkat *sampling error* untuk indikator-indikator yang disajikan dalam Publikasi Statistik Kriminal 2022 dilakukan menggunakan aplikasi STATA 14. Pada publikasi ini, tidak semua variabel hasil survei dihitung RSE-nya, melainkan hanya beberapa variabel terkait dan penting saja yang dihitung.

Tabel 6.1.1 Sampling Error Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2021

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	0,315	0,000	13,014
Sumatera Utara	0,736	0,001	9,476
Sumatera Barat	0,481	0,001	12,290
Riau	0,561	0,001	11,206
Jambi	0,496	0,001	12,905
Sumatera Selatan	0,569	0,001	9,538
Bengkulu	0,972	0,001	10,474
Lampung	0,501	0,001	10,555
Kep. Bangka Belitung	0,409	0,001	17,079
Kepulauan Riau	0,554	0,001	22,363
DKI Jakarta	0,402	0,001	15,858
Jawa Barat	0,478	0,000	7,210
Jawa Tengah	0,370	0,000	7,434
DI Yogyakarta	0,409	0,001	22,232
Jawa Timur	0,352	0,000	7,687
Banten	0,359	0,000	13,902
Bali	0,195	0,000	18,439
Nusa Tenggara Barat	0,983	0,001	10,547
Nusa Tenggara Timur	0,572	0,001	11,608
Kalimantan Barat	0,442	0,001	12,558
Kalimantan Tengah	0,472	0,001	16,975
Kalimantan Selatan	0,418	0,001	16,781
Kalimantan Timur	0,473	0,001	15,664
Kalimantan Utara	0,567	0,001	18,599
Sulawesi Utara	0,571	0,001	13,382
Sulawesi Tengah	0,629	0,001	15,541
Sulawesi Selatan	0,414	0,000	10,664
Sulawesi Tenggara	0,501	0,001	16,136
Gorontalo	0,463	0,001	19,651
Sulawesi Barat	0,399	0,001	20,883
Maluku	0,780	0,001	16,283
Maluku Utara	0,550	0,001	18,136
Papua Barat	0,734	0,001	14,910
Papua	0,547	0,001	13,755
INDONESIA	0,467	0,000	2,419

Sumber: Diolah dari Susenas 2022

Tabel 6.1.1 Sampling Error Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2021 (lanjutan)

Provinsi	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel			
	Batas Bawah	Batas Atas					
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)			
A c e h	0,244	0,407	1,154	5 512 031			
Sumatera Utara	0,611	0,886	2,129	15 068 803			
Sumatera Barat	0,378	0,611	1,365	5 659 171			
Riau	0,450	0,698	1,512	7 152 428			
Jambi	0,385	0,639	1,173	3 668 550			
Sumatera Selatan	0,472	0,685	1,436	8 777 971			
Bengkulu	0,791	1,193	0,994	2 032 700			
Lampung	0,407	0,616	1,482	8 664 801			
Kep. Bangka Belitung	0,293	0,571	0,901	1 501 921			
Kepulauan Riau	0,357	0,858	1,749	2 431 575			
DKI Jakarta	0,295	0,549	2,214	10 695 220			
Jawa Barat	0,415	0,550	2,386	50 504 720			
Jawa Tengah	0,320	0,428	1,801	35 047 016			
DI Yogyakarta	0,264	0,632	1,916	4 008 860			
Jawa Timur	0,302	0,409	1,948	40 300 476			
Banten	0,274	0,472	2,039	13 206 993			
Bali	0,136	0,280	1,163	4 505 609			
Nusa Tenggara Barat	0,800	1,209	1,634	5 352 261			
Nusa Tenggara Timur	0,455	0,718	1,405	5 644 313			
Kalimantan Barat	0,346	0,566	1,283	5 205 841			
Kalimantan Tengah	0,338	0,658	1,302	2 748 776			
Kalimantan Selatan	0,301	0,581	1,525	4 357 733			
Kalimantan Timur	0,348	0,642	1,403	3 741 646			
Kalimantan Utara	0,393	0,816	0,807	730 859			
Sulawesi Utara	0,439	0,742	1,087	2 543 988			
Sulawesi Tengah	0,463	0,852	1,474	3 14 9987			
Sulawesi Selatan	0,336	0,510	1,386	9 005 721			
Sulawesi Tenggara	0,365	0,687	1,281	2 772 901			
Gorontalo	0,315	0,680	0,988	1 202 972			
Sulawesi Barat	0,265	0,601	1,055	1 410 514			
Maluku	0,567	1,073	1,308	1 818 968			
Maluku Utara	0,386	0,785	1,026	1 281 229			
Papua Barat	0,548	0,983	0,873	1 025 885			
Papua	0,417	0,716	1,277	3 471 658			
INDONESIA	0,445	0,490	1,843	274 204 096			

Sumber: Diolah dari Susenas 2022

Tabel 6.1.2 Sampling Error Persentase Penduduk Laki-Laki yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2021

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	69,453	0,046	6,659
Sumatera Utara	60,625	0,028	4,673
Sumatera Barat	51,653	0,042	8,092
Riau	61,941	0,046	7,366
Jambi	60,353	0,053	8,841
Sumatera Selatan	75,931	0,038	4,953
Bengkulu	75,562	0,033	4,426
Lampung	77,883	0,039	4,959
Kep. Bangka Belitung	56,171	0,086	15,225
Kepulauan Riau	58,959	0,082	13,904
DKI Jakarta	66,714	0,062	9,282
Jawa Barat	65,344	0,027	4,197
Jawa Tengah	56,811	0,028	4,920
DI Yogyakarta	65,224	0,079	12,063
Jawa Timur	57,725	0,029	5,002
Banten	54,844	0,053	9,607
Bali	60,471	0,093	15,416
Nusa Tenggara Barat	64,558	0,043	6,586
Nusa Tenggara Timur	64,704	0,038	5,856
Kalimantan Barat	61,722	0,047	7,592
Kalimantan Tengah	64,587	0,057	8,810
Kalimantan Selatan	55,475	0,056	10,138
Kalimantan Timur	67,550	0,061	9,069
Kalimantan Utara	71,860	0,075	10,496
Sulawesi Utara	70,940	0,050	7,025
Sulawesi Tengah	56,482	0,043	7,575
Sulawesi Selatan	51,856	0,046	8,886
Sulawesi Tenggara	64,846	0,053	8,159
Gorontalo	63,332	0,079	12,435
Sulawesi Barat	50,340	0,107	21,213
Maluku	52,005	0,051	9,779
Maluku Utara	59,904	0,055	9,228
Papua Barat	62,439	0,074	11,900
Papua	60,062	0,035	5,745
INDONESIA	62,292	0,009	1,443

Sumber: Diolah dari Susenas 2022

Tabel 6.1.2 Sampling Error Persentase Penduduk Laki-Laki yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2021 (lanjutan)

Provinsi	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel			
	Batas Bawah	Batas Atas					
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)			
A c e h	59,724	77,709	0,899	17 366			
Sumatera Utara	54,956	66,021	1,312	110 951			
Sumatera Barat	43,486	59,733	0,937	27 197			
Riau	52,686	70,402	1,279	40 108			
Jambi	49,575	70,211	1,000	18 195			
Sumatera Selatan	67,818	82,526	1,336	49 915			
Bengkulu	68,432	81,516	0,743	19 748			
Lampung	69,408	84,533	1,318	43 428			
Kep Bangka Belitung	39,341	71,691	0,918	6 143			
Kepulauan Riau	42,507	73,624	1,314	13 471			
DKI Jakarta	53,706	77,591	1,852	43 003			
Jawa Barat	59,790	70,508	1,924	241 345			
Jawa Tengah	51,270	62,187	1,380	129 544			
DI Yogyakarta	48,719	78,735	1,437	16 391			
Jawa Timur	51,986	63,262	1,495	141 704			
Banten	44,454	64,829	1,568	47 470			
Bali	41,593	76,670	1,215	8 788			
Nusa Tenggara Barat	55,856	72,392	1,386	52 638			
Nusa Tenggara Timur	56,973	71,735	0,968	32 275			
Kalimantan Barat	52,220	70,405	0,994	23 025			
Kalimantan Tengah	52,826	74,814	0,921	12 971			
Kalimantan Selatan	44,361	66,068	1,038	18 219			
Kalimantan Timur	54,618	78,264	1,182	17 685			
Kalimantan Utara	55,138	84,142	0,733	4 142			
Sulawesi Utara	60,312	79,680	0,899	14 532			
Sulawesi Tengah	47,988	64,612	0,825	19 804			
Sulawesi Selatan	42,859	60,734	1,210	37 264			
Sulawesi Tenggara	53,923	74,409	0,887	13 885			
Gorontalo	47,043	77,055	0,829	5 570			
Sulawesi Barat	30,493	70,080	1,089	5 635			
Maluku	42,086	61,768	0,824	14 191			
Maluku Utara	48,755	70,113	0,644	7 052			
Papua Barat	47,179	75,574	0,905	7 532			
Papua	53,146	66,598	0,659	18 975			
INDONESIA	60,514	64,038	1,426	1 280 160			

Sumber: Diolah dari Susenas 2022

Tabel 6.1.3 Sampling Error Persentase Penduduk Perempuan yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2021

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	30,547	0,046	15,140
Sumatera Utara	39,375	0,028	7,194
Sumatera Barat	48,347	0,042	8,646
Riau	38,059	0,046	11,988
Jambi	39,647	0,053	13,458
Sumatera Selatan	24,069	0,038	15,626
Bengkulu	24,438	0,033	13,685
Lampung	22,117	0,039	17,462
Kep. Bangka Belitung	43,829	0,086	19,513
Kepulauan Riau	41,041	0,082	19,975
DKI Jakarta	33,286	0,062	18,603
Jawa Barat	34,656	0,027	7,914
Jawa Tengah	43,189	0,028	6,471
DI Yogyakarta	34,776	0,079	22,625
Jawa Timur	42,275	0,029	6,831
Banten	45,156	0,053	11,668
Bali	39,529	0,093	23,583
Nusa Tenggara Barat	35,442	0,043	11,997
Nusa Tenggara Timur	35,296	0,038	10,735
Kalimantan Barat	38,278	0,047	12,242
Kalimantan Tengah	35,413	0,057	16,067
Kalimantan Selatan	44,525	0,056	12,631
Kalimantan Timur	32,450	0,061	18,878
Kalimantan Utara	28,140	0,075	26,803
Sulawesi Utara	29,060	0,050	17,149
Sulawesi Tengah	43,518	0,043	9,831
Sulawesi Selatan	48,144	0,046	9,571
Sulawesi Tenggara	35,154	0,053	15,050
Gorontalo	36,668	0,079	21,477
Sulawesi Barat	49,660	0,107	21,503
Maluku	47,995	0,051	10,596
Maluku Utara	40,096	0,055	13,787
Papua Barat	37,561	0,074	19,783
Papua	39,938	0,035	8,640
INDONESIA	37,708	0,009	2,384

Sumber: Diolah dari Susenas 2022

Catatan: Warna kuning menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam penggunaan hasil estimasi

Tabel 6.1.3 Sampling Error Persentase Penduduk Perempuan yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2021 (lanjutan)

Provinsi	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel			
	Batas Bawah	Batas Atas					
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)			
A c e h	22,291	40,276	0,899	17 366			
Sumatera Utara	33,979	45,044	1,312	110 951			
Sumatera Barat	40,267	56,514	0,937	27 197			
Riau	29,598	47,314	1,279	40 108			
Jambi	29,789	50,425	1,000	18 195			
Sumatera Selatan	17,474	32,182	1,336	49 915			
Bengkulu	18,484	31,568	0,743	19 748			
Lampung	15,467	30,592	1,318	43 428			
Kep. Bangka Belitung	28,309	60,659	0,918	6 143			
Kepulauan Riau	26,376	57,493	1,314	13 471			
DKI Jakarta	22,409	46,294	1,852	43 003			
Jawa Barat	29,492	40,210	1,924	241 345			
Jawa Tengah	37,813	48,730	1,380	129 544			
DI Yogyakarta	21,265	51,281	1,437	16 391			
Jawa Timur	36,738	48,014	1,495	141 704			
Banten	35,171	55,546	1,568	47 470			
Bali	23,330	58,407	1,215	8 788			
Nusa Tenggara Barat	27,608	44,144	1,386	52 638			
Nusa Tenggara Timur	28,265	43,027	0,968	32 275			
Kalimantan Barat	29,595	47,780	0,994	23 025			
Kalimantan Tengah	25,186	47,174	0,921	12 971			
Kalimantan Selatan	33,932	55,639	1,038	18 219			
Kalimantan Timur	21,736	45,382	1,182	17 685			
Kalimantan Utara	15,858	44,862	0,733	4 142			
Sulawesi Utara	20,320	39,688	0,899	14 532			
Sulawesi Tengah	35,388	52,012	0,825	19 804			
Sulawesi Selatan	39,266	57,141	1,210	37 264			
Sulawesi Tenggara	25,591	46,077	0,887	13 885			
Gorontalo	22,945	52,957	0,829	5 570			
Sulawesi Barat	29,920	69,507	1,089	5 635			
Maluku	38,232	57,914	0,824	14 191			
Maluku Utara	29,887	51,245	0,644	7 052			
Papua Barat	24,426	52,821	0,905	7 532			
Papua	33,402	46,854	0,659	18 975			
INDONESIA	35,962	39,486	1,426	1 280 160			

Sumber: Diolah dari Susenas 2022

Tabel 6.1.4 Sampling Error Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Pencurian Menurut Provinsi, 2021

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	96,465	0,016	1,632
Sumatera Utara	91,600	0,022	2,377
Sumatera Barat	90,147	0,034	3,725
Riau	88,976	0,029	3,225
Jambi	92,361	0,029	3,137
Sumatera Selatan	93,341	0,022	2,402
Bengkulu	96,441	0,019	1,935
Lampung	86,726	0,033	3,827
Kep. Bangka Belitung	82,364	0,079	9,629
Kepulauan Riau	94,507	0,034	3,628
DKI Jakarta	88,328	0,047	5,287
Jawa Barat	87,024	0,024	2,800
Jawa Tengah	75,345	0,038	5,033
DI Yogyakarta	79,036	0,072	9,066
Jawa Timur	81,827	0,029	3,504
Banten	91,567	0,034	3,722
Bali	83,516	0,074	8,810
Nusa Tenggara Barat	94,223	0,021	2,277
Nusa Tenggara Timur	88,572	0,033	3,771
Kalimantan Barat	94,717	0,024	2,555
Kalimantan Tengah	86,298	0,072	8,334
Kalimantan Selatan	72,246	0,102	14,079
Kalimantan Timur	84,126	0,049	5,779
Kalimantan Utara	93,378	0,040	4,311
Sulawesi Utara	83,226	0,045	5,348
Sulawesi Tengah	95,283	0,019	1,997
Sulawesi Selatan	80,518	0,043	5,373
Sulawesi Tenggara	92,427	0,026	2,860
Gorontalo	83,490	0,068	8,183
Sulawesi Barat	87,042	0,052	6,025
Maluku	92,517	0,024	2,571
Maluku Utara	96,529	0,020	2,116
Papua Barat	78,469	0,066	8,410
Papua	87,855	0,036	4,109
INDONESIA	86,769	0,008	0,960

Sumber: Diolah dari Susenas 2022

Tabel 6.1.4 Sampling Error Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Pencurian Menurut Provinsi, 2021 (lanjutan)

Provinsi	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel			
	Batas Bawah	Batas Atas					
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)			
A c e h	91,693	98,540	0,763	17 366			
Sumatera Utara	86,229	94,998	1,777	110 951			
Sumatera Barat	81,343	95,049	1,263	27 197			
Riau	81,977	93,473	1,247	40 108			
Jambi	84,386	96,434	1,000	18 195			
Sumatera Selatan	87,360	96,602	1,365	49 915			
Bengkulu	90,320	98,745	0,962	19 748			
Lampung	78,778	92,000	1,385	43 428			
Kep Bangka Belitung	61,554	93,161	1,108	6 143			
Kepulauan Riau	82,493	98,433	1,187	13 471			
DKI Jakarta	75,690	94,844	2,049	43 003			
Jawa Barat	81,457	91,103	2,421	241 345			
Jawa Tengah	67,192	82,015	2,152	129 544			
DI Yogyakarta	61,755	89,799	1,531	16 391			
Jawa Timur	75,522	86,792	1,902	141 704			
Banten	82,048	96,268	1,816	47 470			
Bali	63,985	93,527	1,263	8 788			
Nusa Tenggara Barat	88,278	97,247	1,433	52 638			
Nusa Tenggara Timur	80,230	93,672	1,282	32 275			
Kalimantan Barat	87,415	97,885	1,116	23 025			
Kalimantan Tengah	65,649	95,403	1,619	12 971			
Kalimantan Selatan	49,052	87,559	2,083	18 219			
Kalimantan Timur	72,188	91,540	1,202	17 685			
Kalimantan Utara	79,735	98,060	0,708	4 142			
Sulawesi Utara	72,645	90,263	0,976	14 532			
Sulawesi Tengah	89,804	97,887	0,858	19 804			
Sulawesi Selatan	70,646	87,650	1,433	37 264			
Sulawesi Tenggara	85,337	96,240	0,800	13 885			
Gorontalo	65,677	93,038	0,933	5 570			
Sulawesi Barat	72,969	94,355	0,796	5 635			
Maluku	86,307	96,040	0,732	14 191			
Maluku Utara	89,380	98,923	0,637	7 052			
Papua Barat	62,888	88,686	0,947	7 532			
Papua	78,843	93,352	1,034	18 975			
INDONESIA	85,048	88,319	1,891	1 280 160			

Sumber: Diolah dari Susenas 2022

Tabel 6.1.5 Sampling Error Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi Menurut Provinsi, 2021

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	29,150	0,057	19,393
Sumatera Utara	14,538	0,025	17,252
Sumatera Barat	20,271	0,038	18,915
Riau	14,792	0,035	23,594
Jambi	17,396	0,046	26,373
Sumatera Selatan	20,072	0,036	18,015
Bengkulu	12,117	0,029	23,709
Lampung	14,636	0,032	22,019
Kep. Bangka Belitung	25,433	0,084	32,915
Kepulauan Riau	26,100	0,094	35,914
DKI Jakarta	33,904	0,065	19,144
Jawa Barat	32,819	0,033	10,028
Jawa Tengah	16,569	0,031	18,551
DI Yogyakarta	20,345	0,079	39,039
Jawa Timur	21,749	0,029	13,438
Banten	26,045	0,053	20,362
Bali	27,165	0,079	29,020
Nusa Tenggara Barat	18,096	0,035	19,238
Nusa Tenggara Timur	16,884	0,034	20,321
Kalimantan Barat	22,708	0,058	25,462
Kalimantan Tengah	28,531	0,065	22,920
Kalimantan Selatan	24,543	0,102	41,565
Kalimantan Timur	26,522	0,064	24,107
Kalimantan Utara	31,139	0,073	23,370
Sulawesi Utara	26,786	0,052	19,330
Sulawesi Tengah	31,962	0,073	22,968
Sulawesi Selatan	31,636	0,049	15,412
Sulawesi Tenggara	30,552	0,062	20,130
Gorontalo	24,078	0,084	34,700
Sulawesi Barat	23,787	0,072	30,146
Maluku	16,052	0,044	27,168
Maluku Utara	15,459	0,052	33,910
Papua Barat	28,716	0,052	18,162
Papua	30,572	0,057	18,498
INDONESIA	23,312	0,010	4,188

Sumber: Diolah dari Susenas 2022

Catatan: Warna kuning menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam penggunaan hasil estimasi

Tabel 6.1.5 Sampling Error Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi Menurut Provinsi, 2021 (lanjutan)

Provinsi	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel			
	Batas Bawah	Batas Atas					
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)			
A c e h	19,391	41,303	1,114	17 366			
Sumatera Utara	10,274	20,173	1,610	110 951			
Sumatera Barat	13,769	28,817	1,069	27 197			
Riau	9,162	23,003	1,338	40 108			
Jambi	10,122	28,256	1,109	18 195			
Sumatera Selatan	13,899	28,093	1,371	49 915			
Bengkulu	7,514	18,963	0,841	19 748			
Lampung	9,371	22,136	1,291	43 428			
Kep. Bangka Belitung	12,552	44,765	1,024	6 143			
Kepulauan Riau	11,987	47,803	1,683	13 471			
DKI Jakarta	22,522	47,509	1,932	43 003			
Jawa Barat	26,716	39,563	2,340	241 345			
Jawa Tengah	11,381	23,496	2,022	129 544			
DI Yogyakarta	8,901	40,036	1,716	16 391			
Jawa Timur	16,561	28,016	1,812	141 704			
Banten	17,030	37,665	1,789	47 470			
Bali	14,586	44,892	1,129	8 788			
Nusa Tenggara Barat	12,235	25,936	1,410	52 638			
Nusa Tenggara Timur	11,172	24,703	1,118	32 275			
Kalimantan Barat	13,345	35,917	1,423	23 025			
Kalimantan Tengah	17,551	42,812	1,121	12 971			
Kalimantan Selatan	9,946	48,922	2,174	18 219			
Kalimantan Timur	15,946	40,716	1,309	17 685			
Kalimantan Utara	18,861	46,799	0,687	4 142			
Sulawesi Utara	17,899	38,040	0,958	14 532			
Sulawesi Tengah	19,507	47,661	1,505	19 804			
Sulawesi Selatan	22,925	41,861	1,375	37 264			
Sulawesi Tenggara	19,949	43,713	1,069	13 885			
Gorontalo	11,461	43,726	0,991	5 570			
Sulawesi Barat	12,565	40,399	0,859	5 635			
Maluku	9,205	26,506	0,962	14 191			
Maluku Utara	7,688	28,647	0,827	7 052			
Papua Barat	19,643	39,899	0,680	7 532			
Papua	20,709	42,610	1,149	18 975			
INDONESIA	21,452	25,280	1,775	1 280 160			

Sumber: Diolah dari Susenas 2022

Tabel 6.1.6 Sampling Error Persentase Rumah Tangga yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya Menurut Provinsi, 2020

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	60,786	0,012	1,924
Sumatera Utara	54,522	0,011	1,997
Sumatera Barat	58,192	0,014	2,392
Riau	64,823	0,014	2,119
Jambi	65,169	0,015	2,281
Sumatera Selatan	71,240	0,012	1,683
Bengkulu	68,027	0,017	2,519
Lampung	72,601	0,012	1,654
Kep. Bangka Belitung	67,102	0,019	2,828
Kepulauan Riau	72,740	0,025	3,437
DKI Jakarta	41,170	0,018	4,281
Jawa Barat	52,006	0,008	1,615
Jawa Tengah	74,662	0,006	0,811
DI Yogyakarta	75,602	0,019	2,468
Jawa Timur	65,569	0,007	1,037
Banten	55,382	0,016	2,816
Bali	81,324	0,016	1,946
Nusa Tenggara Barat	65,989	0,015	2,322
Nusa Tenggara Timur	64,361	0,011	1,774
Kalimantan Barat	72,177	0,013	1,798
Kalimantan Tengah	69,509	0,015	2,185
Kalimantan Selatan	66,598	0,014	2,156
Kalimantan Timur	60,037	0,019	3,116
Kalimantan Utara	64,070	0,030	4,689
Sulawesi Utara	58,857	0,016	2,651
Sulawesi Tengah	54,086	0,016	3,014
Sulawesi Selatan	64,597	0,011	1,668
Sulawesi Tenggara	69,924	0,014	2,073
Gorontalo	53,363	0,023	4,363
Sulawesi Barat	75,983	0,020	2,629
Maluku	65,167	0,020	3,089
Maluku Utara	70,556	0,020	2,812
Papua Barat	59,268	0,023	3,949
Papua	70,089	0,014	1,944
INDONESIA	62,801	0,003	0,432

Sumber: Diolah dari Susenas 2022

Tabel 6.1.6 Sampling Error Proporsi Rumah Tangga yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya Menurut Provinsi, 2020 (lanjutan)

Provinsi	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
	Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
A c e h	58,471	63,053	0,849	1 330 539
Sumatera Utara	52,381	56,646	1,279	3 627 307
Sumatera Barat	55,442	60,893	0,989	1 302 143
Riau	62,086	67,465	1,167	1 745 895
Jambi	62,201	68,024	0,931	943 496
Sumatera Selatan	68,835	73,532	1,193	2 149 982
Bengkulu	64,578	71,289	0,818	526 024
Lampung	70,186	74,891	1,239	2 244 960
Kep. Bangka Belitung	63,281	70,709	0,785	400 170
Kepulauan Riau	67,576	77,358	1,331	595 654
DKI Jakarta	37,764	44,663	1,865	2 875 432
Jawa Barat	50,358	53,650	1,895	13 465 790
Jawa Tengah	73,457	75,830	1,316	9 483 768
DI Yogyakarta	71,762	79,072	1,408	1 113 898
Jawa Timur	64,225	66,889	1,476	11 297 400
Banten	52,309	58,415	1,755	3 317 364
Bali	78,023	84,229	1,345	1 163 283
Nusa Tenggara Barat	62,925	68,925	1,221	1 511 615
Nusa Tenggara Timur	62,093	66,567	0,815	1 238 385
Kalimantan Barat	69,564	74,649	0,987	1 232 257
Kalimantan Tengah	66,453	72,402	0,864	727 620
Kalimantan Selatan	63,727	69,351	1,021	1 193 640
Kalimantan Timur	56,321	63,641	1,149	959 781
Kalimantan Utara	57,997	69,724	0,784	166 213
Sulawesi Utara	55,768	61,878	0,790	657 554
Sulawesi Tengah	50,879	57,259	0,888	781 294
Sulawesi Selatan	62,459	66,679	1,025	2 195 778
Sulawesi Tenggara	67,009	72,687	0,784	651 708
Gorontalo	48,784	57,886	0,802	312 838
Sulawesi Barat	71,854	79,677	0,829	333 448
Maluku	61,125	69,002	0,809	388 640
Maluku Utara	66,525	74,290	0,717	287 621
Papua Barat	54,613	63,763	0,675	212 776
Papua	67,353	72,689	0,878	922 664
INDONESIA	62,268	63,331	1,456	71 356 936

Sumber: Diolah dari Susenas 2022

ST2023
SENSUS PERTANIAN

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021) 3863816
Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpshq@bps.go.id

